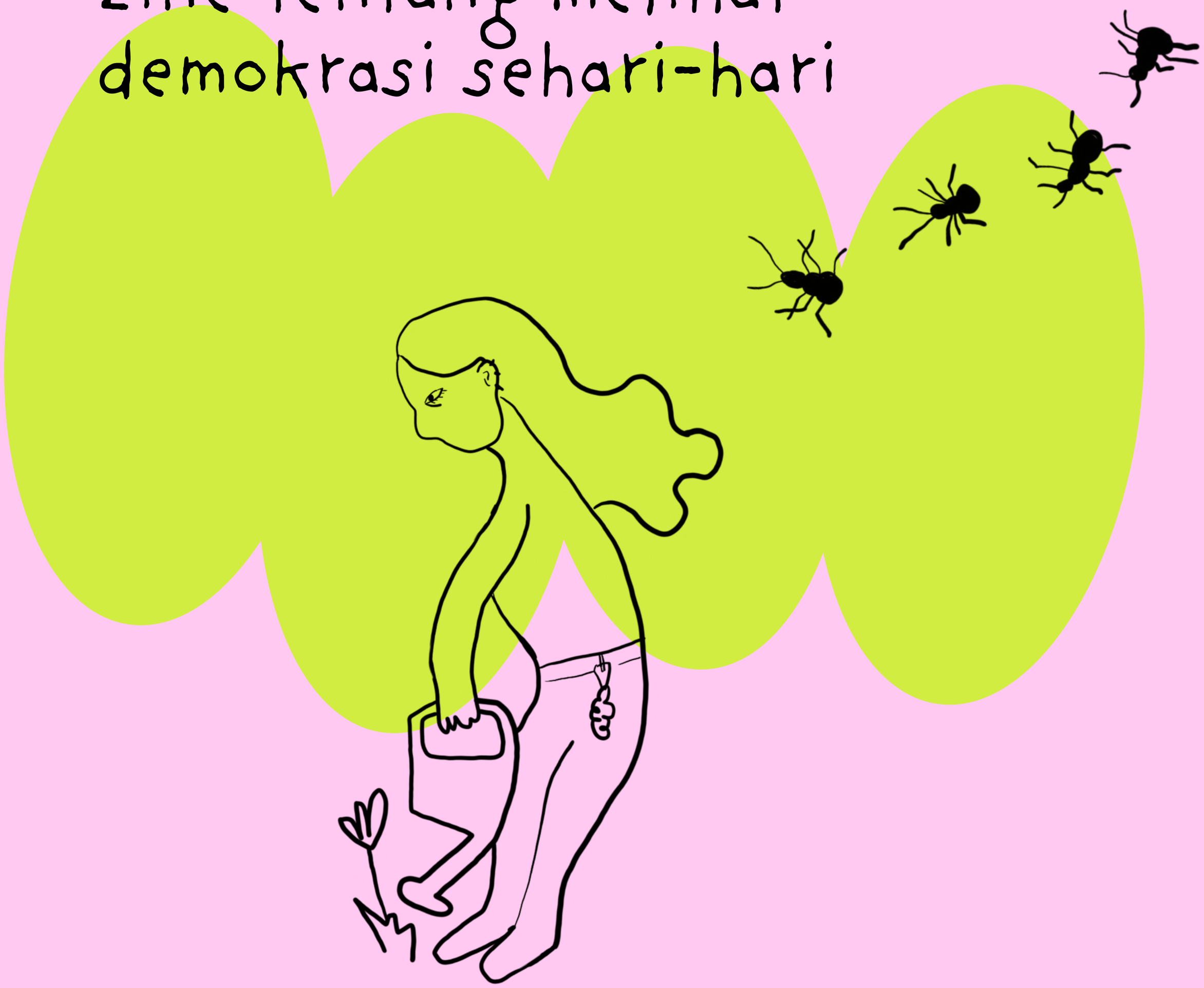
Digital Democracy Initiative

BAGAIMANA HIDUP BESOK?

zine tentang melihat demokrasi sehari-hari



CIVICUS YAYASAN TIFA PAMFLET

Bagaimana Hidup Besok?
Zine tentang melihat demokrasi sehari-hari
2026

Kontributor
Alfito Dianova
Andhika
Aris Ryant Kurniawan
Bimo Rangga Alfaroby Mosyafwa
Daffa Ulhaq
Dinda Anisa Rakhmawulan
Ghevin Agung Nugraha
Ilham Bayu Ramadhan
M. Khoirul Imamil M
Marlina Marlin
Melisa Nirmaladewi
Michelin Sallata
Millata Akmaliya
Mufidah Zain
Muh. Wahyu
Nadiva Risa Azzahra
Rafi Choirurrozikin
Rosyida Rahma
Sagitarius Marbun
Tari Aisyah Muhammad Masdar
Tia Mega Utami
Tiara Karina
Tri Febi Maharani
Tria Noviantika

Tim Laboratorium Demokrasi
Ael Napitupulu
Aris Ryant Kurniawan
Firdaus H.R.
Makhrisza
Syifa Syauqina

Penjahit Zine
alia ruray

Pendamping Editorial dan Asistensi Teknis
Aulia Maulani

Pemeriksa Akhir
Widya Rafifa Salsabila

Fasilitator dan Mentor
alia ruray
Annisa Inayah
Arisdo Gonzalez
Julia Jasmine
Rastra Yasland
Rebecca Liony



Dituliskan dan diterbitkan oleh:

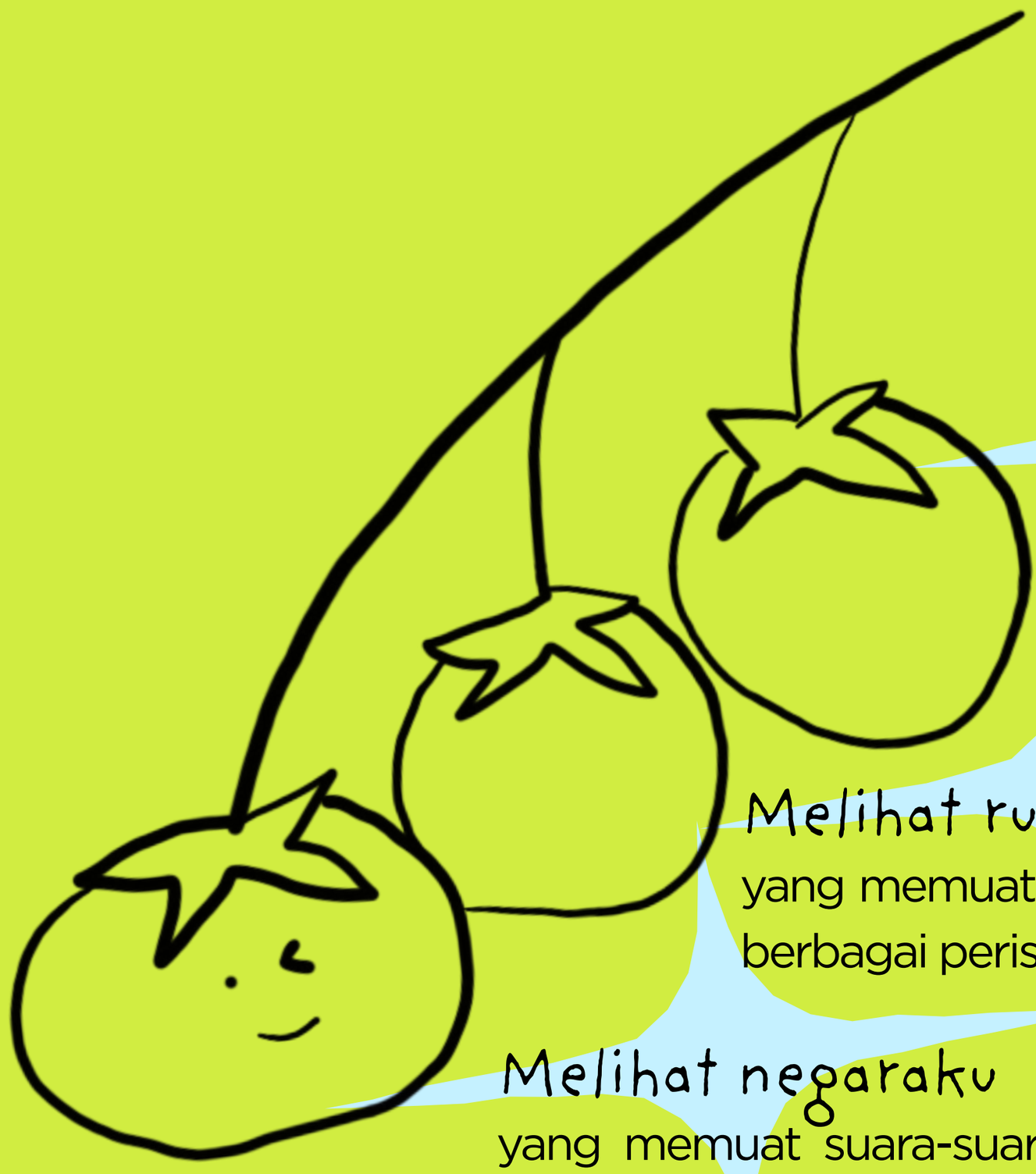
PAMFLET
Perkumpulan Pamflet Generasi
Komplek Buncit Indah
Jalan Mimosa IV Blok E No. 17, Pejaten Barat
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia
www.pamflet.or id
Email: pamfletindonesia@gmail.com

Publikasi ini merupakan bagian dari proyek *Everyday Democracy*, yang didukung oleh Tifa Foundation dan CIVICUS melalui Digital Democracy Initiative (DDI).

Halo, selamat datang di zine ini!

Berangkat dari suara kawan-kawan orang muda dari berbagai daerah dan dengan beragam identitas yang berproses bersama dalam Laboratorium Demokrasi oleh Pamflet Generasi, zine ini mengarsipkan dan menyebarluaskan refleksi kritis atas bagaimana demokrasi menyusup dalam kehidupan sehari-hari.

Perjalanan membacamu akan melalui:



Melihat diriku

yang memuat suara-suara tentang diri, serta ranah personal dan domestik

Melihat ruang gerakku

yang memuat suara-suara yang memaknai berbagai peristiwa di lingkungan sekitar

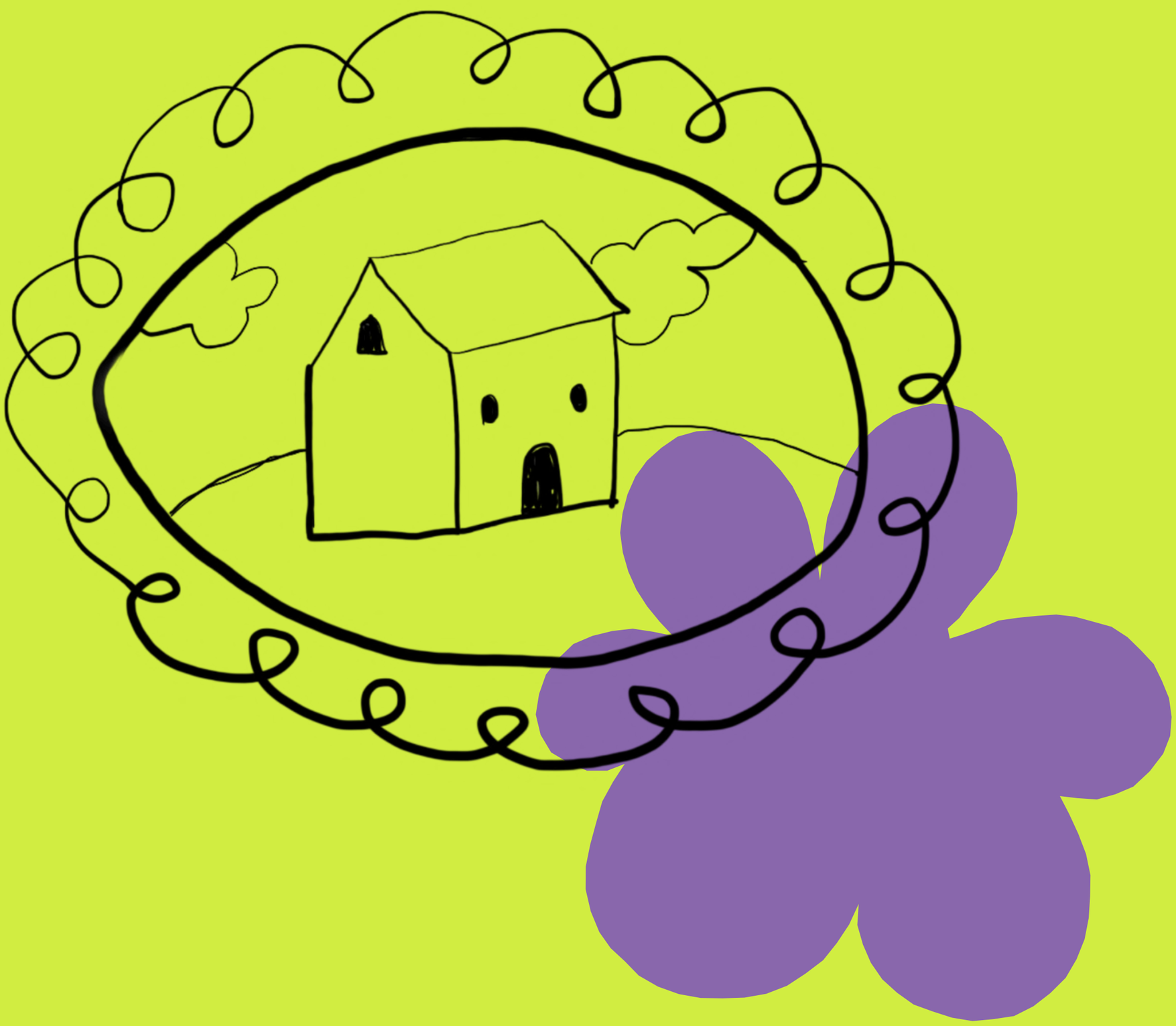
Melihat negaraku

yang memuat suara-suara terkait carut-marut politik dan peran negara

Ketiga bagian ini harapnya membantu proses mencerna 23 refleksi dalam bentuk tulisan, konten karusel, dan video yang tertampung; walau sebenarnya dinding-dinding antara ketiganya begitu tipis dan benang merah antara ketiganya begitu tebal.

Dalam zine ini, kamu juga akan menemukan begitu banyak pertanyaan yang muncul dan dihidupi tanpa jawaban. Salah satunya adalah: *bagaimana hidup besok?* Pertanyaan ini kemudian menjadi satu yang nampaknya bisa menjembatani harapan kami. Dengan melihat ragam bentuk kehadiran demokrasi dalam diri, lingkungan sekitar, dan negara;

mari membayangkan kemungkinan hidup yang lebih baik untuk setidaknya hari esok saja.



Dalam Laboratorium Demokrasi, kami percaya bahwa pendidikan demokrasi diperlukan agar orang muda mampu membaca dunia, menemukan posisinya, terhubung dengan orang lain, dan memiliki keberanian untuk mengambil bagian dalam membentuk kehidupan bersama.

Unduh Kurikulum Laboratorium Demokrasi dan Storytelling Toolkit:

bit.ly/LabDemokrasi

Daftar Isi

Pengantar zine **3**

Kurikulum Laboratorium Demokrasi dan Storytelling Toolkit **5**

Melihat diriku

Memaknai Demokrasi lewat Pilihan-Pilihan Kecil dalam Hidup **9**

Besok aku makan apa, ya? **17**

Tutorial Menjadi Anak yang Baik Agar Ayah Tidak Masuk Neraka **19**

Takut Pada Tubuh Sendiri: Menyorot Stigma Pubertas Pada Anak Perempuan **27**

“Sejak kapan tubuh yang tidak sesuai standar itu dianggap sebagai tubuh yang salah?” **33**

Bagaimana Hidup Besok? **34**

Melihat ruang gerakku

“Kak, lihat deh pacarku ganteng, kan?” **42**

Refleksi Sebagai Peranakan Arab Indonesia **51**

Di desaku perempuan tidak punya ruang untuk bersuara! **55**

Collective Care: A Place We Share **62**

Di Bawah Asap dan Asa yang Sama, Kami Berdiri Tanpa Bendera Terpisah **70**

Praktik demokrasi sehari-hari di asrama? **73**

Melihat ruang negaraku

Demokrasi Sehari-hari dan Kebakaran Hutan di Maluku **75**

Utara: Suara yang Jarang Didengar

Politik Patronase dan Meritokrasi Seremonial **84**

Nasib Sial Perempuan di Tengah Bencana **100**

Curhat tipis tentang balik kampung ke Bandar Lampung **108**

Akar dan Arah: Mempertanyakan Fenomena Merantau di **116**

Indonesia

Muak Menunggu Bus TJ **121**

Siapa yang Membayar Biaya Kepedulian dalam Sistem **124**

Pangan Kita?

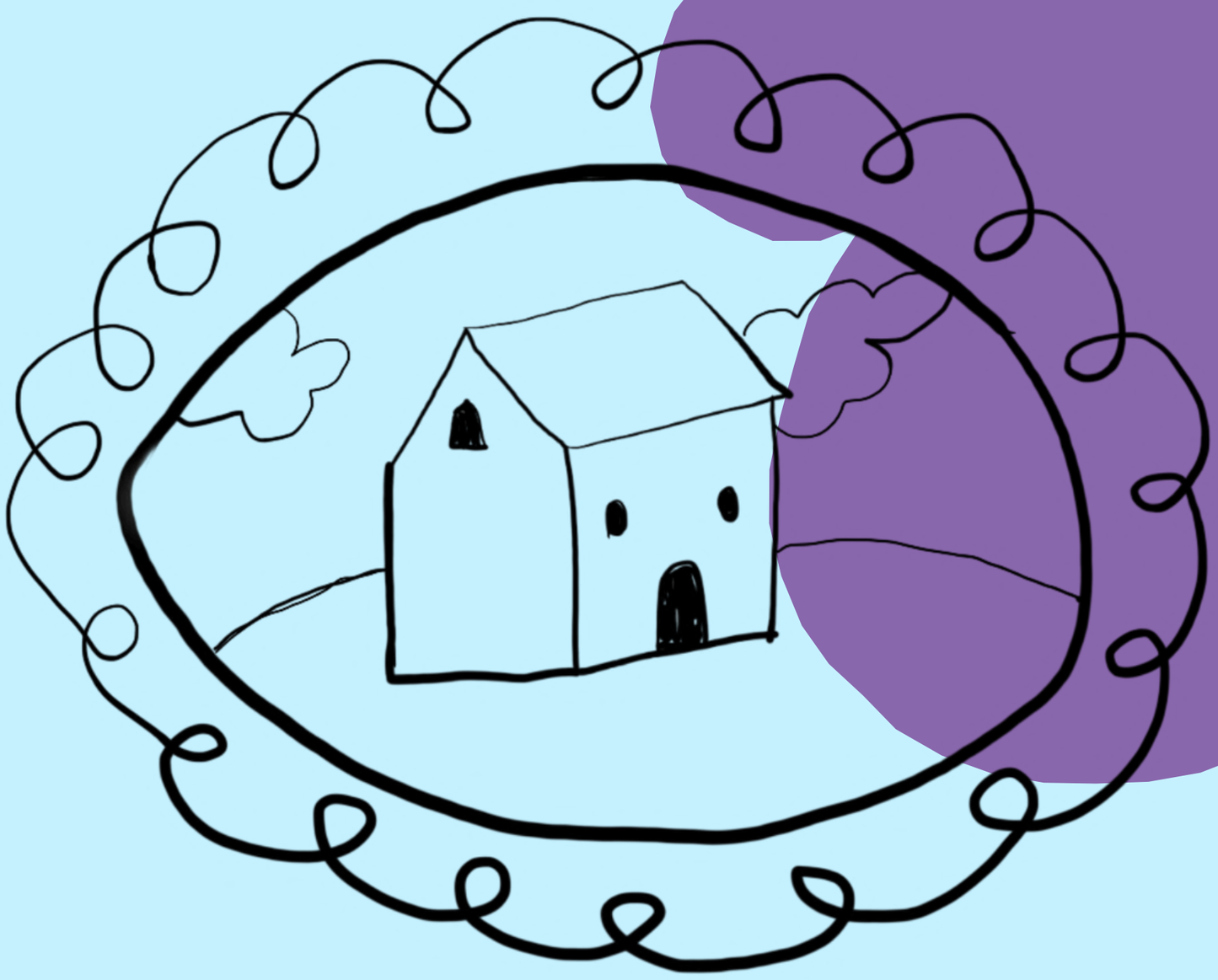
Seporsi mie ayam dan keadaan saat ini **130**

Demokrasi di Jalan-Jalan Rusak **136**

Katanya kami gak boleh minum kopi biar bisa beli rumah? **140**

Period Poverty: Saat Menstruasi Jadi Beban Finansial **142**

Tallo yang Terhimpit dan Menyempit **150**



Melihat diriku

Memaknai Demokrasi lewat Pilihan-Pilihan Kecil dalam Hidup

Oleh Melisa Nirmaladewi

Dulu, demokrasi buatku terasa seperti urusan orang lain. Ia muncul lima tahun sekali lewat baliho di pinggir jalan, debat kandidat di televisi, dan jari bertinta ungu yang diunggah ke media sosial. Setelah itu, ia kembali ke tempatnya, di dalam gedung-gedung pemerintahan ibu kota yang terasa jauh dari kamar anak-anak daerah.

Pandangan itu pelan-pelan berubah. Bukan karena aku membaca buku politik yang tebal, melainkan karena hal-hal kecil yang terus berulang: menunggu bus yang tak kunjung datang, menghitung apakah ongkos ojek masih masuk akal bulan ini, memilih jalan pulang yang lebih terang meski lebih jauh, atau membuka aplikasi kualitas udara sebelum memutuskan mau olahraga di luar atau tidak.

Lama-lama aku sadar, semua itu sebenarnya soal pilihan. Dan, ternyata, pilihan-pilihan itu tidak sepenuhnya milikku.

Aku bisa memilih naik transportasi umum, tetapi hanya jika ada rute yang bisa membawaku ke tempat tujuan. Aku bisa memilih berjalan kaki, tetapi hanya jika trotoarnya tersedia dan memadai. Bahkan pilihan yang terasa personal, seperti kapan pulang ke rumah atau jalan mana yang ingin kulewati, kadang dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada diriku sendiri.

Dari sana, aku mulai melihat hubungan yang sebelumnya tidak begitu jelas: tentang bagaimana hidup sebagai proyek pribadi pada akhirnya bertemu dengan ruang publik, bagaimana pilihan individual dibentuk oleh keputusan yang kita ambil secara kolektif, dan bagaimana demokrasi sesungguhnya dapat hadir di antara keduanya.

Melihat Hidup dari Lensa "Proyek Pribadi"

Usia dua puluhan adalah masa ketika semua orang seolah sepakat bahwa hidup adalah proyek pribadi. Kita diminta memilih karir yang tepat, mengatur keuangan dengan disiplin, menentukan dengan siapa kita menjalin hubungan, dan menyusun rencana lima tahun ke depan. Kalau gagal, ya salah kita sendiri: kurang usaha, kurang pintar membagi waktu, kurang tahan banting.

Aku sempat percaya sepenuhnya pada cara pandang itu. Sampai aku mencoba hidup "lebih baik" dan menabrak batas yang tidak bisa kuatasi sendirian. Aku ingin naik transportasi umum, tapi rutenya tidak menjangkau tempat



Sumber: Dokumen pribadi penulis

tinggalku. Aku ingin lebih sering berjalan kaki, tapi trotoarnya putus-putus dan dipakai parkir motor. Aku berusaha mengurangi sampah plastik, tapi sampah yang sudah kupilah tetap berakhir di tempat yang sama.

Di titik itu aku mulai bertanya: sebenarnya, seberapa bebas aku memilih?

Pertanyaan itu membawaku ke Development as Freedom karya Amartya Sen (1999). Salah satu gagasannya yang paling menempel di kepalaku terdengar sederhana: kebebasan bukan hanya soal tidak dilarang, melainkan soal memiliki kemampuan nyata untuk menjalani hidup yang kita anggap bernilai.

Gagasan ini membuatku melihat kembali pilihan-pilihan kecil tadi. Sekadar diperbolehkan naik transportasi publik tidak berarti aku benar-benar memiliki pilihan jika rutenya tidak tersedia, tarifnya tidak terjangkau, atau perjalanan pulangnya membuatku tidak merasa aman. Hak untuk hidup sehat juga menjadi sesuatu yang abstrak ketika udara yang kita hirup tercemar atau akses terhadap air bersih tidak merata.

Dengan kata lain, pilihan personal membutuhkan kondisi sosial yang memungkinkan pilihan itu benar-benar dijalankan.

Di sini lah hidup yang selama ini kuanggap sebagai proyek pribadi mulai bersinggungan dengan politik. Sebab banyak hal yang menentukan seberapa luas pilihanku ternyata tidak kuputuskan sendirian. Ada kebijakan transportasi, tata ruang, kualitas lingkungan, harga kebutuhan dasar, sistem pekerjaan, dan berbagai keputusan lain yang dibuat atas nama kepentingan bersama.

Aku mulai melihat demokrasi dengan cara yang sedikit berbeda. Demokrasi bukan hanya soal siapa yang boleh memilih atau siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana keputusan bersama membentuk ruang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pada akhirnya, demokrasi menentukan bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga kondisi seperti apa yang memungkinkan kita menjalani hidup yang kita pilih.

Hak atas Ruang dan Rasa Aman

Kalau pilihan hidup kita ternyata tidak pernah sepenuhnya personal, pertanyaan berikutnya adalah: di mana batas antara kehidupan pribadi dan keputusan bersama itu? Salah satu jawabannya ada di ruang publik.

Henri Lefebvre memperkenalkan gagasan tentang "hak atas kota" untuk menunjukkan bahwa kota bukan hanya kumpulan jalan dan gedung; ia adalah ruang hidup yang dibentuk oleh relasi sosial, ekonomi, dan politik. Tinggal di sebuah kota tidak otomatis membuat kita punya akses yang sama terhadapnya. Ada yang bisa menikmati taman, udara yang lebih bersih, rumah yang aman, dan transportasi yang nyaman. Ada pula yang harus tinggal di kawasan langganan banjir, dekat sumber polusi, atau jauh dari layanan publik.

Perbedaan itu sering kali terlihat seperti persoalan tempat tinggal atau keadaan ekonomi. Tetapi semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa ia juga menyangkut siapa yang memiliki kebebasan untuk menggunakan ruang dan siapa yang harus terus menyesuaikan diri terhadapnya.

Sebagai perempuan, aku merasakan bahwa ruang publik tidak pernah benar-benar sekadar soal ruang. Ia juga tentang tubuh: bagaimana tubuh berpakaian, bergerak, dilihat, dan merasa aman di dalamnya. Sebelum keluar rumah, ada serangkaian pertimbangan yang nyaris otomatis bergumul dalam pikiran: apakah baju ini cukup "aman", pukul berapa baiknya sudah berada di rumah, dan kontak darurat siapa yang harus siap dihubungi dalam situasi genting.

Kadang aku lupa bahwa semua perhitungan itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajar. Bahwa ada orang yang bisa keluar rumah, berjalan sendirian, pulang larut, atau sekadar menikmati sebuah kota tanpa harus terus-menerus menghitung kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada diri dan tubuh.

Leslie Kern, dalam Feminist City: Claiming Space in Man-Made World (2020), menulis bahwa "The city is not neutral. It is built on assumptions about who belongs, who is safe, and whose needs matter."



Sumber: Dokumen pribadi penulis

Kota dan serangkaian dinamikanya bukan ruang yang sepenuhnya netral. Cara sebuah kota dirancang dan digunakan selalu membawa asumsi tentang siapa yang dianggap berhak merasa aman, siapa yang dianggap pantas berada di ruang tertentu, dan kebutuhan siapa yang pada akhirnya menjadi dominasi pertimbangan.

Masih berkaitan dengan bagaimana sebuah kota dibangun, Kern menuliskan pertanyaan sederhana yang mengusik: "*Could the flâneur be female?*" Dalam tradisi urban, sosok flâneur menggambarkan seseorang yang dapat berjalan-jalan di kota, mengamati kehidupan di sekitarnya dan menikmati ruang publik dengan leluasa. Tetapi kebebasan semacam itu tidak selalu tersedia bagi perempuan. Pengalaman perempuan atas kota, seringkali dibentuk oleh rasa takut, kerja merawat, dan kebutuhan untuk terus menegosiasikan ruang.

Bagiku, di sini lah hubungan antara tubuh, ruang publik, dan demokrasi menjadi terasa lebih nyata.

Ketika seorang perempuan memilih jalan yang lebih terang meskipun lebih jauh, memilih pulang sebelum malam, atau menghindari ruang tertentu karena merasa tidak aman, keputusan itu memang terlihat seperti pilihan pribadi. Tetapi jika pengalaman serupa dialami oleh begitu banyak perempuan, mungkin persoalannya tidak lagi semata-mata personal. Pilihan yang terus-menerus harus dibuat karena sebuah ruang tidak aman adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam ruang tersebut yang perlu dipertanyakan secara kolektif.

Demokrasi, dalam pengertian ini, bukan hanya memberi kita hak untuk hadir di ruang publik. Ia juga berkaitan dengan bagaimana ruang itu dirancang agar lebih banyak orang dapat hadir di dalamnya tanpa harus mengecilkan diri, membatasi gerak, atau terus-menerus merasa takut.

Dari Personal Menjadi Kesadaran Kolektif

Mungkin, di sini lah aku mulai memahami mengapa pilihan personal bisa menjadi bagian dari demokrasi.

Satu orang memilih naik transportasi umum mungkin tidak akan mengubah sistem transportasi. Satu perempuan memilih berjalan di jalan yang lebih terang mungkin tidak akan mengubah desain sebuah kota.

Tetapi, ketika pengalaman yang sama dialami berulang kali oleh banyak orang, pilihan-pilihan personal itu mulai membentuk pola. Dan ketika pola itu dikenali sebagai persoalan bersama, ia bisa berubah menjadi tuntutan publik.

Aku kira kesadaran kolektif tidak selalu dimulai dari slogan besar. Kadang ia dimulai dari kalimat yang sangat sederhana mulai dari pikiran: “Aku juga mengalami ini.”



Sumber: Dokumen Nuturang

Pada titik tertentu, pengalaman yang tadinya terasa seperti kegagalan atau kesulitan pribadi mulai terlihat sebagai sesuatu yang memiliki pola. Dan ketika kita mulai melihat polanya, kita mulai bisa bertanya: siapa yang membuat kondisi ini, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung akibatnya, dan apa yang bisa kita ubah bersama?

Mungkin, demokrasi bekerja justru di ruang antara pertanyaan-pertanyaan itu.

Pemilu, parlemen, partai politik, dan pengadilan tentu tetap penting. Tetapi aku ingin demokrasi juga terasa di tempat-tempat yang lebih biasa. Ketika aku bisa mengecek kualitas udara melalui data publik yang terbuka dan dapat dipercaya. Ketika aku bisa naik transportasi umum pada malam hari tanpa harus menggenggam ponsel erat-erat. Ketika perempuan bisa menggunakan ruang publik tanpa harus terus menghitung risiko terhadap tubuhnya.

Aku masih ingin bebas menentukan hidupku sendiri; melalui pekerjaan apa yang kujalani, dengan siapa aku berbagi hidup, di mana aku tinggal, dan seperti apa masa depanku. Keinginan itu tidak berubah. Yang berubah adalah pemahamanku bahwa kebebasan membutuhkan pijakan.

Tidak semua orang bisa memilih berjalan kaki. Tidak semua orang bisa memilih makanan yang paling sehat, rumah yang bebas banjir, pekerjaan tanpa paparan polusi, atau perjalanan pulang yang aman. Bukan selalu karena mereka tidak mau memilih, tetapi karena pilihan tersebut memang tidak tersedia atau tidak terjangkau.

Karena itu, mungkin pertanyaan demokrasi bukan hanya "apakah warga punya pilihan?", tetapi juga "apakah pilihan itu sungguh tersedia bagi semua orang?"

Pertanyaan kedua membawa kita keluar dari diri sendiri. Ia mengubah persoalan yang semula terasa personal menjadi sesuatu yang bisa dibicarakan, diperdebatkan, dan diperjuangkan sebagai kepentingan bersama. **Dan mungkin, di situ lah demokrasi sebenarnya mulai terasa dekat.**

Bukan ketika kita berdiri di depan bilik suara setiap lima tahun sekali, tetapi ketika kita menyadari bahwa pilihan kecil dalam hidup kita tidak pernah berdiri sendiri. Bahwa jalan yang kita lewati, udara yang kita hirup, ruang yang kita tempati, dan rasa aman yang kita miliki adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dibuat bersama.

Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk memilih hidup yang kita inginkan. Ia juga tentang membangun kondisi bersama agar semakin banyak orang benar-benar memiliki kesempatan untuk memilih.

Besok aku makan apa, ya?

Oleh Millata Akmaliya

Setiap pagi, aku selalu memikirkan ingin makan apa hari ini. Haruskah aku belanja dan memasak atau beli saja? Sebagai perantau, kedua pilihan tersebut tidak ada yang lebih baik.

Ketika hari terasa lebih malas, tentu aku akan memilih beli makanan melalui aplikasi *online.* Jika harga di aplikasi tidak masuk akal untuk *budget* harian dan tidak ada diskon, aku akan membeli makan di warung yang sedikit jauh dari kosku—tidak ada penjual makanan di dekat kosku. Meski membeli, aku seperti tidak memiliki banyak pilihan. Seringnya aku hanya akan menemui berbagai masakan dengan bahan baku ayam, telur, dan lele. Seolah-olah seluruh bumi ini telah dikuasai oleh mereka saja.

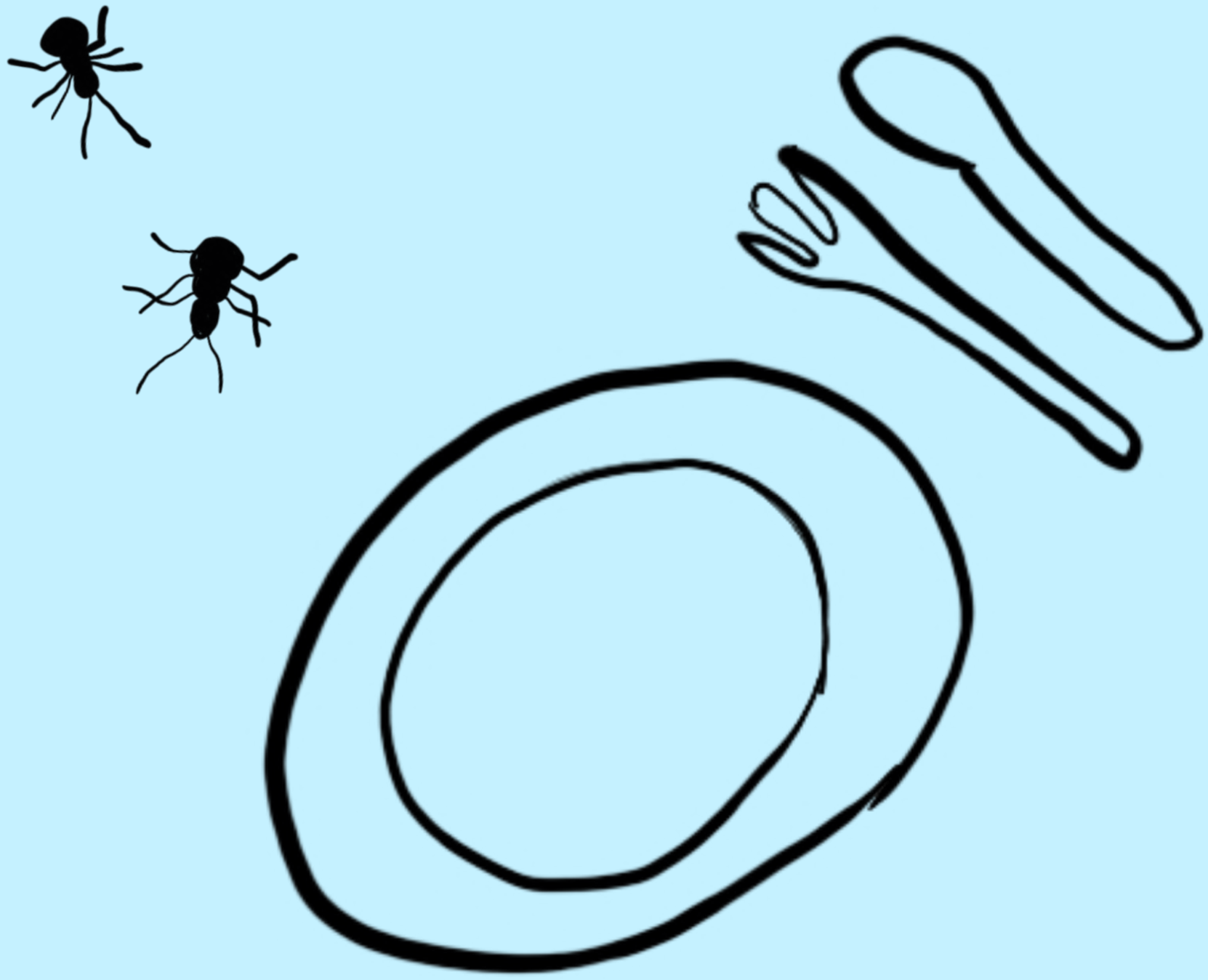
Ketika aku sudah bosan dengan makanan yang dijual berbumbu MSG dan minyak berlebihan, aku memutuskan untuk memasak. Sayangnya sayur yang aku temui di kedai sayur langgananku terlalu mahal untuk makan satu orang, terkadang aku juga tidak menemukan sayur yang biasa aku makan di rumah.

Wortel, kangkung, bayam, sawi, pokchoy, timun, buncis, dan sawi putih, hanya itu-itu saja yang aku gilir bergantian untuk dibeli agar tidak bosan. Terkadang aku ingin makan kenikir, daun pepaya, kecipir, dan beluntas, tapi sayangnya aku tidak mudah menemukannya.

Ketika menjelang siklus menstruasiku, nafsu makanku lebih tinggi. Tubuhku membutuhkan berbagai nutrisi. Aku ingin makan pisang, jambu, alpukat, mangga, dan nanas. Rasanya aku juga butuh makan daging, ikan, dan udang. Tapi, harga makanan-makanan ini membuatku menimbang dua kali, apakah aku benar-benar butuh makanan ini?

Sehari-hari aku kebingungan harus makan apa. Sehari-hari pula aku memikirkan, apakah kita benar-benar punya pilihan atas apa yang kita makan? Atau, kita hanya bersiasat seolah-olah memiliki pilihan, padahal pilihannya terbatas? Atau, pilihan yang tidak bisa kita pilih hanya bisa dipilih oleh segelintir orang yang memiliki uang? Lalu, apa pilihan bagi yang tidak memiliki uang?





Tutorial Menjadi Anak yang Baik Agar Ayah Tidak Masuk Neraka

Oleh Tri Febi Maharani
Dipublikasi bersama Anotasi.org

“You blocked this person. Tap to unblock.”

“You unblocked this person.”

Dua notifikasi itu mungkin terlihat sepele. Bagiku, keduanya menandai hampir satu bulan ketika aku memilih untuk tidak berbicara dengan Ayah.
Aku memblokir WhatsApp Ayah setelah ia dan Ibu melihat video perkenalanku untuk sebuah fellowship regional.

Regional, kompetitif, dan aku lolos.

Seharusnya itu menjadi kabar baik yang kubawa pulang. Tetapi yang dilihat orang tuaku bukan pencapaiannya, melainkan bagian kepalaku—yang merupakan teritori personalku, yang merupakan dan semestinya menjadi ruang otonom bagi diriku sendiri—yang dalam video tersebut tampak tak berkerudung.

Seolah sehelai kain itu lebih mampu menjelaskan seperti apa seharusnya aku menjadi seorang perempuan dan anak perempuan daripada seluruh pilihan yang sedang kuusahakan untuk membangun hidupku sendiri.

Tidak ada ucapan selamat atau ucapan "We're proud of you, my beautiful daughter..."

Yang ada adalah kalimat, "Mau jadi perempuan yang kayak gimana kalau kerudung aja nggak dipakai?" Lalu disusul yang lebih berat, "Mau bikin ayahnya masuk neraka, ya?"

Aku ingat marahnya campur aduk dengan bingung. Tidak hanya karena pencapaianku diabaikan, melainkan karena satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku: kenapa nasib seseorang masuk neraka atau tidak, ditanggung jawabkan kepadaku? Sejak kapan keselamatan akhirat ayahku menjadi bebanku untuk dipikul?

Aneh sekaligus wow! Bagaimana mungkin sehelai kain di kepala seorang perempuan begitu menentukan nasib seorang laki-laki, sampai-sampai pilihan atas tubuhku dibaca sebagai sesuatu yang dapat mempertaruhkan keselamatannya?

Belajar Menjadi Anak yang Baik

Sejak kecil, aku mengenal rumah sebagai tempat pertama untuk belajar menjadi anak yang baik. Ada bayangan tentang seperti apa aku seharusnya tumbuh, menjadi anak yang berbakti, perempuan yang solehah, mengenakan kerudung panjang menutupi dada, dan kelak menjadi seseorang yang membawa nama baik keluarga. Pada satu titik, aku bahkan digadang-gadang untuk menjadi pesohor agama.

Aku bahkan tidak ingat persis umurku saat itu. Mungkin sembilan, mungkin sepuluh (ada bagian dari masa kecilku yang memang tidak lagi bisa kuingat dengan utuh).

Saat itu, anak-anak lain di sekitarku mulai mengikuti berbagai macam les: Kumon, matematika, bahasa Inggris, musik, renang, dan lain-lain. Aku tidak. Kata Ayah dan Ibu, aku sudah cukup pintar dalam matematika dan bahasa Inggris karena selalu masuk tiga besar di kelas. Dan Ayah Ibu juga terlalu miskin untuk memberikanku les renang atau musik karena pada saat itu adik bungsuku baru lahir.

Alih-alih mengikuti les-les itu, aku justru dimasukkan ke les mengaji qori. Qori adalah seni membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan lagu atau irama, suara, dan teknik vokal agar bacaan terdengar indah dan merdu. Di Indonesia, qori atau qoriah juga kerap dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Waktu itu, aku masih terlalu kecil untuk mengatakan tidak. Aku bahkan belum cukup besar untuk memahami bahwa aku punya hak untuk menentukan sendiri apa yang ingin kupelajari.

Sementara Ayah dan Ibu punya bayangan yang cukup jelas tentang siapa sosok yang mereka inginkan dariku. Maka, setiap Rabu malam pukul 19.30, aku pergi ke tempat les qori yang letaknya cukup jauh dari rumah. Ayah mengantarku ke sana, lalu meninggalkanku untuk mengikuti les sendirian.

Aku masih ingat bagaimana groginya aku setiap kali sampai di sana. Hampir semua orang di ruangan itu adalah orang dewasa. Anak-anak bisa dihitung dengan jari. Mereka pun bukan anak-anak yang baru belajar menjadi qori sepertiku. Sebagian sudah punya pengalaman mengikuti kejuaraan qori atau qoriah, bahkan setidaknya di tingkat kabupaten/kota.

Aku? Bisa ngaji dan baca Qur'an sejak kelas 1 SD saja sudah alhamdulillah (Seharusnya, tapi orang tuaku tamak sekali untuk urusan ini).

Aku tidak bisa mengikuti nada yang diajarkan. Aku tidak bisa membuat suaraku terdengar seperti yang mereka harapkan. Aku berkali-kali mengatakan kepada guru mengajiku bahwa aku tidak bisa mencapai nada dan suara semerdu itu.

Sekarang, ketika mengingatnya kembali, aku sering berpikir, mungkin saat itu aku belum tahu bagaimana mengatakan, "Aku tidak mau."

Aku hanya tahu bagaimana menangis.

Hft.

Belajar Menjadi Anak yang Membangkang

Lalu sekarang, aku tumbuh, dan mulai menemukan jalan yang berbeda.

Aku membuka kerudung. Aku memilih pekerjaan dan lingkungan yang jauh dari apa yang dibayangkan orang tuaku. Aku mulai membangun kehidupan dengan pilihan-pilihanku sendiri. Tetapi pilihan-pilihan itu tidak selalu dibaca sebagai bagian dari prosesku mengenal diri. Perbedaan itu justru sering dipahami sebagai pembangkangan terhadap keluarga dan nilai-nilai yang mereka yakini.

Karena pilihan-pilihanku tersebut, aku sering sekali disebut anak durhaka. Dan kata-kata yang jika dilontarkan, aduh, malaikat pun sepertinya enggan untuk mengamini karena jahat sekali. Bahkan, ada doa-doa buruk yang diarahkan kepadaku, termasuk yang kudengar setelah video fellowship itu.

Lama-lama, aku tidak hanya belajar bagaimana menghadapi kemarahan mereka. Aku belajar mengantisipasinya.

Aku mulai berpikir dua kali sebelum bercerita. Menimbang apakah pilihan tertentu perlu diketahui. Memikirkan bagaimana sebuah pendapat akan diterima. Di situlah aku mengenal bentuk lain dari pembungkaman: ketika larangan dari luar perlahan menjadi suara di dalam kepala sendiri.

Aku mulai menyensor diriku sendiri. Keterasingan itu perlahan mengikis banyak hal dalam diriku: karakter, kepribadian, keberanian untuk mencoba, bahkan kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak pernah sempat kuambil karena sejak awal aku sudah merasa tidak akan diterima.

Ada masa ketika aku takut memulai sesuatu. Takut mengambil kesempatan. Takut untuk mengikut lomba lagi, takut untuk mendaftar beragam fellowship lagi, atau sekadar menunjukkan diriku kepada orang lain.

Aku bahkan sempat menonaktifkan Instagram karena tidak berani menunjukkan diriku di media sosial. Aku sampai harus memblokir akun media sosial saudara dan keluargaku, hanya agar punya sedikit ruang untuk menjadi diriku sendiri tanpa merasa sedang diawasi.

Lama-lama, aku sadar bahwa yang paling melelahkan bukan lagi ketika orang lain mengatakan bahwa aku salah. Yang lebih melelahkan adalah ketika aku sudah bisa membayangkan penolakan itu



Sumber: Matilda (1996)

bahkan sebelum mereka mengatakannya.

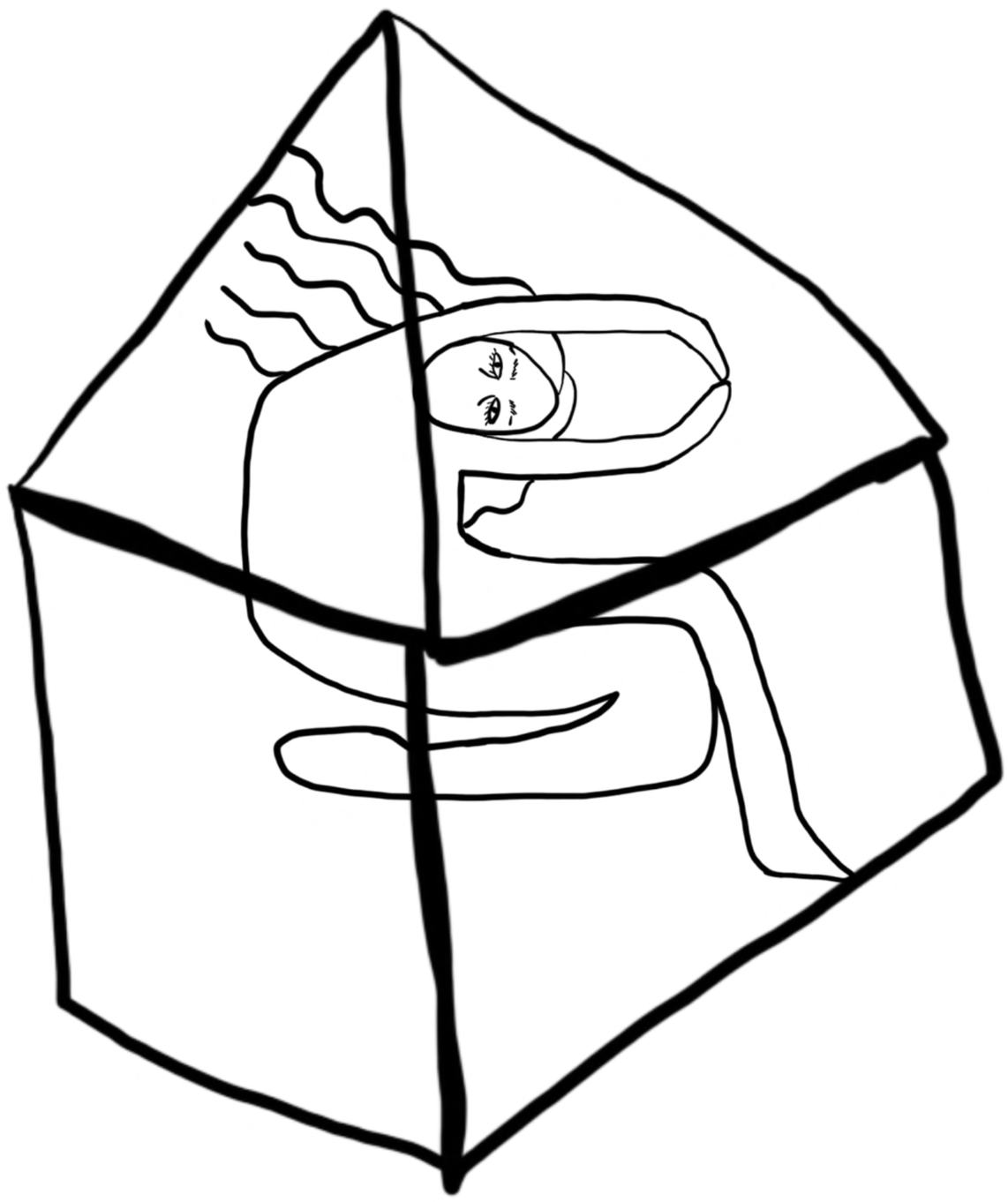
Dan, mungkin, di situlah aku mulai memahami bahwa kuasa tidak selalu bekerja dengan cara melarang kita secara langsung. Kadang, kuasa bekerja dengan membuat kita belajar melarang diri sendiri.

Dan jawabannya tidak melulu berada di ruang-ruang yang selama ini kita anggap politis. Ia bisa dimulai dari rumah. Dari meja makan. Dari percakapan antara anak dan orang tua. Dari keputusan tentang pakaian apa yang boleh dikenakan, sekolah mana yang harus dipilih, pekerjaan apa yang dianggap baik, sampai jalan hidup seperti apa yang dianggap pantas.

Kita mesti sepakat, dan aku berencana untuk memaksa siapa pun yang tidak bersepakat dengan hal ini, bahwa, rumah seharusnya menjadi tempat pertama kita belajar tentang siapa yang boleh bicara, siapa yang harus mendengar, siapa yang punya keputusan terakhir, dan apa yang terjadi ketika seseorang memilih jalan yang berbeda.

Karena semuanya adalah politik, kan?

Aku jadi bertanya: apakah seseorang bisa benar-benar belajar tentang kebebasan jika sejak kecil ia terbiasa takut pada pilihannya sendiri? Apakah demokrasi bisa tumbuh di ruang publik jika di ruang paling intim dalam hidup kita, perbedaan justru selalu dianggap sebagai pembangkangan?



Kalau di rumah saja kita tidak punya ruang untuk mengatakan, “Aku berbeda,” bagaimana kita belajar menjadi warga negara yang hidup bersama orang-orang yang berbeda?

Mungkin karena itu, pertanyaan tentang “berpolitik” bagiku tidak lagi berhenti pada siapa yang kita pilih atau bagaimana negara membuat keputusan. Ia juga menyentuh pertanyaan yang lebih dekat: apakah di rumah kita diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang berbeda?

Sebuah Tutorial

Dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, aku akhirnya membuka blokir itu. Apakah karena semuanya sudah selesai atau semuanya sudah dimaafkan? Tidak juga. Aku membuka blokir WhatsApp Ayah karena aku sadar bahwa memutus komunikasi selamanya bukan yang kuinginkan. Yang kuinginkan hanya ruang untuk tidak terus-menerus diukur dari sehelai kain yang menempel di kepala dan tubuhku.

Dan, tentu saja, aku tidak menganggap pengalaman ini sudah selesai. Sampai sekarang aku masih belajar mengenali mana suara yang benar-benar berasal dari diriku dan mana suara yang terbentuk dari ketakutan akan penolakan.

Tapi setidaknya, dari layar ponsel yang berganti dari blocked menjadi unblocked itu, aku belajar satu hal: bahwa rumah bisa menjadi ruang pertama untuk belajar mendengar dan didengar. Itu bukan berarti semua orang di dalamnya harus memiliki pendapat yang sama, bisa saja karena orang-orang di dalamnya belajar bahwa seseorang tetap berhak menjadi dirinya sendiri, bahkan ketika pilihannya berbeda.

Mungkin selama ini kita terlalu sering mengajarkan anak bagaimana menjadi anak yang baik. Mereka harus menurut, patuh, menjaga nama baik keluarga, dan tidak membuat orang tua kecewa. Padahal, mungkin ada pelajaran lain yang juga perlu diberikan di rumah: bagaimana berbeda pendapat tanpa harus kehilangan kasih sayang, bagaimana mengatakan tidak tanpa disebut durhaka, dan bagaimana membiarkan seseorang tumbuh menjadi dirinya sendiri tanpa menjadikan pilihan hidupnya sebagai ukuran moral bagi seluruh keluarganya.

Jadi, kalau tulisan ini memang harus menjadi sebuah tutorial, mungkin judulnya tidak sepenuhnya bercanda.

Berikut tutorial menjadi anak yang baik agar ayah tidak masuk neraka.

Langkah pertama: pastikan anakmu mengikuti aturan agama. Kalau anakmu perempuan Muslim, pastikan ia memakai kerudung.

Langkah kedua: pastikan ia memilih jalan hidup yang sesuai dengan keinginanmu.

Langkah ketiga: pastikan ia tidak pernah membantah.

Atau, mungkin kita bisa **membuang** seluruh tutorial itu.

Sebab, aku dan banyak orang mungkin pernah atau sedang menukar kebebasan dan identitasnya untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan orang tua, demi menjaga nilai-nilai yang diyakini keluarga, demi dianggap anak yang baik dan solehah, demi menjaga nama baik, dan demi tidak dianggap mengecewakan.

Tapi, keselamatan seseorang seharusnya tidak diletakkan di atas kepala anak perempuan dalam bentuk sehelai kain, kan? Dan menjadi ayah yang baik semestinya tidak membutuhkan seorang anak untuk kehilangan dirinya sendiri terlebih dahulu.

Untuk kamu yang mungkin pernah ada di posisi yang sama, yang pernah merasa harus memilih antara ruang aman di keluarga atau menjadi dirimu sendiri, aku ingin bilang: kamu tidak sendirian, dan kamu tidak salah karena pernah merasa terjebak di antara keduanya.

Semoga suatu hari kamu tidak lagi harus memilih. Karena seharusnya kamu berhak mendapatkan keduanya, menjadi anak yang baik dan tidak membangkang, sekaligus menjadi dirimu sendiri seutuhnya.

Takut Pada Tubuh Sendiri: Menyorot Stigma Pubertas Pada Anak Perempuan

Oleh Marlina Marlin

“Anakku sudah 9 bulan datang bulan, jangan pergi main!”

Aku menatap Mamakku dengan tatapan bingung ketika mendengar kalimat dari seorang saudara jauh Mamakku.

“Mak, kenapa dia tidak boleh pergi main?” tanyaku.

“Dia sudah datang bulan,” jawab Mamak.

Aku masih bingung kenapa tidak boleh bermain kalau sudah datang bulan. Namun, aku tidak bertanya lebih jauh dan hanya menyimpan pertanyaan itu dalam benakku.

Kami membawa anak saudara ibuku pulang ke rumah agar dia tidak bermain bersama orang asing. Aku senang karena dia akan menginap dan pulang bersamaku sehingga aku memiliki teman.

Beberapa jam kemudian, anak itu dijemput lagi oleh saudara jauh ibuku. Aku tidak mengerti alasannya saat itu. Sekilas yang kudengar, ia takut anaknya nekat pergi bermain dengan anak laki-laki.

Aku mendapatkan menstruasi pertamaku pada usia 12 tahun. Ketika orang-orang disekitarku mengetahuinya, mereka merespons dengan kalimat, “Jangan dekat laki-laki, nanti hamil!”

Aku merasa ketakutan setiap kali berinteraksi dengan laki-laki. Aku takut orang-orang di sekitarku mengira aku akan hamil. Aku juga takut diberi stigma sebagai anak perempuan yang tidak baik jika bersosialisasi dengan anak laki-laki.

Aku juga sering mendengar bahwa setelah anak perempuan mendapatkan menstruasi pertama, dilarang bermain seperti sebelumnya. Kami diceramahi untuk tidak lagi bersikap seperti anak-anak; tidak boleh bermain pasir, tidak boleh mandi di sungai, tidak boleh main lompat tali. Lalu, kami mulai mengemban tanggung jawab domestik di rumah. Aku tidak mengerti mengapa semuanya begitu tiba-tiba.

Mamak juga sering memperingatkanku dalam berteman, terutama dengan anak-anak yang telah mendapat stigma buruk. Mamak juga setiap bulan bertanya apakah aku sudah datang bulan. Di lingkungan kami yang tabu membahas hal itu, aku merasa seperti disudutkan, tidak dipercayai, dan diawasi terus-menerus.

Aku juga takut tumbuh dengan ekspresif. Takut tertawa lebar. Aku takut menggunakan baju mencolok, bahkan takut untuk sekadar menabur bedak di wajahku tipis-tipis.

Di kampungku ada stigma kanyuong yang memiliki arti negatif, sama seperti halnya kata gatal, centil, dan genit. Dari situ aku belajar tidak ekspresif karena menyesuaikan standar menjadi anak perempuan yang baik di lingkunganku.

Ketika itu, aku belum memiliki cukup pengetahuan untuk memahami apa yang sedang terjadi pada diriku. Ternyata aku juga mengalami perubahan hormon yang memengaruhi emosiku. Berbagai emosi: marah, sedih, cemas, dan takut datang secara bersamaan.

Pernah seseorang mencurigai aku hamil ketika sebenarnya aku sedang berhadapan dengan kebingungan merespons perubahan emosiku. Rasanya sakit sekali dicurigai dan disalahpahami seperti itu.

Aku hanya tahu bahwa ketika menstruasi, aku harus menggunakan pembalut untuk menampung darahku. Namun, aku tidak tahu bagaimana memilih pembalut yang sesuai dengan kebutuhanku. Suatu hari, saat aku duduk di bangku SMP, pada jam olahraga, darah menstruasiku tembus. Aku tidak bisa pergi ke lapangan untuk meminta izin sehingga aku menitipkan pesan kepada teman perempuanku. Saat absensi, temanku mengatakan bahwa aku sedang menstruasi, tetapi guruku mengatakan seharusnya aku tetap datang ke lapangan dan meminta izin sendiri.

Setelah pelajaran olahraga selesai, temanku memberitahuku bahwa teman-teman yang lain, terutama anak laki-laki, meledekku. Aku merasa sangat malu saat itu. Padahal, di sekolah kami belajar biologi tentang masa pubertas. Namun, berdasarkan pengalamanku, kami lebih banyak diajarkan tentang ciri-ciri pubertas daripada bagaimana merespons perubahan tubuh secara kesehatan reproduksi maupun secara sosial.

Aku juga mengalami perubahan pada tubuhku. Dadaku mulai membesar dan tumbuh rambut di ketiak serta area pubis. Aku merasa takut dan cemas jika ada orang lain mengetahui perubahan itu. Aku juga takut jika tubuhku ternyata berbeda dengan tubuh teman-temanku. Saat itu, aku tidak tahu bagaimana merespons perubahan tersebut. Aku tumbuh di usia pubertas dengan banyak ketakutan, kecemasan, dan rasa malu terhadap tubuhku sendiri.

Dulu aku tidak memahami semuanya, namun setelah dewasa, pengalaman-pengalaman tersebut membuatku menyadari bahwa persoalan pubertas pada anak perempuan tidak berhenti pada perubahan biologis. Aku tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana memperlakukan dan merawat tubuh yang sedang mengalami pubertas. Ketika pembicaraan tentang tubuh perempuan dianggap tabu, ruang pengetahuan sering kali digantikan oleh mitos, larangan, rasa malu, dan ketakutan.

Aku dilarang berteman dengan laki-laki setelah memasuki masa pubertas agar tidak hamil.

Larangan itu membuatku menyadari bahwa perlindungan terhadap anak perempuan sering kali diberikan dalam bentuk pembatasan, tanpa disertai pengetahuan yang cukup. Padahal, masa pubertas adalah masa ketika anak mulai mengalami berbagai perubahan biologis.

Perubahan ini dapat disertai dengan ketertarikan, umumnya pada lawan jenis. Akan tetapi, pengetahuan tentang kepemilikan atas tubuh, batasan atas tubuh, dan cara menjaga diri tidak pernah diajarkan dengan cara yang humanis dan edukatif. Sering kali ajaran hanya datang bersifat larangan.

Aku ditanya Mamak apakah aku sudah datang bulan setiap bulannya, membuatku merasa tidak aman dan nyaman. Hal ini memunculkan sebuah refleksi penting bagiku:

apakah seorang anak perempuan tidak memiliki hak untuk merasa aman, nyaman, dan memiliki kendali atas tubuhnya sendiri?

Aku diminta memakai pembalut, ternyata pembalut ada banyak ukurannya, bahkan aku baru menemukan ukuran yang sesuai dengan kebutuhanku setelah aku belajar dari proses-proses yang kujalani selama masa pubertas itu. Akibatnya, pada masa pubertasku, tubuhku justru menjadi sumber rasa malu ketika darah menstruasi tembus di rok yang aku kenakan. Aku pun menyadari bahwa aku ternyata tidak memperoleh pengetahuan dan dukungan kesehatan reproduksi yang memadai.

Hak atas kesehatan reproduksi, menurutku, tidak hanya berkaitan dengan orang yang akan menikah atau memiliki anak. Ia juga berkaitan dengan hak perempuan untuk memperoleh informasi yang benar mengenai tubuh dan fungsi reproduksinya, hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak, serta hak untuk mengambil keputusan mengenai tubuhnya tanpa dibayangi stigma, ketakutan, dan tekanan sosial.

Selain hak reproduksi, aku juga menyadari betapa pentingnya hak anak dan hak atas tubuh. Hak atas tubuh berarti perempuan memiliki ruang untuk memahami, merawat, dan menentukan batas atas

tubuhnya sendiri. Hak anak berarti anak perempuan yang mengalami pubertas seharusnya tidak kehilangan hak atas masa bermain, pergaulan, maupun rasa aman hanya karena tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan biologis.

Tubuhku bukan tanda bahwa masa kanak-kanakku harus berakhir secara tiba-tiba. Menstruasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk membuat seorang anak perempuan merasa diawasi, dicurigai, atau dipermalukan. Ia adalah bagian dari proses biologis yang seharusnya dapat dijalani dengan pengetahuan, dukungan, dan rasa aman.

Pengalaman masa pubertasku membuatku semakin peka terhadap hal tersebut. Dulu, aku merasa tubuhku adalah sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan. Kini, aku mulai berani memeluknya sebagai tubuh yang utuh, tubuh yang tak akan aku sangkali. Aku menyadari bahwa rasa malu itu tidak muncul begitu saja dari tubuhku. Ia dibentuk oleh lingkungan yang mengajarkan perempuan untuk takut terhadap tubuhnya sendiri, sementara orang lain merasa memiliki hak untuk mengomentari, mengawasi, dan menentukan bagaimana tubuh itu seharusnya dipandang.

Sebagai anak perempuan yang pernah mengalami masa-masa pubertas yang kelam, aku tidak ingin ada anak perempuan lainnya merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada seluruh orang tua, izinkan aku berbicara: temanilah anak perempuan kalian dalam menghadapi masa pubertas yang merupakan salah satu fase pertumbuhan yang besar dalam hidupnya.

Alih-alih hanya menyudutkan dan memberikan larangan, berikanlah mereka pengertian dan pemahaman dengan penuh kasih sayang. Katakan kepada mereka bahwa tubuh mereka berharga. Ajari mereka tentang batas tubuh yang sehat. Berikan ruang bagi mereka untuk bertanya tanpa merasa malu dan takut dihakimi.

Sebagai anak perempuan yang pernah mengalami masa-masa pubertas yang kelam, aku tidak ingin ada anak perempuan lainnya merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada seluruh orang tua, izinkan aku berbicara:



Temanilah anak perempuan kalian dalam menghadapi masa pubertas yang merupakan salah satu fase pertumbuhan yang besar dalam hidupnya.



Alih-alih hanya menyudutkan dan memberikan larangan, berikanlah mereka pengertian dan pemahaman dengan penuh kasih sayang. Katakan kepada mereka bahwa tubuh mereka berharga. Ajari mereka tentang batas tubuh yang sehat. Berikan ruang bagi mereka untuk bertanya tanpa merasa malu dan takut dihakimi.



Jangan mengekang mereka atau membuat mereka frustasi karena mengalami perubahan yang serba tiba-tiba. Berikan mereka perhatian dengan kelemahlembutan dan kepercayaan agar mereka dapat menjadi diri sendiri.

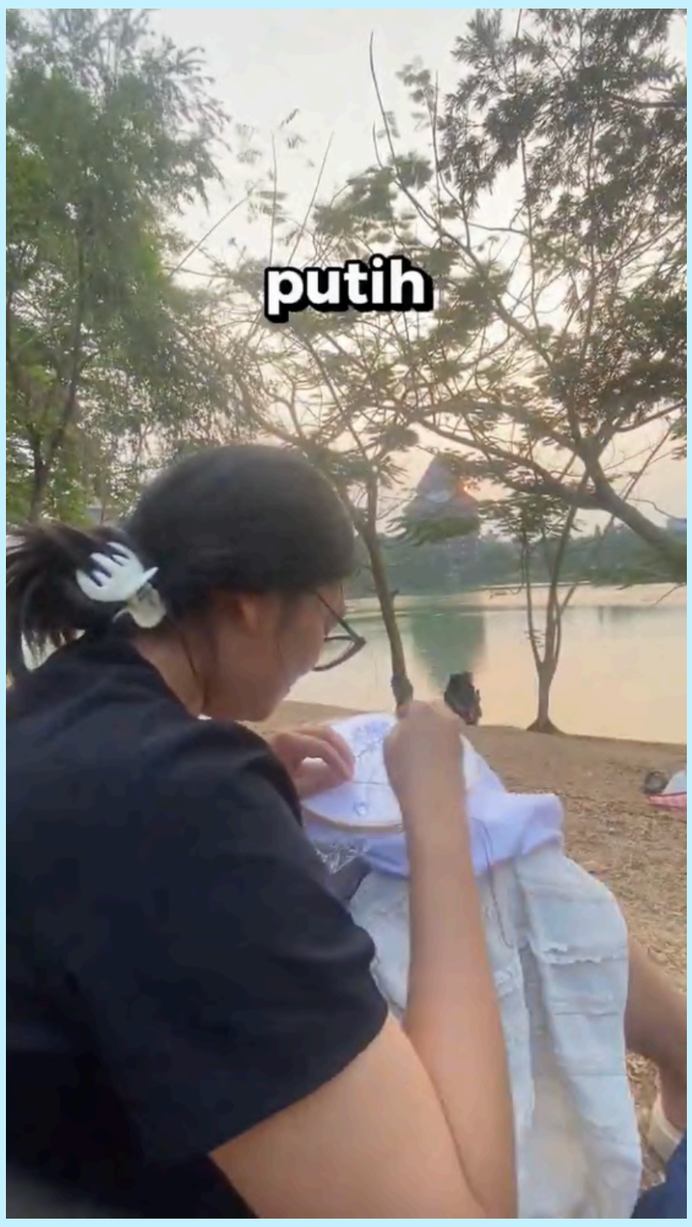


Sebab pertumbuhan yang baik tidak hadir karena ketakutan dan rasa malu. Ia tumbuh dari keberanian, pengetahuan, kasih sayang, dan kepercayaan bahwa seorang anak perempuan memiliki nilai atas dirinya sendiri.

“Sejak kapan tubuh yang tidak sesuai standar itu dianggap sebagai tubuh yang salah?”

Oleh Sagitarius Marbun







Dalam video singkat ini, kamu akan diajak mendengarkan refleksi Sagitarius Marbun tentang hubungannya dengan tubuhnya dan permasalahan *body esteem* perempuan, sambil menonton prosesnya merajut. Tonton di sini.

Bagaimana Hidup Besok?

Oleh Tiara Karina

Sabtu lalu, saat sedang mengendarai motor sendiri ke tempat acara peningkatan kapasitas komunitas feminis, saya merasakan kelelahan yang teramat. Marilah saya rincikan sebuah daftar panjang pengalaman yang saya sebut sebagai didehumanisasi sistem.

Saya meninggalkan rumah pagi itu, melihat punggung Mama terbaring di tengah rumah. Saya hidup bersama kakak perempuan dan Mama yang sakit stroke. Sudah dua tahun kami sekeluarga mengurus segala keperluan Mama, dari ia bangun sampai terlelap. Sejak saat itu, pola kehidupan kami berubah. Dalam 24 jam, ada waktu kaku untuk kerja perawatan seperti memandikan, membersihkan kotoran, memasak, mencuci, menyuapi, memastikan obat diminum oleh Mama.

Keterbatasan ekonomi membuat kami harus berbagi tenaga dan material untuk menjaga kehidupan tetap berjalan di rumah kecil. Ketika kuliah dan

urusan organisasi atau komunitas selesai, saya harus bergantian dengan kakak merawat Mama di rumah. Kontrol dan obat didapatkan dari BPJS Kesehatan, yang tentunya harus mengantre panjang. Kami tidak dapat mengakses layanan kesehatan lebih dari terapi yang tidak rutin dan sekumpulan obat yang ketika habis harus ditebus dengan kantong pribadi.

Belum lagi soal beban mental kasatmata yang kami saya dan kakak senantiasa pikul dalam keseharian, sebagai *caretaker*. Saya rasa, kerja perawatan dan beban kasatmata seperti ini tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah. Warga merawat diri masing-masing. Akhirnya, dua minggu lalu, saya mendapati diri saya duduk di Poli Jiwa rumah sakit daerah. Di tangan saya, 30 butir antidepresan dan lima butir obat tidur nangkring manis.

Di jalan, mata saya melirik berulang pada barometer bensin. Merah menyala dengan jarum menunjuk pada "E". E ... E ... *Empty*! Sudah beberapa bulan untuk mendapatkan bensin di SPBU Banjarmasin harus mengantre panjang, dengan matahari yang terasa satu jatahnya untuk setiap kepala. Kadang, "Pertalite habis" menjadi sapaan pertama oleh mbak-mbak Pertamina. Lantas, senyum luntur.

Di tingkat eceran, harga Pertalite dan Pertamax naik beberapa rupiah. Hitung-hitungan saya, naik seribu untuk Pertalite berarti bisa mengantongi sebutir telur jika ditambah seribu lagi. Naik empat ribu untuk Pertamax berarti bisa membeli seikat bayam. Tapi, akhirnya roda motor berhenti di depan warung madura, merongoh kocek 13 ribu untuk sebotol Pertalite. Aneh tapi nyata, Pertalite langka di SPBU, tetapi tak pernah kering di warung-warung pinggir jalan.

Perjalanan beberapa kilometer berbau hangit, alias terbakar. Di ujung sana, keabu-abuan melapisi apapun. Masker layak pakai saya telah habis. Saya bertarung dengan asap untuk secuil oksigen. Sudah beberapa bulan langit sepanjang waktu diselimuti asap akibat hutan dibakar. Langit biru dan hujan enggan menyambangi. Sementara itu, mata harus fokus dengan genangan air mata karena keperihan. Berjilid-jilid demonstrasi, berbuih-buih mulut karena dialog dengan pejabat, dan teriakan minta tolong yang menembus layar, tidak

membuahkan apa-apa.

Pertarungan di jalan makin sengit dengan kehadiran truk-truk Fuso beroda delapan atau lebih. Pertanyaan lantas muncul di kepala, bagaimanakah beat hitam mungil saya dapat aman menggilas jalan? Truk-truk ini berkeliaran di kota, tak peduli apakah itu pagi, siang, sore, malam. Saya harus menjadi ahli prediksi untuk menjaga diri agar tidak tergilas truk. Kalau dipikir-pikir lagi, sebaiknya, menghindari tergilas truk harus menjadi salah satu keterampilan yang diujikan demi mendapatkan sekeping SIM.

Kesialan berlanjut ketika saya menyadari bahwa saya tidak tahu di mana lokasi kegiatan. Di pinggir jalan, saya membuka Google Maps dan termenung melihat kuota habis serta berderet jaringan Wi-Fi yang terkunci. Tidak ada satu pun jaringan Wi-Fi kota terbuka dan gratis yang bisa saya akses.

Rasa haus membakar tenggorokan, saya tidak membawa botol minum dari rumah. Saya tidak lupa, bahwa segala kebutuhan warga negara ini dinilai, diperjualbelikan, termasuk air minum, notabene kebutuhan dasar manusia. Ya, jangankan mengharap Wi-Fi gratis. Ibarat mimpi siang bolong yang berasap, sebab tidak ada hari tanpa asap di Kalimantan.

Sekembalinya di rumah, saya mendapati gas elpiji tiga kilogram kami habis. Hanya untuk masyarakat miskin, begitu bunyi cap di balik lapis cat hijau yang kusam. Ketika saya berhasil mendapatkan gas langka ini, penjual berkata, "Harganya 38 ribu". Terakhir kali membeli, saya mendapatkan gas hijau itu seharga 23 ribu. Kemudian, saya teringat dengan perkataan dosen saya di kelas, menanyakan kami tujuan negara Indonesia. Ia berkata, "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Ironi, Indonesia mengambil jalan bertentangan dengan tujuannya, yaitu mendehumanisasi warga negaranya melalui sistem. Bagi saya, hidup sehari-hari terasa seperti pertarungan, di jalan, pasar, SPBU, rumah sakit daerah, dan lain-lain, untuk mendapatkan kehidupan standar layak. Lalu, di tengah pertarungan itu, kita mendengarkan pidato resmi presiden yang disiarkan ke seluruh negeri. Ia menjulurkan lidahnya kepada kita semua sambil berkata:

"Goblok, ndasmu!"

Selama dua dekade di negeri ini, saya telah berupaya secara hidup-hidup mencari cara agar merasa sedikit lebih manusia, meskipun pemerintahnya secara mati-matian mendehumanisasi saya dan kita semua. Saya sadar, menemukan dan mempraktikkan cara ini adalah sebuah privilese; saya masih mempunyai waktu, tenaga, dan materi yang diperlukan. Saya berpartisipasi dalam berbagai aksi sipil yang menyuarakan aspirasi warga negara. Kendati nonkekerasan, dalam beberapa aksi, barisan polisi dan intel-intel tak berseragam menghadang, mengawasi kami.



Diskusi Menuju Indonesia Terbakar oleh Brand New Indonesia di Taman Kamboja, Banjarmasin (27/9).

Kemarin malam, di sebuah taman publik, saya bersama ratusan anak muda Banjarmasin mengikuti diskusi yang diselenggarakan Brand New Indonesia bersama BEM Se-Kalimantan Selatan mengenai karhutla. Di akhir kegiatan, kami mendapatkan masker KN95 secara gratis, yang sekarang dijual berlipat-lipat dari harga normal di *marketplace*. Masker tersebut merupakan hasil penggalangan dana yang disalurkan dalam bentuk bantuan alat kesehatan untuk masyarakat terdampak karhutla.

Jumat malam, saya mengikuti peringatan September Hitam yang diadakan di ruang publik pula. Di sana, saya mendengarkan orasi, pembacaan puisi mengenai orang-orang yang sengaja dihilangkan oleh negara ini dan tidak kembali. Saya jadi teringat, pertama kalinya saya belajar mengenai penculikan dan penyiksaan aktivis pada masa Orde Baru adalah saat saya sendirian di kamar saya. Bukan di sekolah.

Beberapa minggu lalu, saya mengikuti demonstrasi di depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Poin-poin tuntutan demonstrasi itu memberikan tenggat waktu dua minggu untuk pemerintah menyelesaikan permasalahan kelangkaan BBM di SPBU, karhutla di seluruh Kalimantan Selatan, pemadaman listrik selama beberapa jam setiap harinya secara bergilir oleh PLN.

Berjam-jam massa duduk di tanah, berhadapan dengan barisan pejabat dan polisi yang bergerombol di belakang pagar, dan kami mendapatkan jawaban: "Kami akan usahakan, kami akan berkoordinasi."

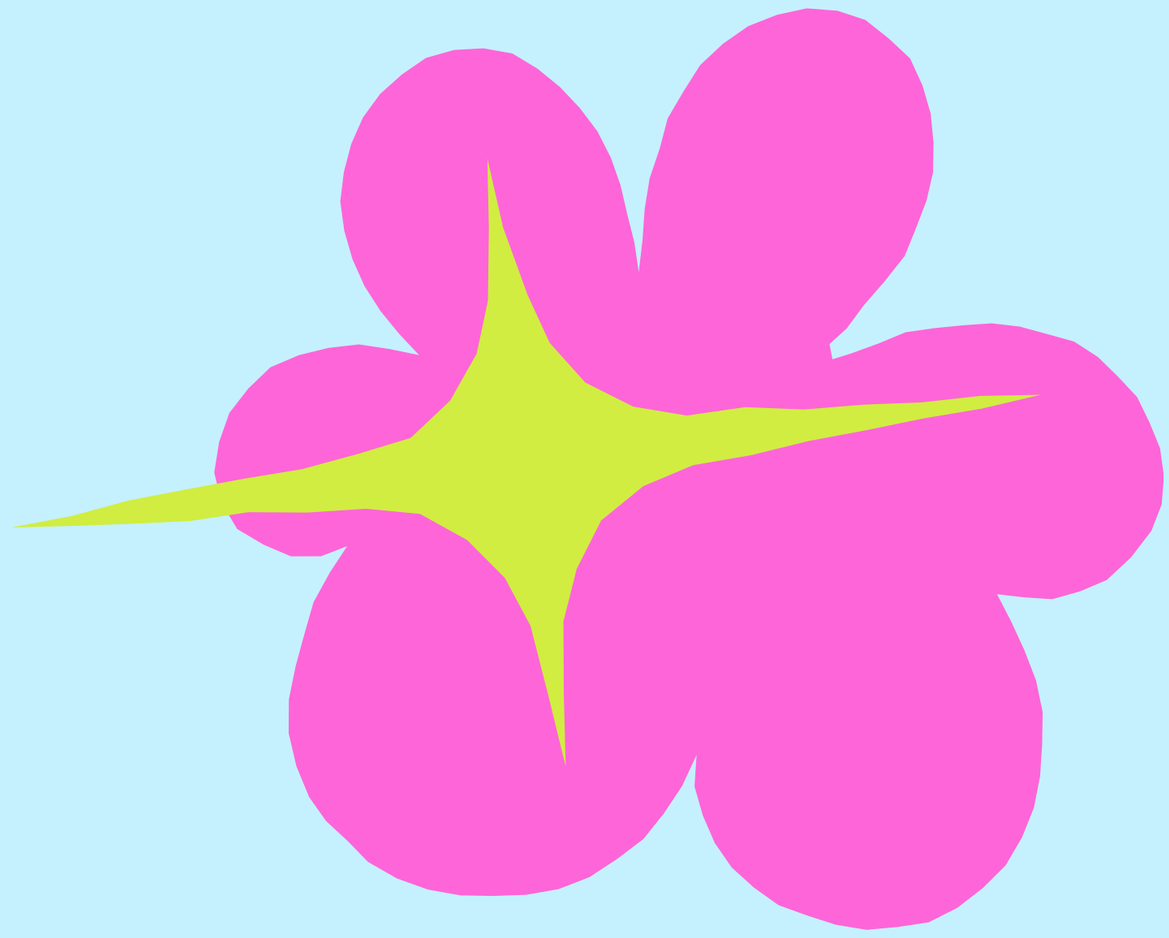
Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, siapa yang sebe-narnya harus kita adili karena dehumanisasi sistem ini.

Di kampus, saya menggelar lapak baca yang sederhana bersama teman. Di atas lapak, buku-buku digelar, diskusi-diskusi mengenai isu terkini dijalankan, kolaborasi dengan komunitas dan individu dijalin. Tak masalah dengan jumlah yang berhadir, dengan judul buku yang dibicarakan.

Saya menggelar lapak untuk menunjukkan bahwa pendapat-pendapat masih didengarkan, keluhan-keluhan sebagai WNI boleh disalurkan, pertanyaan-pertanyaan kritis terbuka untuk dilontarkan. Kendati rezim kini begitu alergi dengan kebisingan warga negaranya, penjara-penjara kian sesak dengan tahanan politik yang dituduh provokator dan karena sebuah unggahan aspirasi di Instagram.

Dan setelah semua itu, saya kembali ke rumah, berkutat dengan pekerjaan, perawatan domestik. Pikiran saya tak lantas sunyi ketika di telah pembaringan:

"Bagaimana hidup besok?"



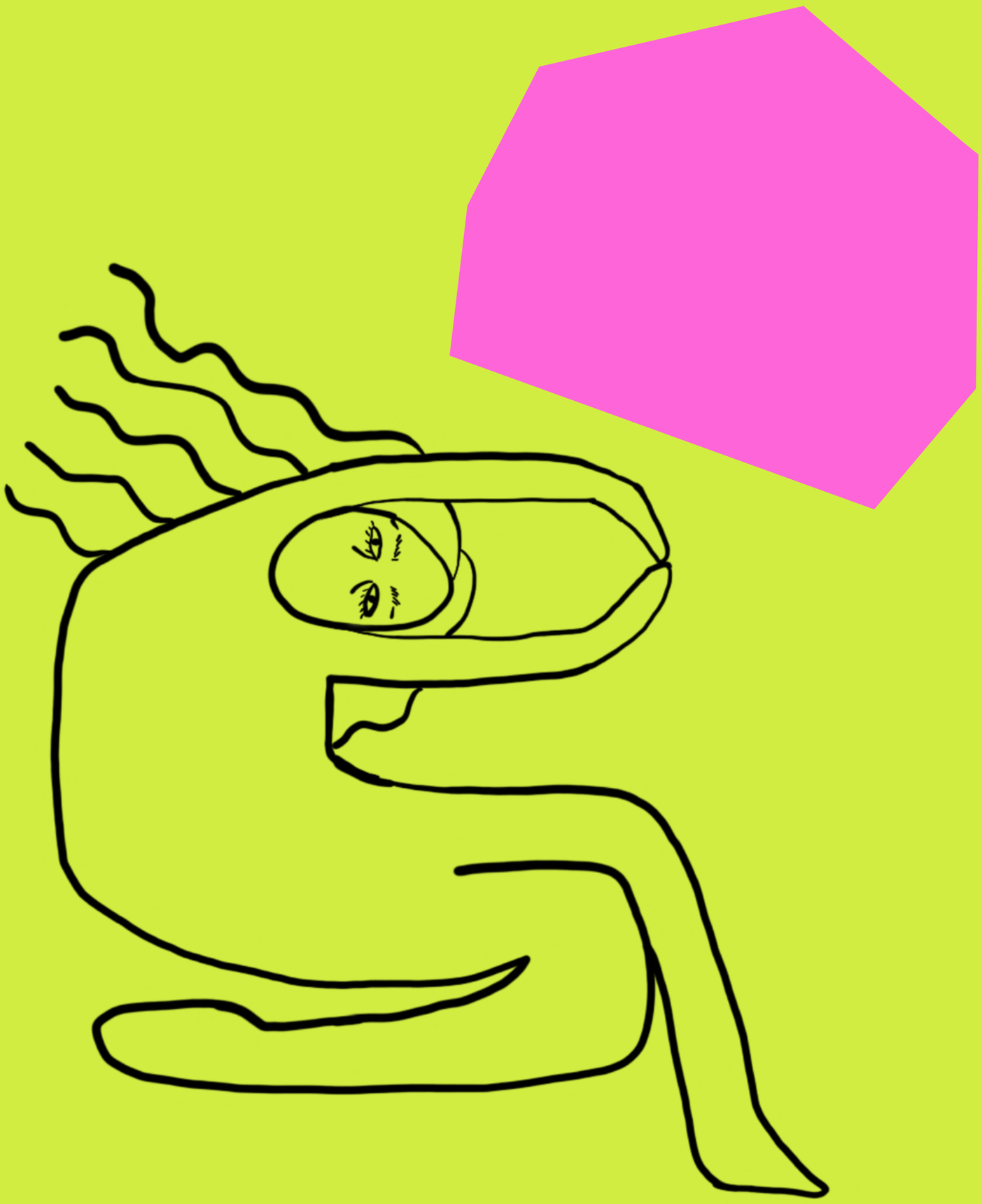
Sebagai anak perempuan yang pernah mengalami masa-masa pubertas yang kelam, aku tidak ingin ada anak perempuan lainnya merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada seluruh orang tua, izinkan aku berbicara:

temanilah anak perempuan kalian dalam menghadapi masa pubertas yang merupakan salah satu fase pertumbuhan yang besar dalam hidupnya.

Alih-alih hanya menyudutkan dan memberikan larangan, berikanlah mereka pengertian dan pemahaman dengan penuh kasih sayang. Katakan kepada mereka bahwa tubuh mereka berharga. Ajari mereka tentang batas tubuh yang sehat. Berikan ruang bagi mereka untuk bertanya tanpa merasa malu dan takut dihakimi.

Jangan mengekang mereka atau membuat mereka frustasi karena mengalami perubahan yang serba tiba-tiba. Berikan mereka perhatian dengan kelemahlembutan dan kepercayaan agar mereka dapat menjadi diri sendiri.

Sebab pertumbuhan yang baik tidak hadir karena ketakutan dan rasa malu. Ia tumbuh dari keberanian, pengetahuan, kasih sayang, dan kepercayaan bahwa seorang anak perempuan memiliki nilai atas dirinya sendiri.

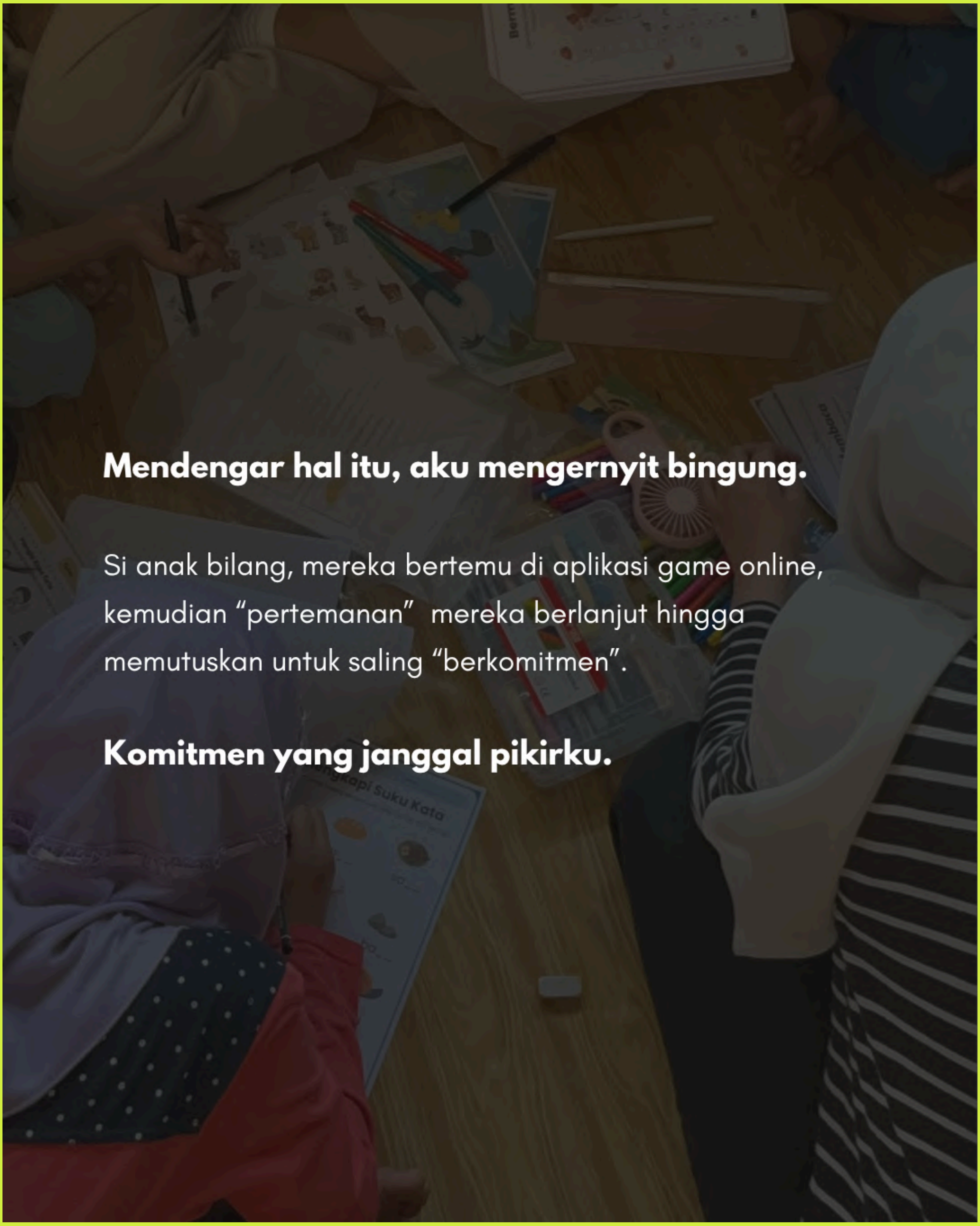


Melihat ruang
gerakku

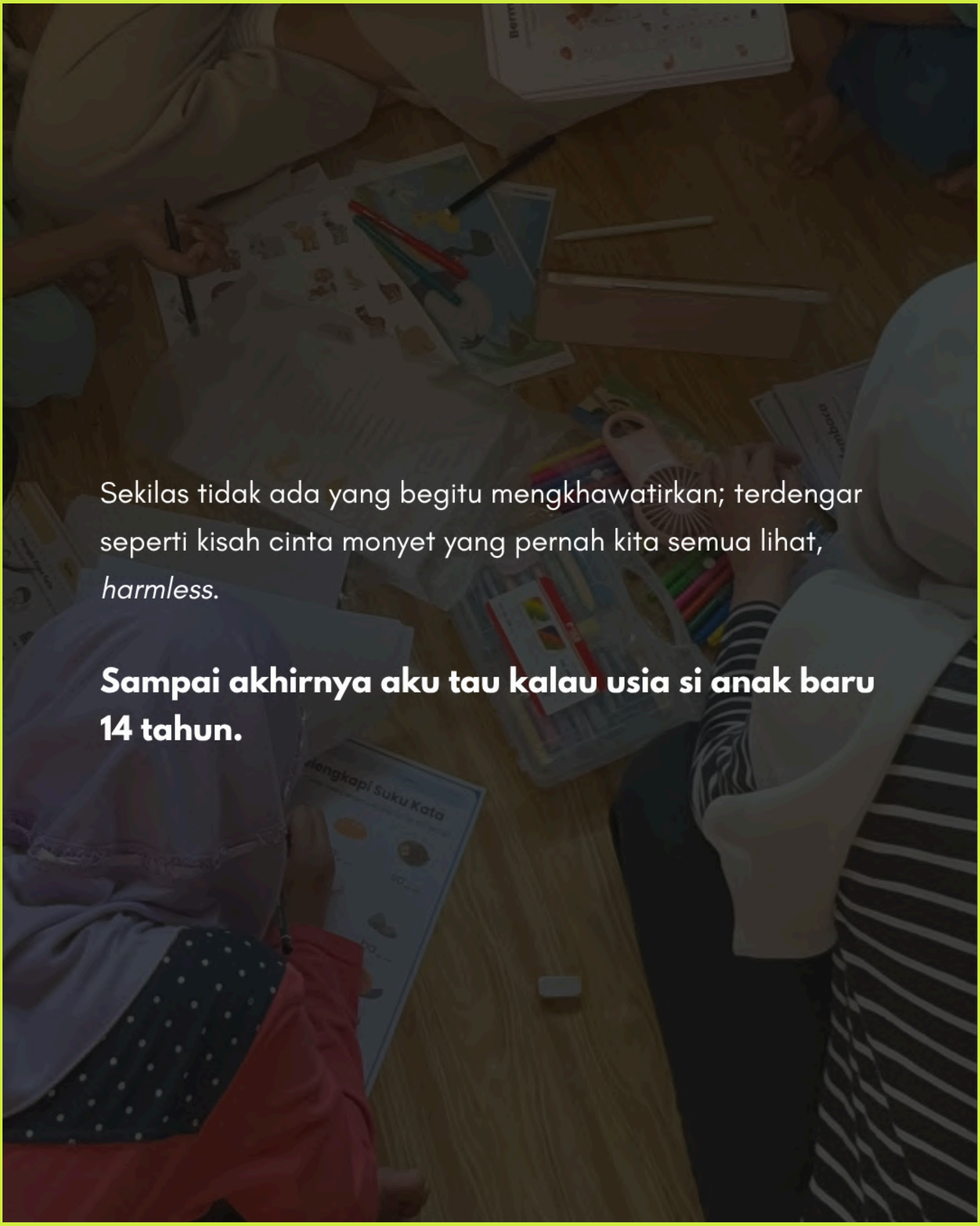


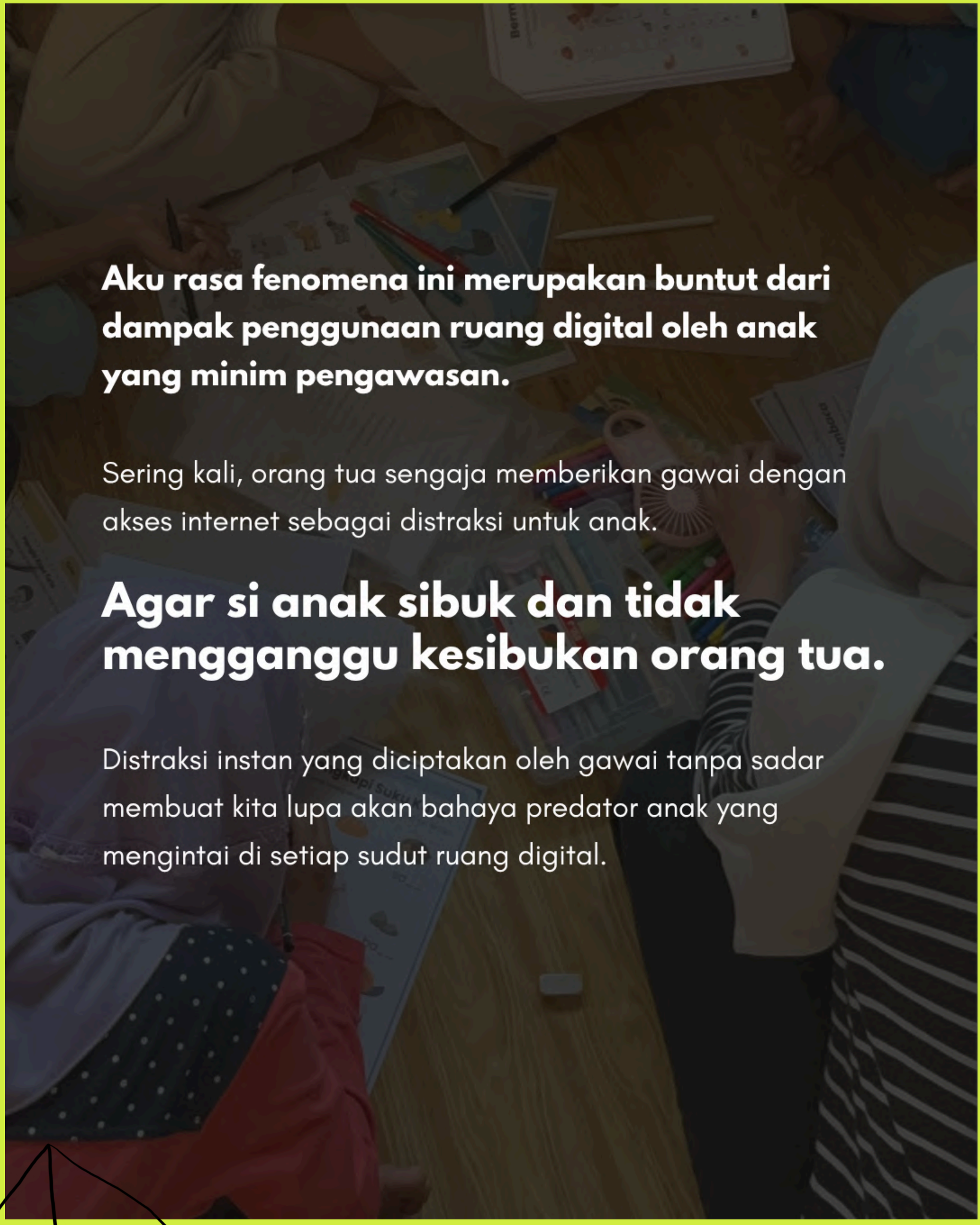
Oleh Nadiva Risa Azzahra

1/9


Mendengar hal itu, aku mengernyit bingung.
Si anak bilang, mereka bertemu di aplikasi game online, kemudian “pertemanan” mereka berlanjut hingga memutuskan untuk saling “berkomitmen”.
Komitmen yang janggal pikirku.
Lengkapi Suku Kata

2/9


Sekilas tidak ada yang begitu mengkhawatirkan; terdengar seperti kisah cinta monyet yang pernah kita semua lihat, *harmless*.
Sampai akhirnya aku tau kalau usia si anak baru 14 tahun.
3/9



Aku rasa fenomena ini merupakan buntut dari dampak penggunaan ruang digital oleh anak yang minim pengawasan.

Sering kali, orang tua sengaja memberikan gawai dengan akses internet sebagai distraksi untuk anak.

Agar si anak sibuk dan tidak mengganggu kesibukan orang tua.

Distraksi instan yang diciptakan oleh gawai tanpa sadar membuat kita lupa akan bahaya predator anak yang mengintai di setiap sudut ruang digital.



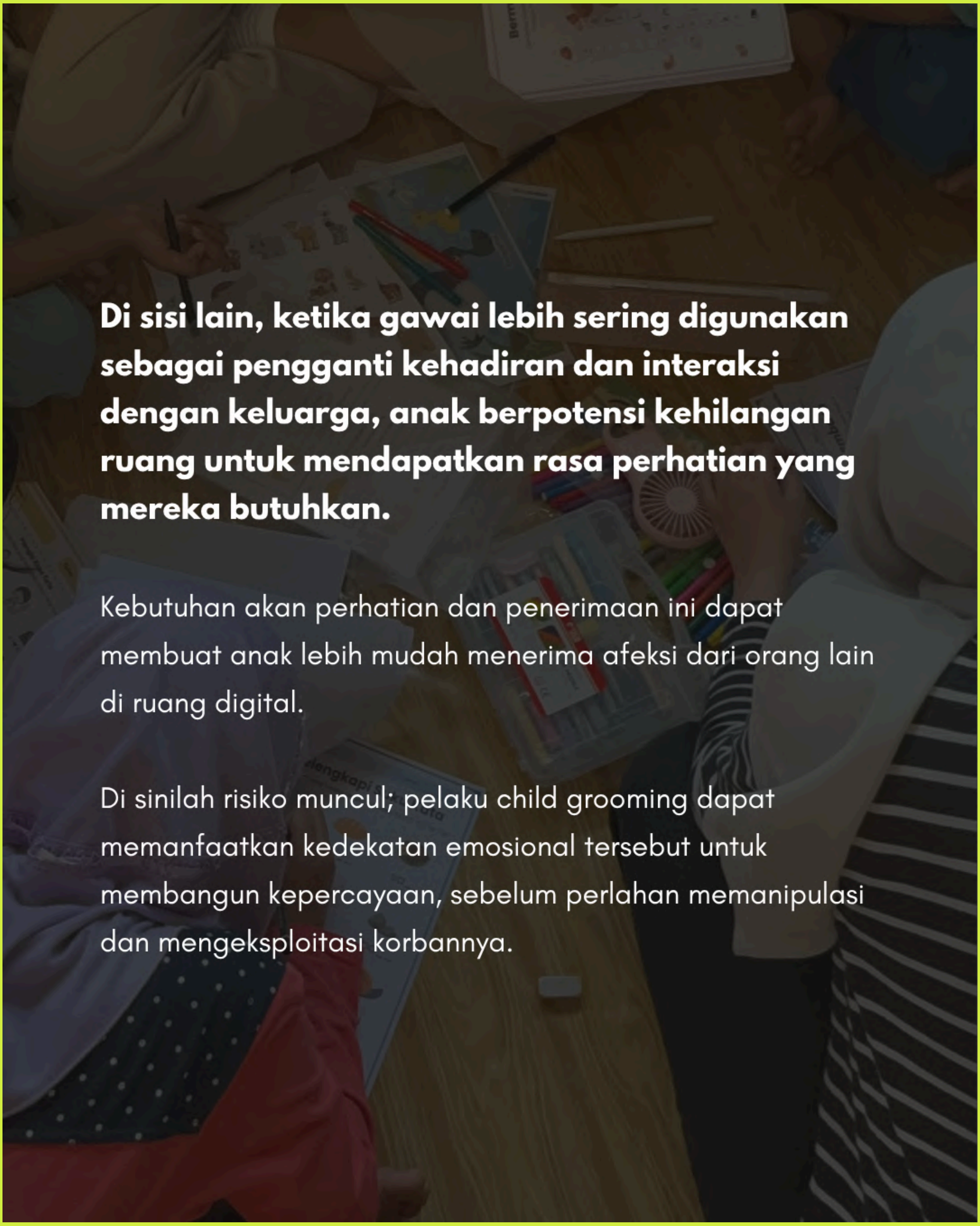
4/9



Menurut laporan Komdigi tahun 2024, ada 1.450.403 kasus seksual anak Indonesia di ruang digital.

Eksploitasi seksual anak juga bercabang ke-berbagai bentuk. Salah satunya, child grooming. Modus kriminal yang dilakukan oleh predator dengan memanipulasi emosi korban, mengemas niat jahat dalam balutan afeksi fana yang disebut “kasih sayang”.

5/9



Di sisi lain, ketika gawai lebih sering digunakan sebagai pengganti kehadiran dan interaksi dengan keluarga, anak berpotensi kehilangan ruang untuk mendapatkan rasa perhatian yang mereka butuhkan.

Kebutuhan akan perhatian dan penerimaan ini dapat membuat anak lebih mudah menerima afeksi dari orang lain di ruang digital.

Di sinilah risiko muncul; pelaku child grooming dapat memanfaatkan kedekatan emosional tersebut untuk membangun kepercayaan, sebelum perlahan memanipulasi dan mengeksploitasi korbannya.

6/9

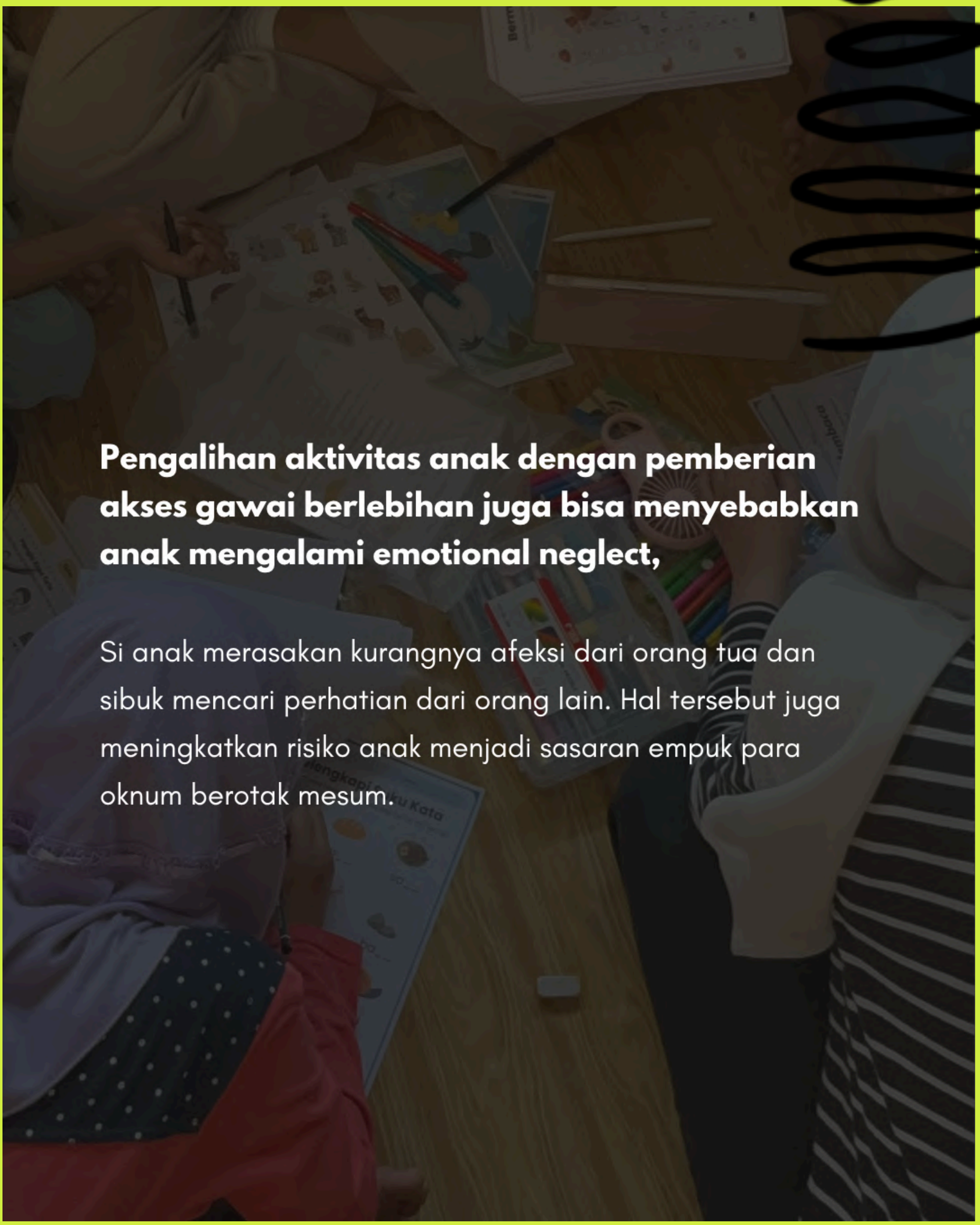




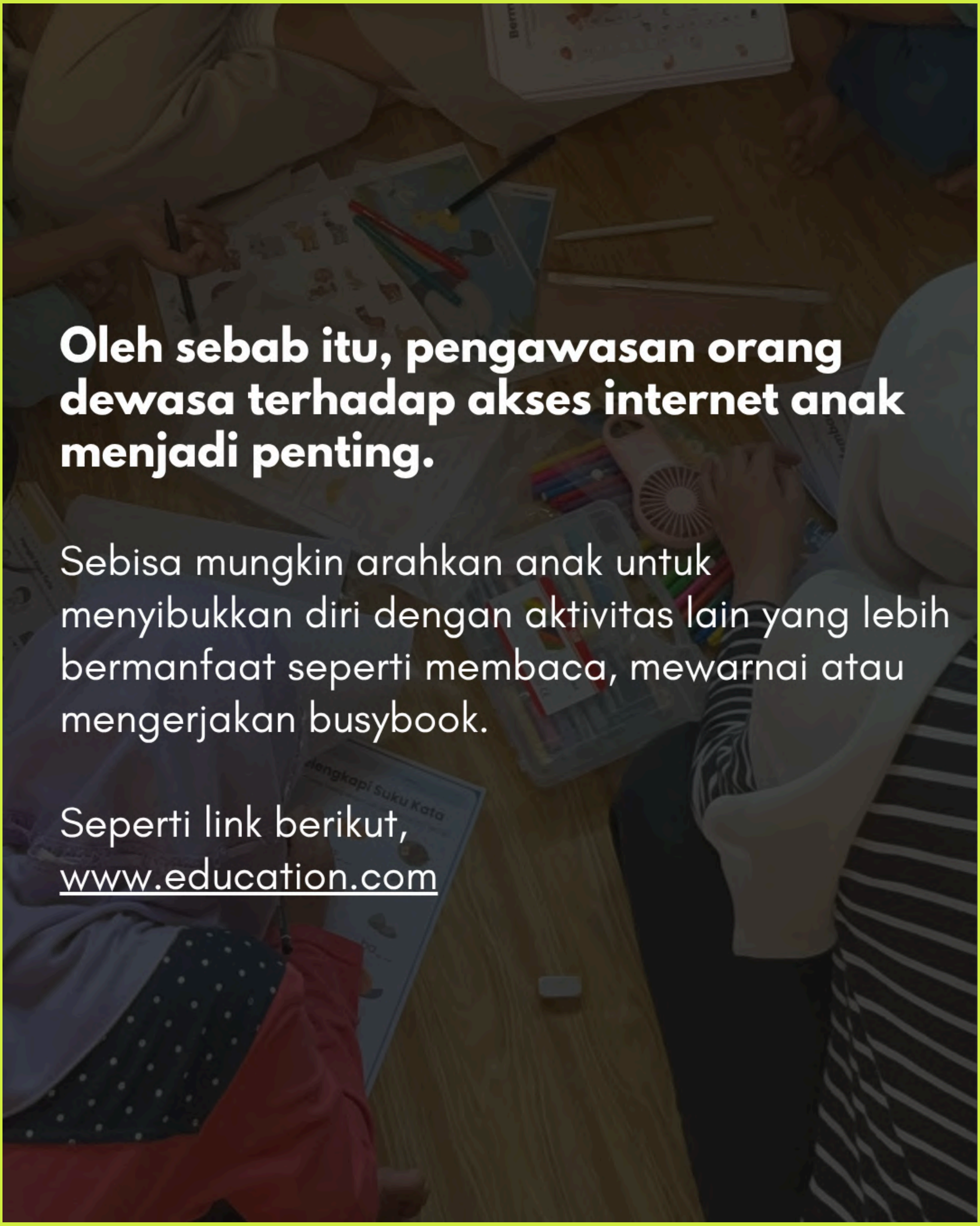
Oleh sebab itu, pengawasan orang dewasa terhadap aktivitas anak di ruang digital menjadi penting.

Bukan berarti anak harus sepenuhnya dijauhkan dari akses internet, tetapi mereka perlu didampingi untuk memahami siapa yang mereka temui, apa yang mereka lihat, dan kapan sebuah interaksi mulai terasa tidak aman.

7/9


Pengalihan aktivitas anak dengan pemberian akses gawai berlebihan juga bisa menyebabkan anak mengalami emotional neglect,
Si anak merasakan kurangnya afeksi dari orang tua dan sibuk mencari perhatian dari orang lain. Hal tersebut juga meningkatkan risiko anak menjadi sasaran empuk para oknum berotak mesum.

8/9


Oleh sebab itu, pengawasan orang dewasa terhadap akses internet anak menjadi penting.
Sebisa mungkin arahkan anak untuk menyibukkan diri dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti membaca, mewarnai atau mengerjakan busybook.
Seperti link berikut,
www.education.com

Refleksi Sebagai Peranakan Arab Indonesia

Oleh Rosyida Rahma

Saya tumbuh besar dengan ajakan untuk membiasakan diri bergaul dengan sesama anggota komunitas peranakan Arab, orang-orang yang tumbuh dengan nasib dan pengalaman hidup yang sama. Ajakan ini di satu sisi bertujuan menjaga solidaritas antar anggota komunitas. Orang tua saya, terutama, sangat menjaga saya sebagai anak perempuannya dalam mengenali siapa saja yang menjadi bagian dari lingkaran sosial saya.

Waktu kecil saya hanya bermain dengan lingkaran kecil saya, sebatas kerabat dekat. Saya jarang sekali bermain dengan teman sekolah atau teman satu kampung yang berbeda latar belakang. Tetapi hal tersebut mulai berbeda ketika saya beranjak remaja, saya mulai mengenal teman-teman yang berbeda bahkan menjadi dekat dengan saya, di usia inilah saya mulai memahami bagaimana teman-teman saya berpikir dan bertindak. Ternyata dunia jauh lebih luas dari yang saya kira.

Dan saya baru paham bahwa mengenal orang lain dari latar belakang sosial yang berbeda ternyata juga bagian dari cara kita merawat keseragaman itu sendiri, bukan mengancamnya. Saya butuh waktu untuk memahami bahwa setiap dari kita diciptakan untuk saling mengenal dengan perasaan setara. Keragaman yang ada bukan pesan tentang "kita" dan "mereka", melainkan tentang bagaimana keseragaman kita sendiri sesungguhnya adalah bagian dari keberagaman yang lebih besar.

Saya teringat pada sejarah peranakan Arab di Indonesia. Kisah ini bermula sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, ketika orang Arab mulai bermigrasi ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyiarkan Islam hingga akhirnya menikah dengan perempuan Nusantara. Keturunan dari hasil perkawinan tersebut, pada masa itu banyak berasimilasi dengan budaya Nusantara seperti memakai nama-nama yang membaur dengan unsur lokal, sehingga sulit dikenali bahkan sulit diidentifikasi.

Barulah menjelang abad ke-18 Masehi, gelombang migran Arab yang mayoritas dari Yaman, Hadramaut melakukan asimilasi yang jauh lebih minim. Mereka mempertahankan nama Arab dan marga pada setiap keturunannya, alih-alih membaur seperti generasi sebelumnya.

Menjelang masa kemerdekaan Indonesia, peranakan Arab di Indonesia mulai menyadari bahwa mereka perlu melebur dengan tanah Indonesia, sebab ibu mereka pun orang Indonesia. Di sisi lain, jika mereka kembali ke tanah asal nenek moyang, mereka juga tidak akan diakui, karena negara-negara Arab saat itu menganut asas ius soli yaitu kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahiran, bukan garis keturunan.

Abdul Rahman Baswedan, pencetus Sumpah Pemuda Keturunan Arab pada tahun 1934, mengucapkan ikrarnya yang berbunyi:

1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia.
2. Karena itu, mereka harus meninggalkan kehidupan yang mengisolasi diri.
3. Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Hal ini juga turut membuat Buya Hamka berpesan kepada Abdul Rahman Rasyid Baswedan bahwa — Arab Indonesia dibesarkan dengan gado-gado, bukan dengan mulukhia. Dengan durian, bukan dengan kurma. Dengan sejuknya hawa gunung, bukan dengan panasnya padang pasir. Mereka tidak tumbuh besar di pinggir Nil dan Eufrat, tapi di tepi Bengawan, Kapuas, dan Musi. Lebih gurih minyak sawit daripada minyak samin. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan selamat bagimu di masa tuamu adalah dengan menceburkan diri ke dalam bangsa ibumu. Tanah airmu adalah Indonesia.

Pada akhirnya saya belajar untuk terus membuka diri kepada mereka yang berbeda dengan saya. Jika sebelumnya saya bergaul dengan membawa sudut pandang bahwa komunitas saya adalah satu-satunya kelompok yang perlu saya dekati, maka kini saya perlu merasakan bagaimana teman-teman yang berbeda ini hidup dengan komunitas mereka seperti memijak tanah tempat mereka hidup. Yang baru saya sadari adalah selama ini saya tidak benar-benar mengenal mereka sebagaimana mereka memijak kehidupannya sendiri. Saya justru sibuk memandang mereka lewat sudut pandang saya dengan membuat cerita tentang siapa dan bagaimana mereka, tanpa benar-benar mendengarnya. Dan pada akhirnya, saya adalah peranakan Arab Indonesia yang hidup dan besar di bumi Indonesia, yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di tanah nenek moyang saya sendiri.

Tetapi bagaimanapun juga, budaya dan tradisi Arab tetap menjadi bagian dari diri saya dan komunitas saya. Menjadi peranakan Arab di Indonesia bukan soal mempermasalahkan perbedaan, atau mempertanyakan ke mana seharusnya kami "pulang". Sebab di dalam diri kami juga mengalir budaya dan tradisi Indonesia, terlebih keramah tamahannya. Dan justru dengan adanya Sumpah Pemuda Peranakan Arab Indonesia, secara langsung menyatakan bahwa kami adalah bagian dari Indonesia, yang akan terus memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

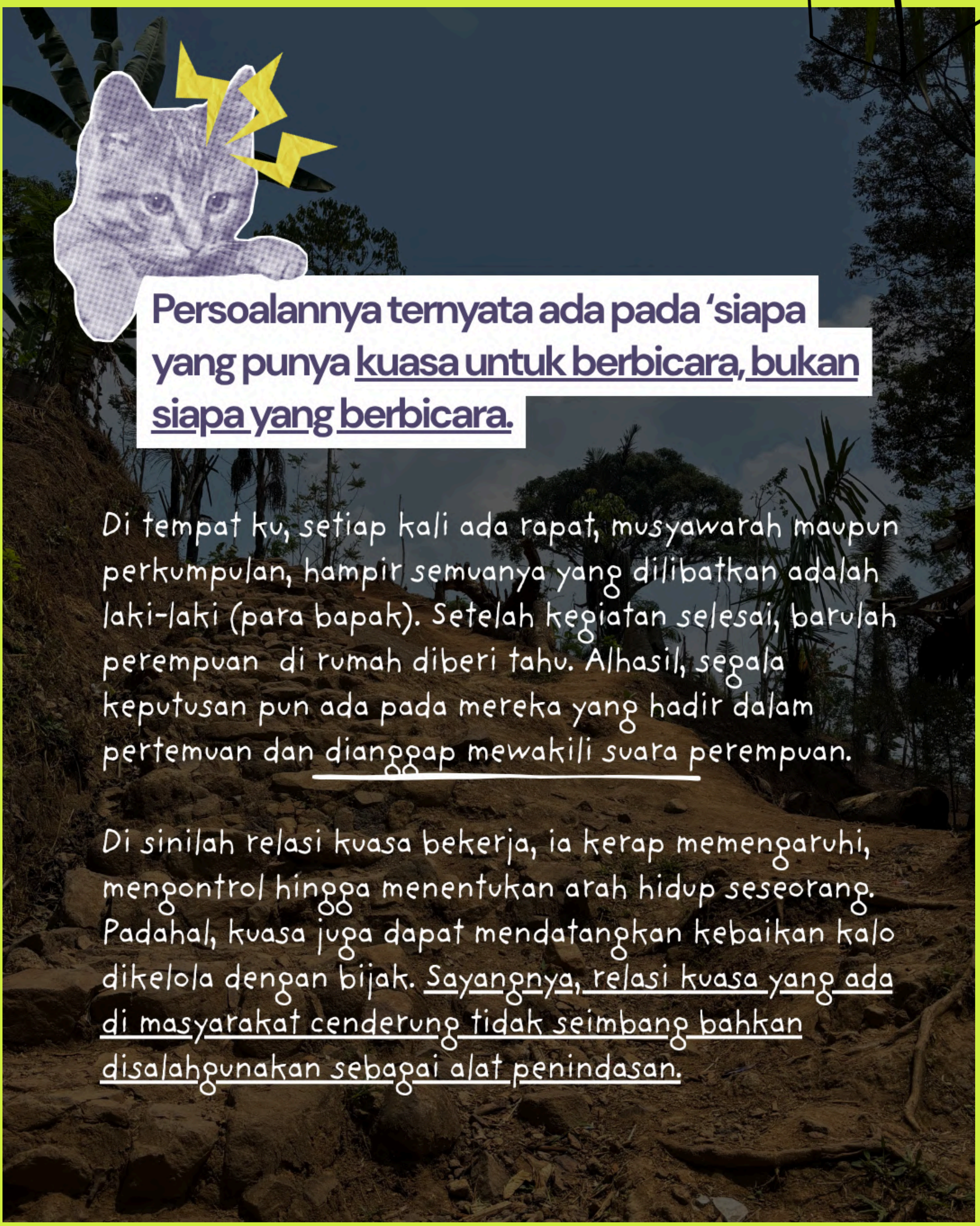


Oleh Tia Mega Utami

1/6


Dulu, aku pikir sah-sah aja kalau perempuan di desa enggan bersuara menyampaikan apa yang menjadi keresahannya.
Namun setelah mengalaminya sendiri, aku jadi paham kalau sebenarnya bukan perempuan ga bisa bersuara, melainkan ga selalu ada ruang untuk menyampaikannya.
Bahkan, ketika ada ruang dan keberanian, hal itu ga cukup untuk (suara kami perempuan) bisa sampai didengar.

2/6


Persoalannya ternyata ada pada ‘siapa yang punya kuasa untuk berbicara, bukan siapa yang berbicara.
Di tempat ku, setiap kali ada rapat, musyawarah maupun perkumpulan, hampir semuanya yang dilibatkan adalah laki-laki (para bapak). Setelah kegiatan selesai, barulah perempuan di rumah diberi tahu. Alhasil, segala keputusan pun ada pada mereka yang hadir dalam pertemuan dan dianggap mewakili suara perempuan.
Di sinilah relasi kuasa bekerja, ia kerap memengaruhi, mengontrol hingga menentukan arah hidup seseorang. Padahal, kuasa juga dapat mendatangkan kebaikan kalo dikelola dengan bijak. Sayangnya, relasi kuasa yang ada di masyarakat cenderung tidak seimbang bahkan disalahgunakan sebagai alat penindasan.

3/6

Selain itu, relasi kuasa juga mendapatkan legitimasi dari struktur sosial yang menempatkan posisi dan tanggung jawab perempuan tidak setara.

Nilai-nilai ini sekaan jadi pembenaran lewat institusi agama dan adat untuk melanggengkan peran perempuan, yang mana kalo melawan maka di cap "tidak baik" atau "tidak ideal".



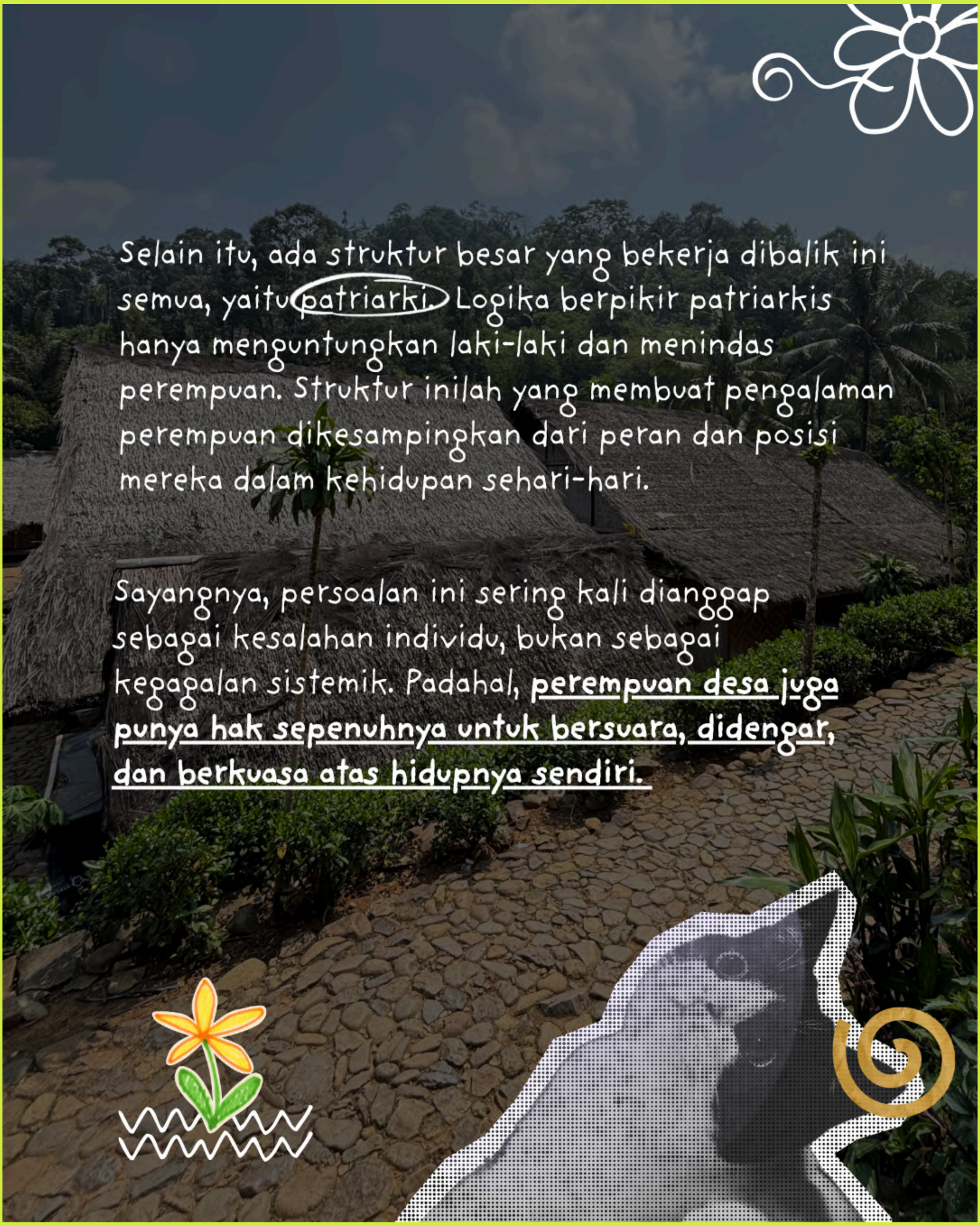


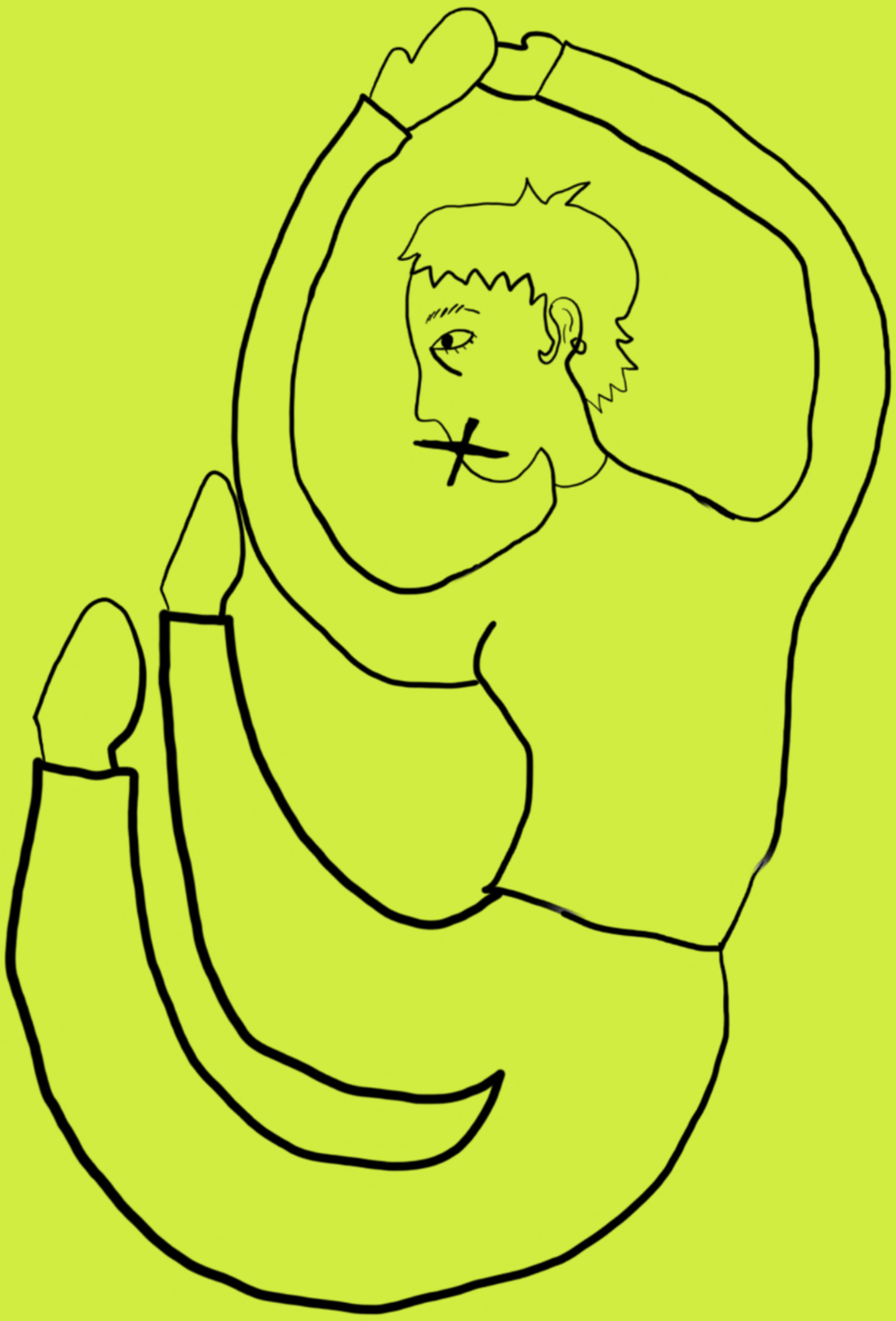


4/6


Dan lagi kita perlu berhenti meromantisasi kehidupan di desa sebagai sesuatu yang selalu "apa adanya", sederhana, atau harmonis.
Cara pandang seperti ini justru bikin kita lupa buat ngeliat lebih dalam kalau di komunitas desa juga ada relasi kuasa dan ketimpangan struktural.

5/6


Selain itu, ada struktur besar yang bekerja dibalik ini semua, yaitu patriarki. Logika berpikir patriarkis hanya menguntungkan laki-laki dan menindas perempuan. Struktur inilah yang membuat pengalaman perempuan dikesampingkan dari peran dan posisi mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Sayangnya, persoalan ini sering kali dianggap sebagai kesalahan individu, bukan sebagai kegagalan sistemik. Padahal, perempuan desa juga punya hak sepenuhnya untuk bersuara, didengar, dan berkuasa atas hidupnya sendiri.




JUNK JURNAL ZINE BY RA
TICKETS
Enjoy the Vibe, Enjoy the Games!
Yang sering dicari...
Quality
(uang)
PENDAPAT?
"aku bisanggap apa?"
care
ia mungkin hadir
atau mungkin tidak?
1 x Latte
Sale!
- Ice Leve
- Caffeine
- Swe tie
1 x Latte
Caffeine
Ice Level:
di mana kau berada?
APAKAH
kau berada pada sege-
les kopi dan minuman?
atau kau berada pad
hati dan/atau pikiran?
atau kau pernah
hadir dan menghilang?
di mana kau
berada? aku ingin menemukanmu
dalam ruang-ruang yang ada.
TERIMA KASIH SUDAH HADIR!!!
18:30
There are sooo many people
Love You!
Water
Smart Commuter Club
Low Carbon Vibe
Pedestrians First
aku & kita ingin nyaman
KOTA ASAL
KOTA TINGGAL HARI TUA
KARAKTER KOTA
Eksplor
ISI
DUNIA
by Ra, Yogyakarta, 16 September 202
Collective Care:
A Place We Share
Disusun dalam proses Laboratorium Demokrasi bersama Pamflet Generasi

Oleh Ra

1/7

Sinopsis

Junk journaling zine mengajak untuk mengubah benda-benda sisa dari keseharian menjadi ruang untuk menyimpan memori, mengolah pengalaman, dan menciptakan cerita dengan cara kita sendiri.

Usaha *self-care* yang individualistik agaknya tidak ampuh untuk merawat diri dalam kondisi dunia yang sangat kapitalistik sekarang. Padahal, ada begitu banyak hal, **seperti orang, ruang, makhluk hidup, lingkungan, bahkan hal-hal kecil yang kehadirannya kerap terabaikan**, tetapi turut menopang berjalannya "kehidupan".

Collective Care: A Place We Share adalah sebuah upaya untuk melihat kembali hal-hal tersebut dan bertanya: sebenarnya, apa yang menjadikan kita sejahtera secara bersama?

Mungkin *care* (merawat dan perawatan) bersemayam secara sederhana. Mungkin ia selalu di sana; hanya mata kita yang terlalu akrab dengan abai.



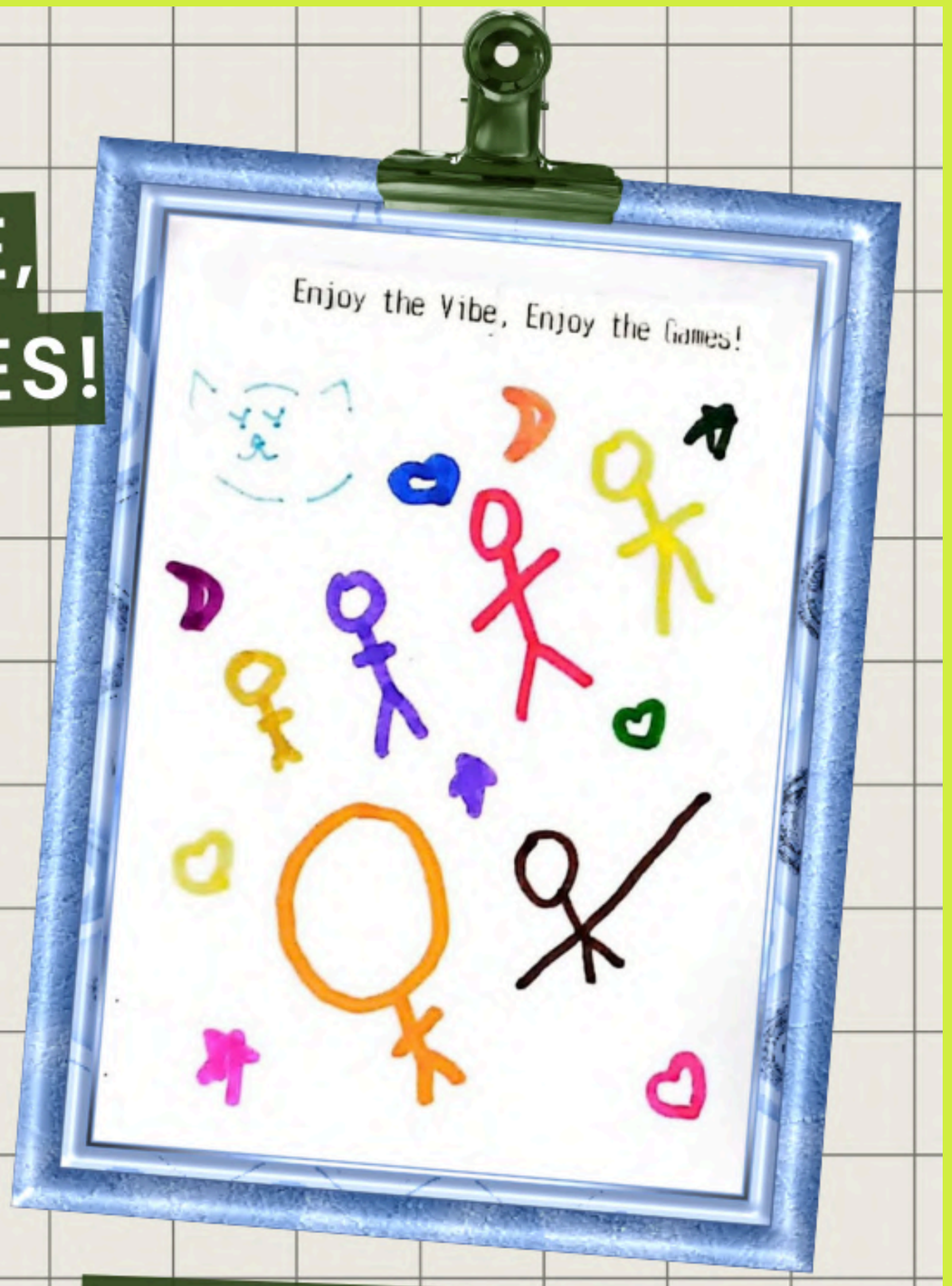




Bagaimana jika dunia tidak pernah hanya dihuni manusia? Barangkali, ada lebih banyak entitas yang eksis yang selama ini membuat "dunia" tetap berlangsung.

3/7

ENJOY THE VIBE, ENJOY THE GAMES!

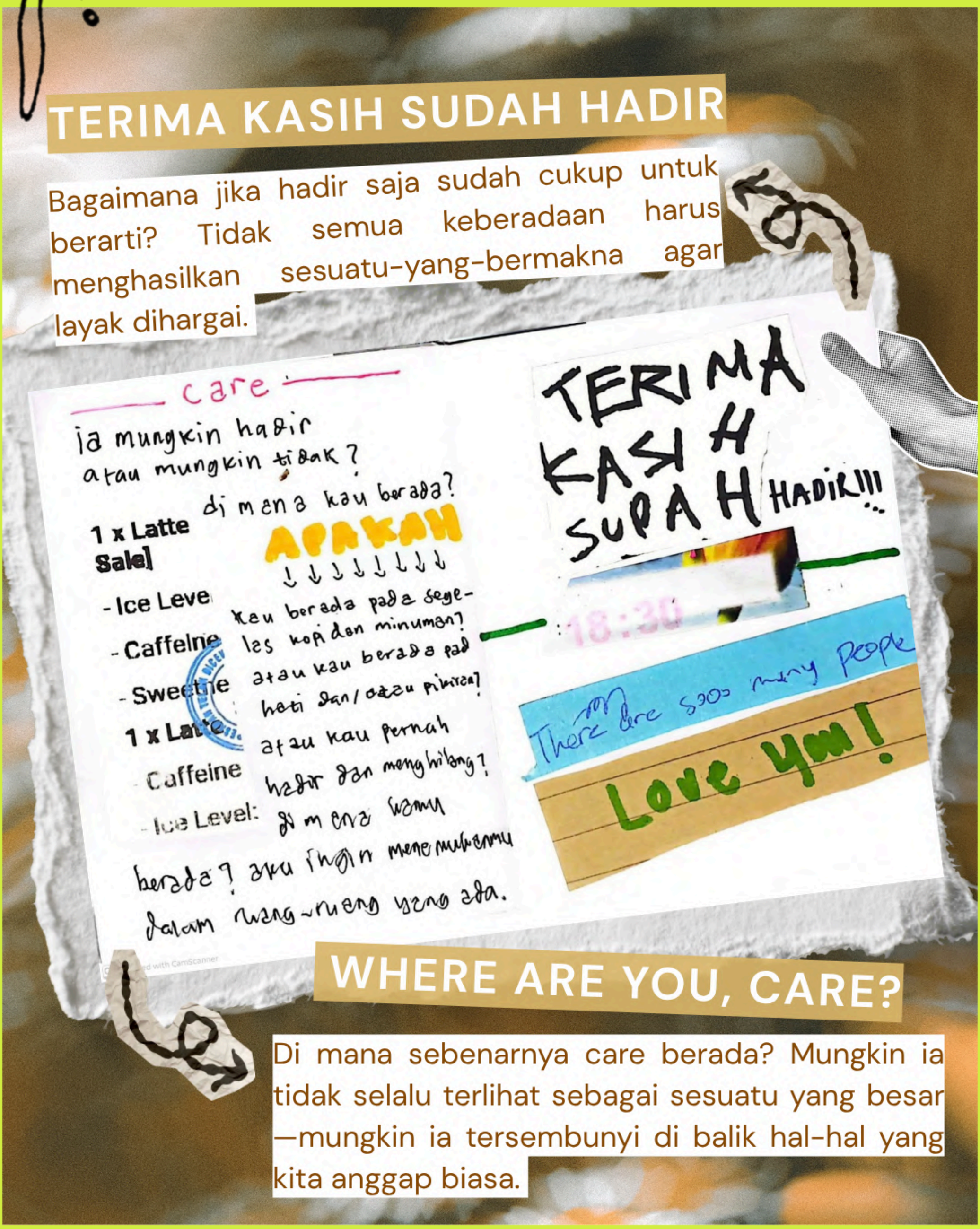


Merawat orang lain harus mengutamakan diri terlebih dahulu. 'Kan? Seberapa jauh kita bisa hadir untuk orang lain tanpa kehilangan batas kita sendiri?



WHAT KEEPS US GOING?

Kita sering bertanya apa yang ingin kita capai, tetapi jarang bertanya apa yang membuat kita mampu terus berjalan. Mungkin hidup tidak hanya ditopang oleh apa yang kita punya, tetapi juga oleh siapa dan apa yang merawatnya.


TERIMA KASIH SUDAH HADIR
Bagaimana jika hadir saja sudah cukup untuk berarti? Tidak semua keberadaan harus menghasilkan sesuatu-yang-bermakna agar layak dihargai.
care
ia mungkin hadir
atau mungkin tidak?
di mana kau berada?
1 x Latte
Sale]
- Ice Leve
- Caffelne
- Sweetne
1 x Latte
- Caffeine
- Ice Level:
APAKAH
kau berada pada sege-
las kopi dan minuman?
atau kau berada pad
hati dan/atau pikiran?
atau kau pernah
hadir dan menghilang?
di mana kamu
berada? aku ingin menemukanmu
dalam ruang-ruang yang ada.
TERIMA KASIH SUDAH HADIR!!!
18:30
There are soo many People
Love You!
WHERE ARE YOU, CARE?
Di mana sebenarnya care berada? Mungkin ia tidak selalu terlihat sebagai sesuatu yang besar—mungkin ia tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap biasa.

5/7

THE CITY WE WANT

Tempat adalah bagian dari ruang yang seharusnya bisa membuat penghuninya merasa aman di dalamnya.



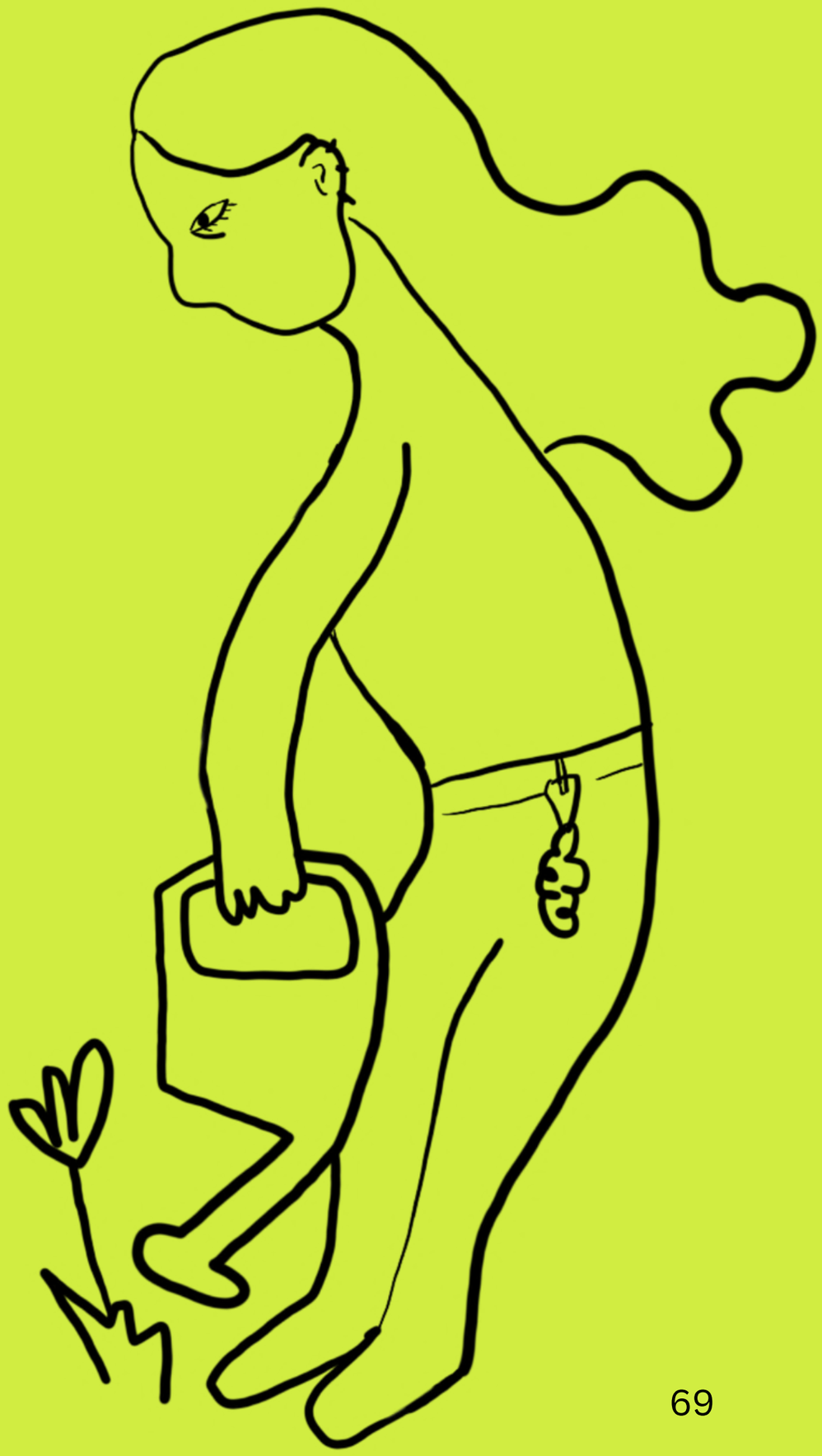
SOMEWHERE WITHOUT AN OPPRESSOR AND/OR AN OPRESSION

Di mana penindas masih ada, dapatkah tempat dan ruang masih bisa menjadi nyaman?.

6/7


by rea, Yogyakarta, 14 September
Eksplor
ISI
DUNIA
EXPLORE, CONNECT, CARE
Mungkin tidak ada akhir dari pertanyaan tentang bagaimana kita hidup bersama. Jadi, mari terus menjelajah, terhubung, dan melihat kembali apa yang selama ini ada di sekitar kita.

7/7



Di Bawah Asap dan Asa yang Sama, Kami Berdiri Tanpa Bendera Terpisah

Oleh Andhika

Aku masih ingat betul momen itu. Asap putih yang mulai mengepung, mata yang perih, suara teriakan bersahutan dari berbagai arah. Tapi yang paling membekas bukan asapnya, melainkan apa yang tetap berdiri di tengahnya. Ini adalah momen saat aku di bawah jembatan layang di Makassar. Tempat kami melebur menjadi satu.

Bendera-bendera itu. Warnanya berbeda, lambangnya berbeda, dan aku tahu betul organisasi-organisasi di baliknya sering punya isu yang berbeda dan cara pandang gerakan yang tidak selalu sejalan. Di hari-hari biasa, mereka bisa berdebat soal metode, soal prioritas, bahkan soal siapa yang paling “murni” perjuangannya. Tapi hari itu, yang memanggil kami turun samasatu tuntutan yang dirasa cukup mendesak hingga semua kelompok memilih turun bersama, terlepas dari perbedaan yang biasanya memisahkan mereka.



Sumber: Dokumentasi pribadi

Dalam kepungan asap yang sama, semua sekat itu lenyap. Mereka berdiri berdampingan. Tidak ada yang mundur duluan, tidak ada yang mengklaim tempat paling depan untuk dirinya sendiri. Ada yang berbagi botol air dan kain basah tanpa saling bertanya dari almamater mana. Solidaritas semacam itu tidak pernah tertulis dalam AD/ART organisasi mana pun. Tapi ini lahir begitu saja, dari kesadaran bahwa yang diperjuangkan lebih besar dari nama lembaga masing-masing.

Di sinilah poin yang ingin kubagikan. solidaritas sejati bukan diukur dari seberapa sering kelompok-kelompok itu sepakat, tapi dari identitas bersama apa yang mereka sepakat perjuangkan bersama.

Sebagai mahasiswa psikologi, aku membaca ini lewat satu prinsip sederhana. Identitas kolektif justru menguat saat sebuah kelompok menghadapi ancaman bersama. Bukan karena tiba-tiba semua orang sepakat soal segalanya, tapi karena tekanan itu menggeser fokus dari “siapa kita masing-masing” menjadi “apa yang sedang kita hadapi bersama”. Dan aku tidak membacanya dari jurnal atau slide kuliah, aku melihatnya langsung, di tengah jalan yang penuh asap itu.

Selama ini solidaritas terlalu sering direduksi jadi kata-kata di spanduk. Gampang diucapkan, gampang ditulis besar-besar dengan cat semprot, tapi belum tentu benar-benar hidup. Hari itu aku menyaksikan versi lain darinya, versi yang tidak butuh jargon, karena justru muncul di saat paling sulit untuk berpura-pura. Ketika gas air mata membuat semua orang sama-sama terbatuk, sama-sama menutup wajah, tidak ada lagi ruang untuk membedakan siapa dari organisasi mana.

Maka foto bendera-bendera berdiri sejajar itu bukan sekadar dokumentasi momen. Tapi menjadi bukti bahwa solidaritas lintas organisasi itu nyata dan bukan karena semua orang di baliknya berpikir sama, tapi karena mereka memilih berdiri di titik yang sama, saat berdiri di sana adalah pilihan paling berisiko untuk diambil sendirian.

Solidaritas semacam ini tidak boleh hanya lahir di tengah kepungan asap. Tapi harus dirawat jauh lewat forum lintas organisasi yang terus terbuka, lewat kesediaan mendengar isu kawan dari lembaga lain meski bukan agenda kita sendiri, lewat keberanian turun untuk perjuangan yang bukan milik kelompok kita saja. Karena pada akhirnya, yang menentukan seberapa kuat kita berdiri bukan seberapa banyak bendera yang berkibar sendiri-sendiri, melainkan seberapa siap kita berdiri berdampingan sebelum diminta.



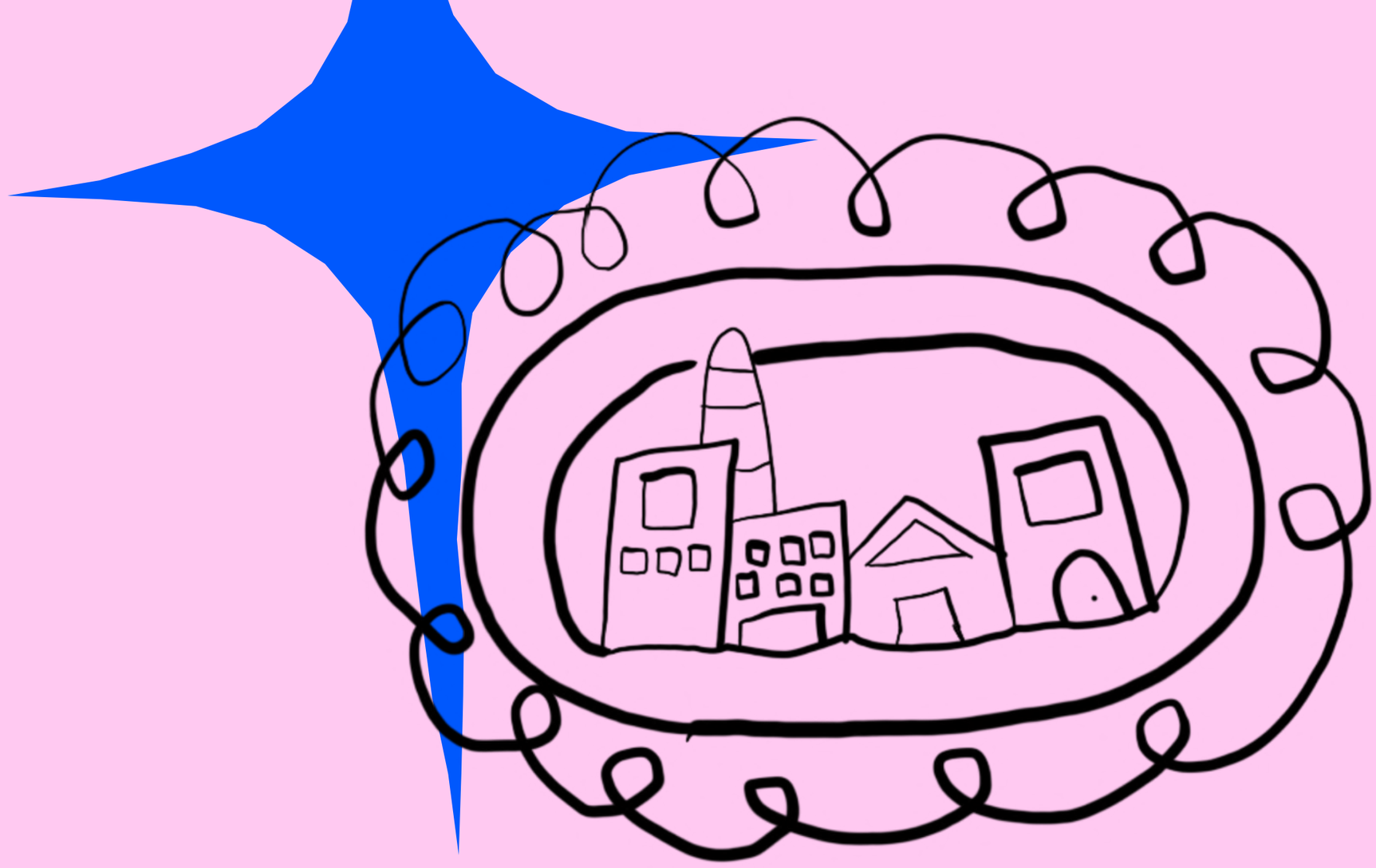
Praktik demokrasi sehari-hari di asrama?

Oleh Muh. Wahyu





Dalam video singkat ini, kamu akan diajak mendengarkan observasi Muh. Wahyu tentang bagaimana demokrasi dipraktikkan dalam kehidupannya di asrama, sebelum diajak mempertanyakan bagaimana demokrasi kemudian menjadi ajang lima tahun sekali di skala negara. Tonton di sini.



Melihat ruang negaraku

Demokrasi Sehari-hari dan Kebakaran Hutan di Maluku Utara: Suara Yang Jarang Didengar

@chelstudy28

Oleh Michelin Sallata

1/8

Dipublikasi bersama **POMANARA Youth Frontliners for Collective Actions**

Api di Kebun
Tetangga, Urusan
Siapa?

Minimnya pengetahuan
mitigasi kebakaran hutan
di Maluku Utara adalah
soal **demokrasi**, bukan
hanya soal bencana.

@chelstudy28

2/8

Di banyak desa, membuka lahan dengan membakar masih dianggap cara paling cepat dan murah. Sementara itu, informasi tentang titik api, cuaca ekstrem, dan cara menghadapinya jarang sampai ke warga dalam bahasa yang mudah dipahami. Ketika kemarau panjang tiba, kebun, semak, dan hutan di sekitar permukiman menjadi sangat mudah terbakar, dan warga sering baru bertindak setelah api sudah membesar.

Minimnya pengetahuan membuat risiko kecil berubah menjadi bencana.



@chelstudy28

3/8

Bukan Karena Warga **Abai**, Tapi Karena
Informasinya Tidak Sampai

Sosialisasi mitigasi sering berhenti di kantor dan jarang menjangkau dusun atau kebun. Peringatan dini tentang cuaca dan titik panas pun jarang diterjemahkan ke dalam bahasa dan konteks lokal. Di sisi lain, pengetahuan tradisional tentang musim, arah angin, dan pengelolaan lahan tidak pernah dicatat dan hampir tidak dilibatkan dalam kebijakan.

Kondisi wilayah kepulauan membuat akses informasi dan bantuan semakin sulit. Jadi torang hanya selalu bilang **"Itu api bajalang"**
Ketimpangan informasi adalah ketimpangan hak.

@chelstudy28

4/8

Demokrasi adalah hak untuk tahu dan ikut memutuskan.

Demokrasi sehari-hari tidak berhenti di bilik suara. Ia hadir ketika warga berhak mengetahui risiko bencana di wilayahnya sendiri, ketika musyawarah desa membahas aturan membuka lahan dan bukan hanya pembangunan fisik, dan ketika perempuan, petani, nelayan, serta pemuda dilibatkan dalam rencana penanggulangan bencana. Demokrasi juga berarti keputusan tentang tanah dan hutan tidak diambil secara sepihak.

Torang yang paham risiko bisa ikut memutuskan. Warga yang tidak tahu hanya bisa menerima akibatnya.

@chelstudy28

5/8

Kebakaran Hutan Adalah Wajah Lokal dari Krisis Iklim

Kemarau yang makin tidak menentu membuat lahan lebih kering dan mudah terbakar. Kebakaran kemudian melepaskan karbon ke udara dan merusak hutan yang selama ini menyimpan air serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dampaknya terasa langsung bagi warga: kebun pala dan kelapa rusak, udara tercemar, sumber air terganggu, dan mata pencaharian ikut terancam.

Krisis iklim tidak hanya bacarita di konferensi internasional. Ia terjadi di torang pe kebun sendiri.

@chelstudy28

6/8

Pengetahuan Berbasis Komunitas Adalah Garis Pertahanan Pertama

Komunitas yang berpengetahuan bisa menyusun peta rawan api bersama berdasarkan pengalaman warga sendiri. Mereka dapat menyepakati aturan pembukaan lahan, mulai dari waktu yang aman, sekat bakar, hingga pengawasan bersama. Mereka juga bisa membentuk kelompok siaga api yang dilatih dan dikoordinasikan dengan pemerintah desa, sambil mencatat dan menghidupkan kembali pengetahuan lokal tentang musim dan pengelolaan lahan.

Torang bukan sekadar korban, tetapi pelaku utama mitigasi.



@chelstudy28







7/8

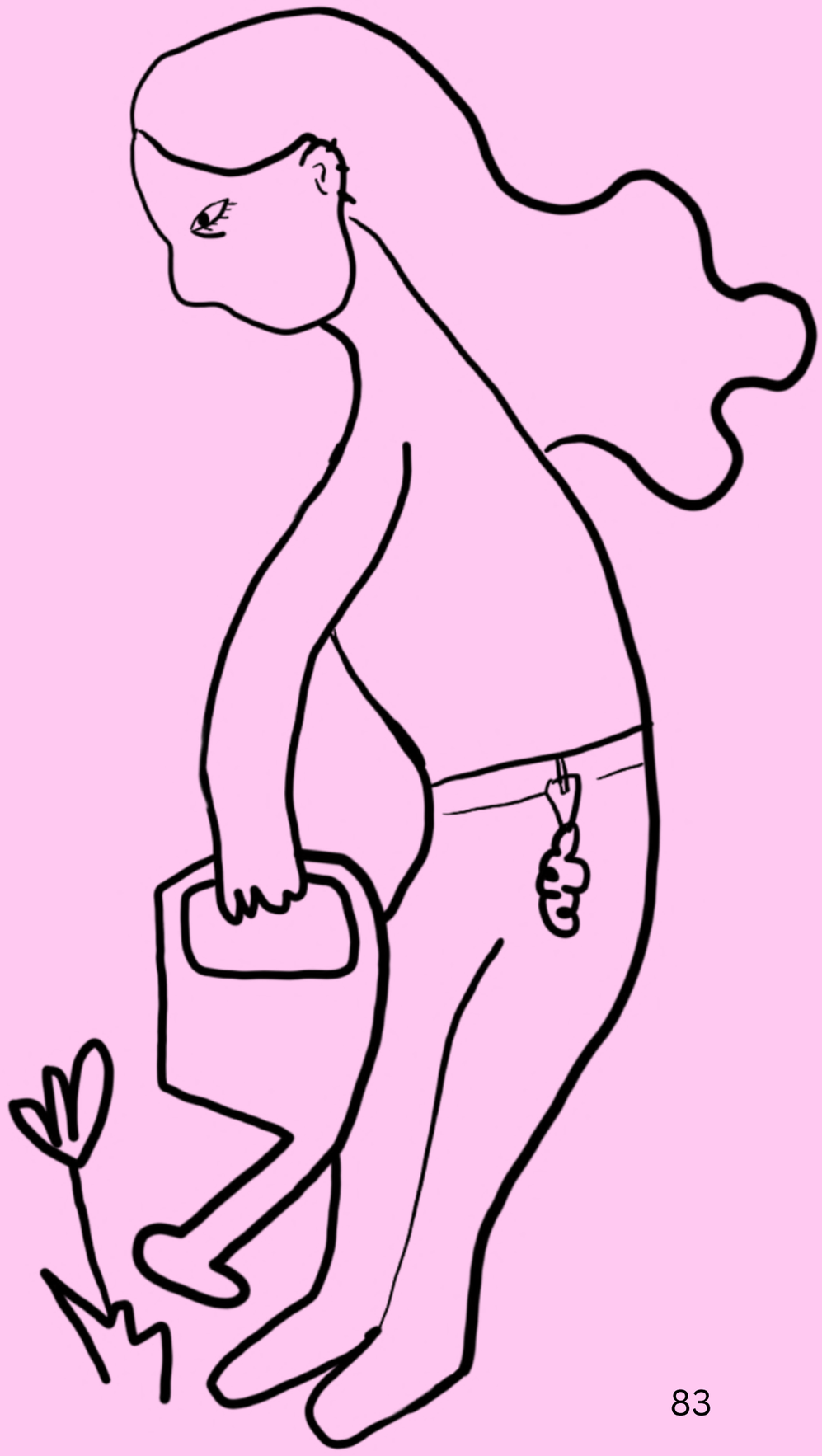
Mulai dari Bacarita di Kampung.

Langkah pertama bisa sesederhana bertanya di forum desa: adakah rencana pencegahan kebakaran di kampung kita? Setelah itu, bagikan informasi peringatan dini cuaca dan titik panas lewat grup warga, pengajian, atau kegiatan gereja. Libatkan perempuan, pemuda, dan tetua adat dalam diskusi mitigasi, lalu dorong pemerintah desa dan BPBD agar memasukkan edukasi kebakaran ke dalam program rutin.

Terakhir, bagikan carousel ini kepada siapa pun yang punya kebun atau tinggal dekat hutan.
Mencegah api dimulai dari bertanya, berbagi, dan bermusyawarah

@chelstudy28

8/8



INLEGAS

POLITIK PATRONASE DAN MERITOKRASI SEREMONIAL



Image source: Canva

Budaya Loyalitas yang Mengesampingkan Rekam Jejak

inlegas.id inlegas.id inlegas.id inlegas.id

Oleh Tria Noviantika

1/16

Dipublikasi bersama **Institute for Legal Reform and Gender Justice**



Nyatanya, **praktik budaya patronase dan meritokrasi seremonial bukan** merupakan **hal baru dalam politik Indonesia.** Kecenderungan ini **berulang** di setiap transisi kekuasaan

2/16

INLEGAS

Setiap kali ada pelantikan pejabat baru, narasi yang digaungkan hampir selalu sama: "berbasis kompetensi", "meritokrasi", "profesional".

Presiden Prabowo Subianto sendiri kerap menegaskan komitmennya untuk mencopot pejabat yang tidak berkinerja baik dan melibatkan akademisi/ahli di posisi-posisi strategis. Di atas kertas, ini terdengar seperti janji reformasi birokrasi yang serius.

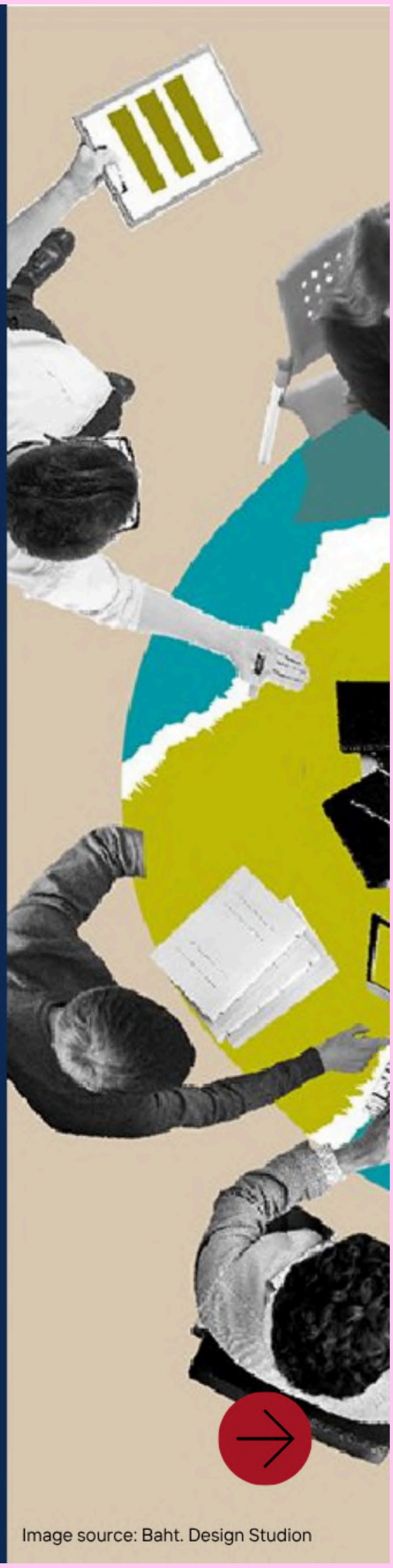
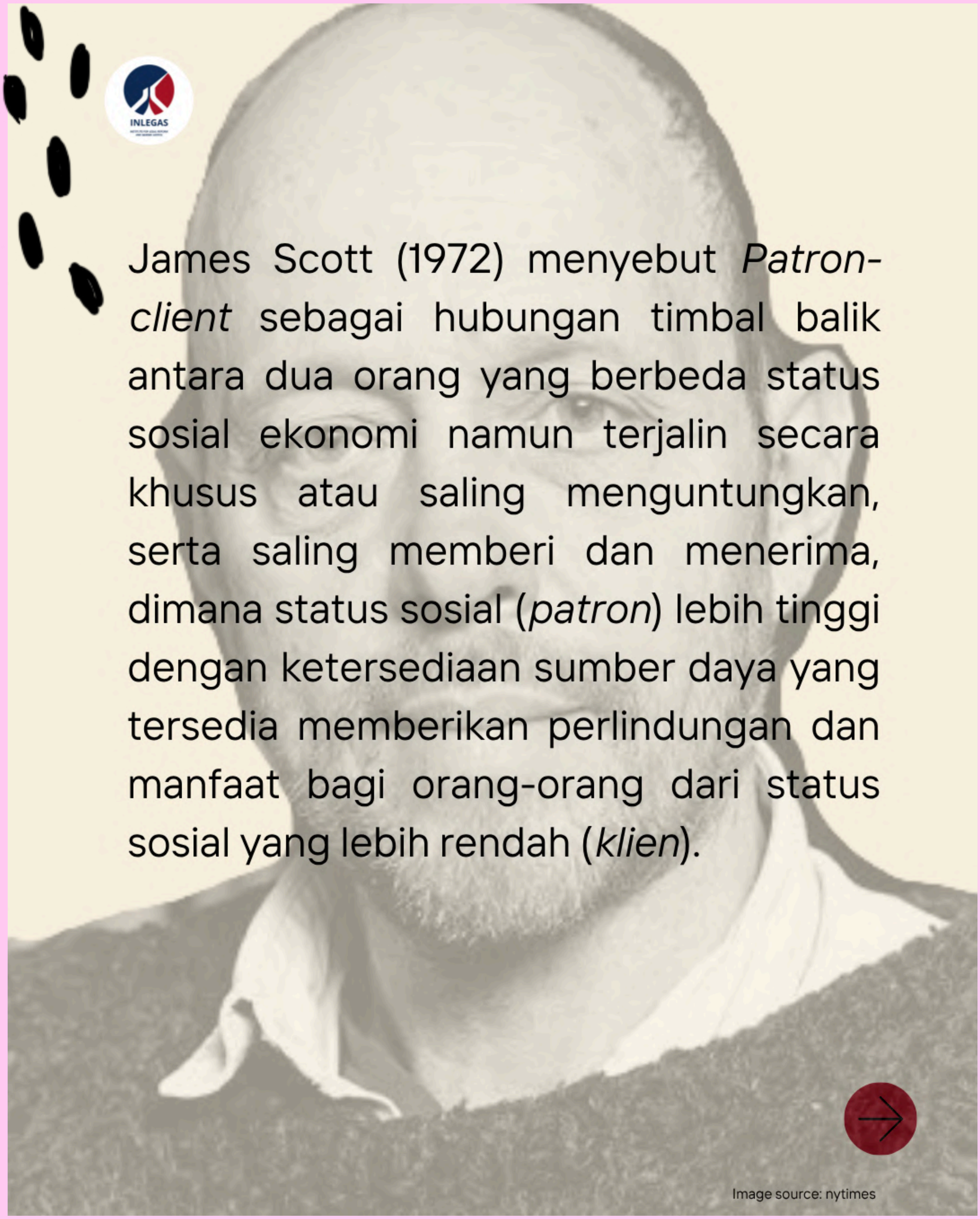


Image source: Baht. Design Studion

3/16


INLEGAS
James Scott (1972) menyebut *Patron-client* sebagai hubungan timbal balik antara dua orang yang berbeda status sosial ekonomi namun terjalin secara khusus atau saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima, dimana status sosial (*patron*) lebih tinggi dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia memberikan perlindungan dan manfaat bagi orang-orang dari status sosial yang lebih rendah (*klien*).
Image source: nytimes

4/16

(Aspinall, E. 2013) Kecenderungan Pola *Patronase* seringkali terlihat dalam pengisian jabatan publik, diantaranya:

1. Komposisi kabinet dan lembaga strategis yang tetap menyisakan "jatah" untuk partai-partai koalisi, kelompok pengusaha, maupun tim sukses, terlepas dari kapasitas teknis di bidang yang diampu.
2. Penempatan figur publik ke posisi-posisi pemerintahan yang menuai perdebatan soal relevansi kompetensi dengan tugas yang diemban.
3. Mutasi dan *reshuffle* yang mencerminkan kalkulasi politik jangka pendek dalam rangka menjaga soliditas koalisi dan meredam gesekan internal dibandingkan evaluasi kinerja yang terukur dan transparan.



5/16

Dititik inilah kita perlu berhenti sejenak, kita perlu lebih banyak menelusuri rekam jejak kepemimpinan sebelumnya, bahwa persoalannya bukan sekadar *patronisme* masih ada.

Pertanyaan yang lebih mendasar, sejauh mana ia hadir dalam demokrasi kita sebelumnya?



Image source: Rachel Royce

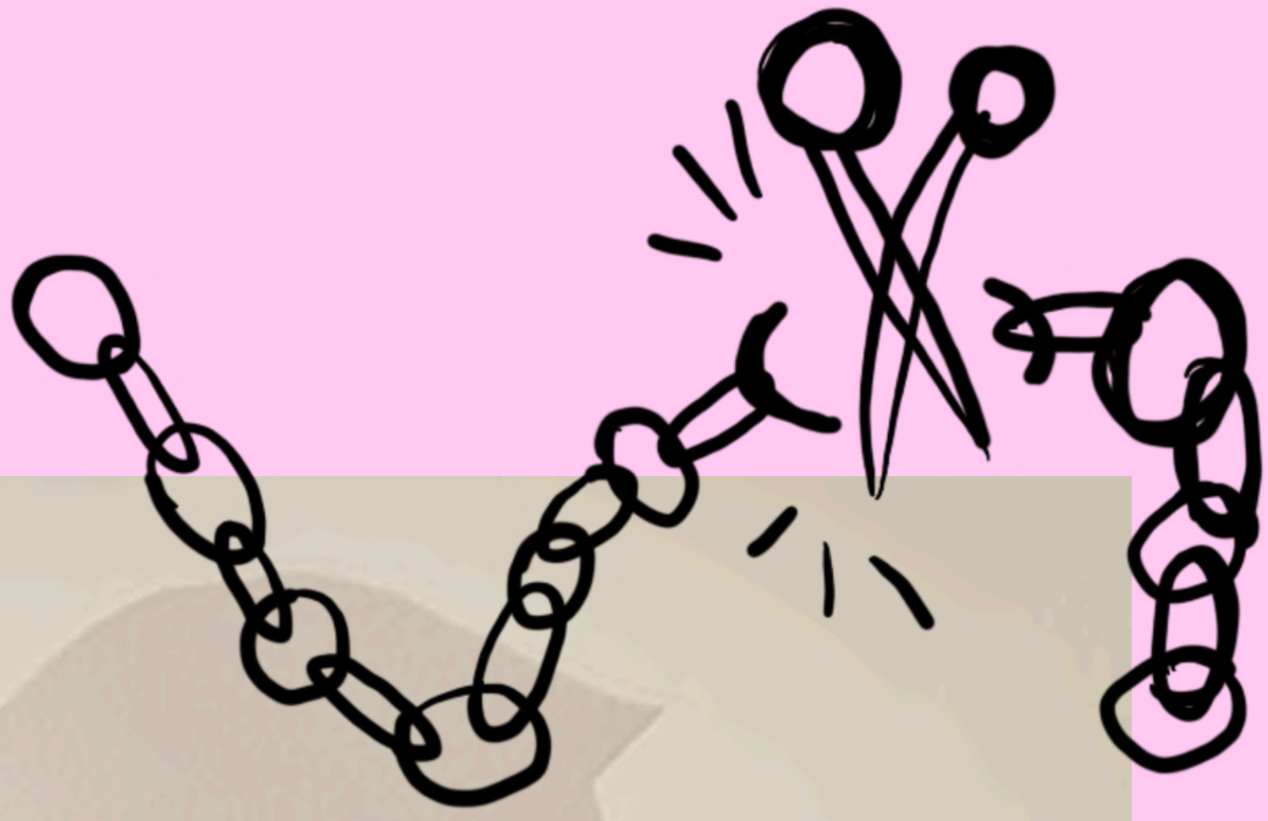
6/16

Relevan menilai pola dan situasi ini dengan mengutip hasil penelitian Seta Basri (2026) yang membandingkan Praktik *Patron-Klien* Presiden Joko Widodo (Periode II) yang cenderung teknokratis dan terinstitusionalisasi sementara Presiden Prabowo Subianto cenderung pada distribusi jabatan, loyalitas personal dan mobilisasi tokoh agama. Artinya bahwa kecenderungan budaya *patronase* seringkali berulang di setiap transisi kekuasaan namun dengan pola variatif.



Image source: Tempo

7/16



INLEGAS

Selama sistem penunjukan pejabat publik masih bergantung pada **"restu politik"** dibandingkan mekanisme seleksi terbuka dan terverifikasi, ***patronase* akan terus menjadi jalur pintas menuju kekuasaan**. Ironisnya, hal demikian dibalut dengan meritokrasi seremonial agar terlihat *legal*.

8/16

MERITOKRASI SEREMONIAL

Disebut oleh Sik Sumaedi (Profesor Riset Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN) sebagai sebuah proses pengisian jabatan birokrasi dapat terlihat meritokratis: ada persyaratan, ada seleksi, ada penilaian, ada panitia seleksi, dan prosedur yang dilalui. Namun, keputusan akhir dipengaruhi oleh koneksi politik, kepentingan pribadi, atau hubungan patronase sehingga prosedur meritokratis tidak menghasilkan keputusan yang meritokratis.

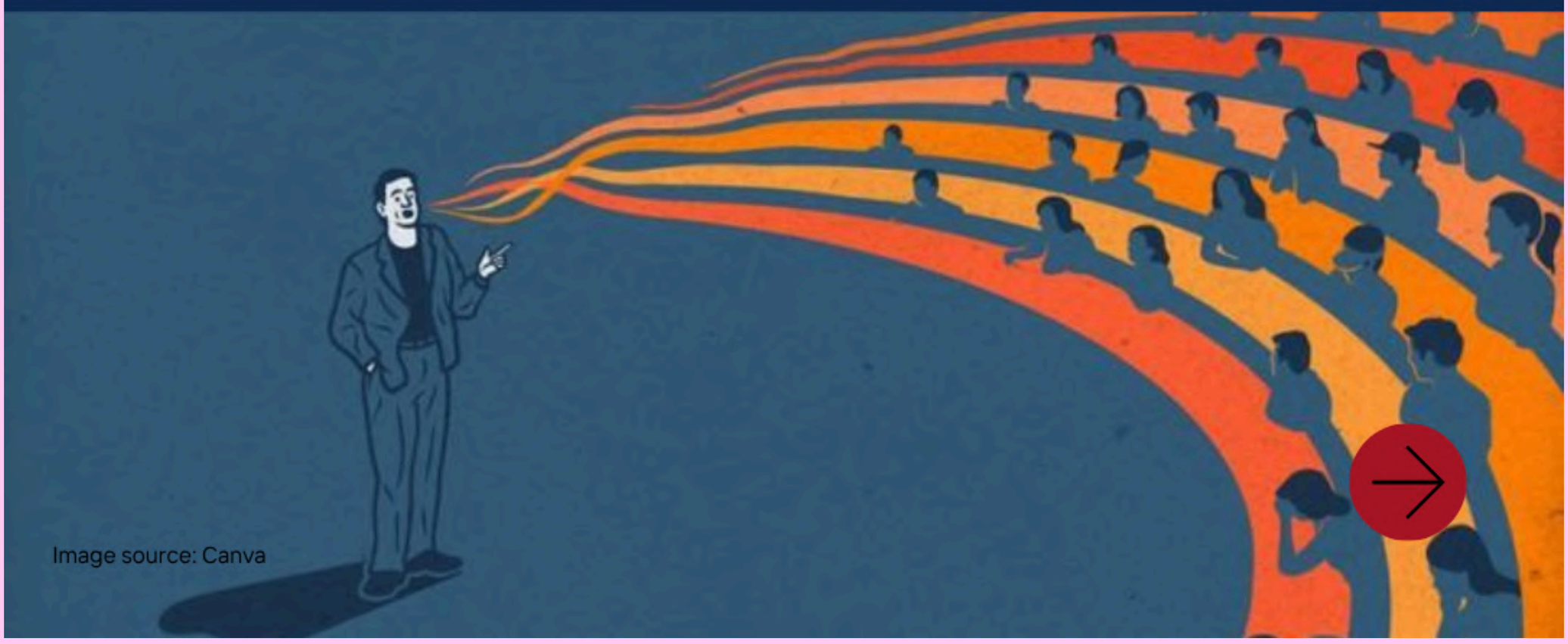


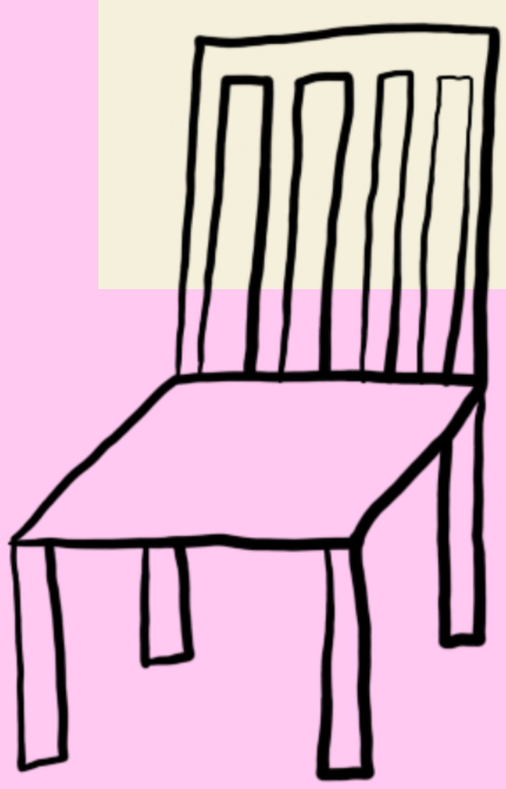
Image source: Canva

9/16

Zhiwei, W. (2026) menyebutkan beberapa kecenderungan pola:

1. **Seleksi yang prosedural, tapi tidak substansial.** F*it and proper test* tetap digelar, namun kandidat yang "menang" telah memiliki jaringan atau restu sebelum proses dimulai.
2. **Narasi kompetensi sebagai alat legitimasi, bukan alat ukur sesungguhnya.** Ketika publik mempertanyakan sebuah penunjukan, jawaban yang muncul biasanya menegaskan "yang bersangkutan kompeten di bidangnya" tanpa transparansi soal kriteria pembanding atau kandidat lain yang dipertimbangkan.
3. **Klaim pelibatan pakar dan akademisi di posisi strategis.** Namun, apakah keahlian mereka benar-benar menentukan arah kebijakan, atau sekadar menambah kredibilitas simbolik pemerintahan?

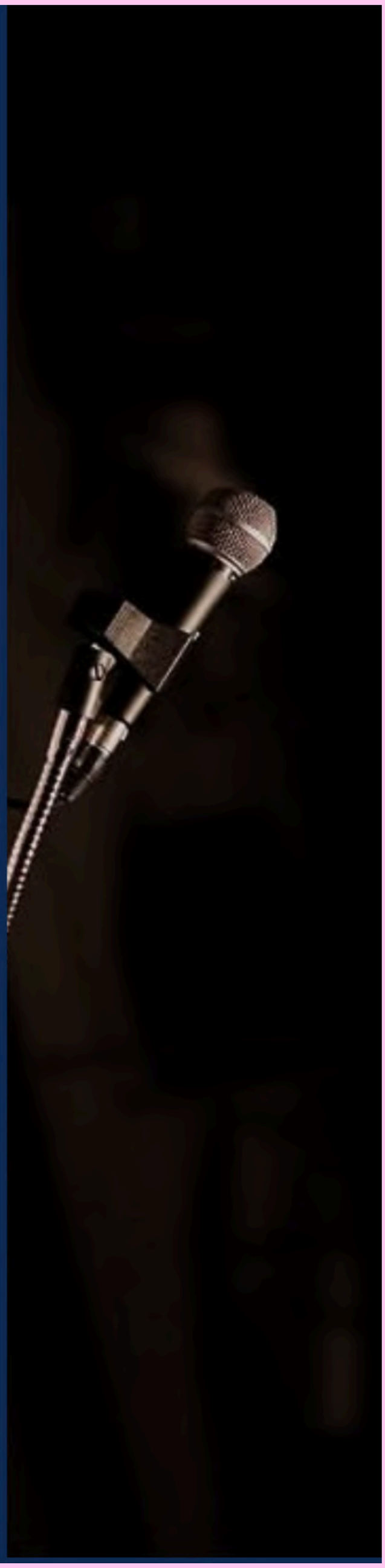
Bagi yang skeptis, meritokrasi semacam ini berfungsi sebagai tirai, yakni **memberi legitimasi moral pada keputusan yang sebenarnya sudah diambil lewat pertimbangan lain.**



10/16

INLEGAS

Akar persoalan meritokrasi berkelindan antara birokrasi dan kekuasaan politik.
Presiden memiliki posisi strategis untuk memberikan arah bahwa meritokrasi bukan sekadar agenda reformasi birokrasi, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional.
Artinya bahwa Posisi Presiden menjadi penting karena sebagian besar aparatur yang memegang kewenangan strategis berada dalam rantai kekuasaan eksekutif.



11/16

Patronase dan meritokrasi seremonial adalah dua wajah dari satu persoalan besar: **sejauh mana kompetensi benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam distribusi kekuasaan di Indonesia?** Jawabannya tidak hitam-putih, dan sangat mungkin berbeda tergantung sektor, level pemerintahan, dan periode waktu yang diamati. Yang pasti, selama proses seleksi pejabat publik masih minim transparansi dan akuntabilitas publik yang bisa diverifikasi secara independen, perdebatan ini akan terus relevan untuk didiskusikan, apa pun rezim yang sedang berkuasa.



Image source: Wahyan Sutejo

12/16

INLEGAS

Masalahnya bukan sekadar siapa yang mendapatkan jabatan, melainkan bagaimana **negara membangun kepercayaan publik** terhadap proses tersebut.

Sebab dalam demokrasi yang sehat, **jabatan publik seharusnya bukan hadiah** bagi mereka yang paling dekat dengan kekuasaan, **melainkan amanah bagi mereka yang paling layak** menjalankannya.



Image source: Pinterest

13/16

INLEGAS

Kita punya hak untuk bertanya:

1. Apa dasar dan kriteria seleksi yang digunakan?
2. Bagaimana rekam jejak calon terkait integritas, kompetensi, dan kinerja sebelumnya?
3. Siapa yang mengawasi jalannya proses ini agar bebas dari kepentingan tertentu?

Kawal prosesnya karena pengawasan yang kuat lahir dari masyarakat yang bersuara, partisipatif, dan aktif.



14/16

Sumber Rujukan

1. Aspinall, E. 2013. "The Logic of Clientelism in Indonesia's Democratic Transition". The Politics of Clientelism in Southeast Asia (pp. 45-67). Routledge
2. Scott, James. 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. The American Political Science Review Vol. 66. No. 1. pp. 91-113.
3. Scott, James C. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia." The Journal of Asian Studies 32, no. 1 (1972): 5–37. https://doi.org/10.2307/2053176.
4. Basri, Seta. 2026. "Perbandingan Perbandingan Praktik Patron-Klien Presiden Joko Widodo (Periode II) dan Presiden Prabowo Subianto: Analisis Teori James C. Scott". ResearchGate.net. 2026.
5. LIU H. Meritocracy as Authoritarian Co-Optation: Political Selection and Upward Mobility in China. American Political Science Review. 2024;118(4):1856-1872. doi:10.1017/S000305542300120X
6. Sik Sumaedi. 2026. "Indonesia dan Meritokrasi Seremonial". Artikel Kompas
7. Zhiwei, W. (2026). Democratic meritocracy based on virtue preselection and consent validation – political meritocracy meets electoral democracy. Inquiry, 69(4), 1886–1915. https://doi.org/10.1080/0020174X.2025.2571159

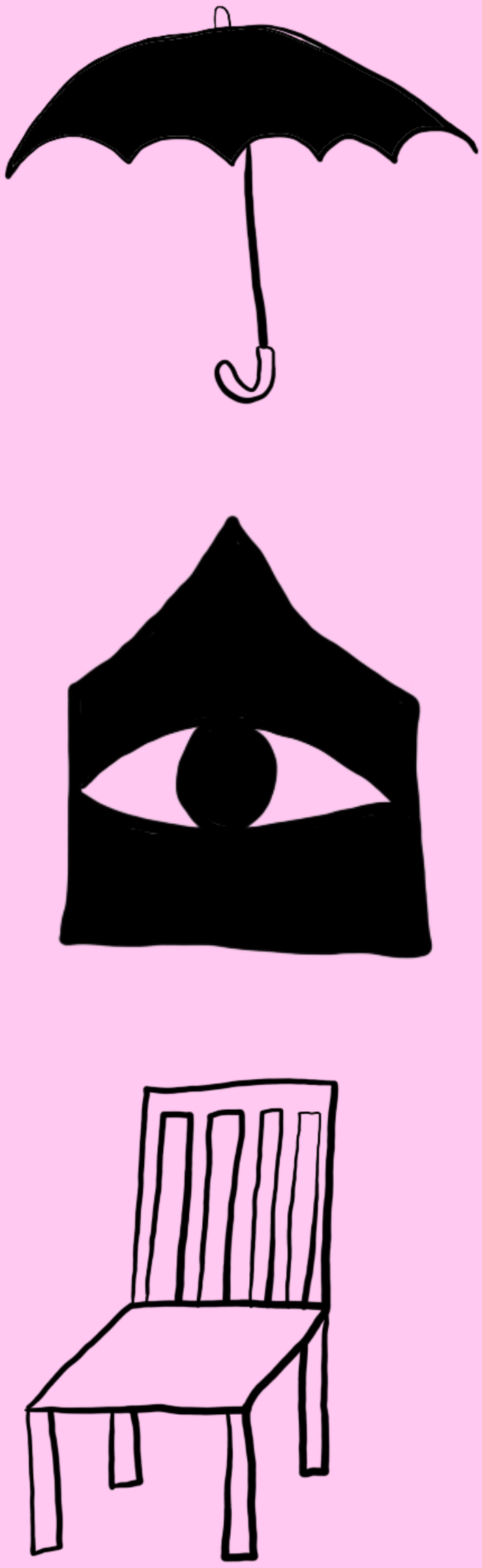
Author: Tria Noviantika

"Membuka Ruang, Menghadirkan Perspektif"

Mari bertumbuh melalui riset, analisis, dan percakapan yang bermakna!

inlegas.id inlegas.id inlegas.id inlegas.id

15-16/16





Oleh Daffa Ulhaq

1/7

Peringatan: Memuat kekerasan seksual

Awal hingga pertengahan tahun, BMKG mencatat 1.834 bencana yang terjadi dalam kurun waktu 8 bulan. **Bencana banjir di Aceh–Sumatera, Karhutla di Kalimantan dan sebagian Papua, Gempa bumi NTT, hingga yang terbaru 6 gunung erupsi bersamaan**; hanyalah sebagian kecil di antaranya.

Dampaknya bukan main; ratusan orang kehilangan nyawa, ribuan keluarga mengungsi, dan ratusan ribu rumah serta fasilitas rusak diterjang bencana.

Dan satu yang seringkali luput:

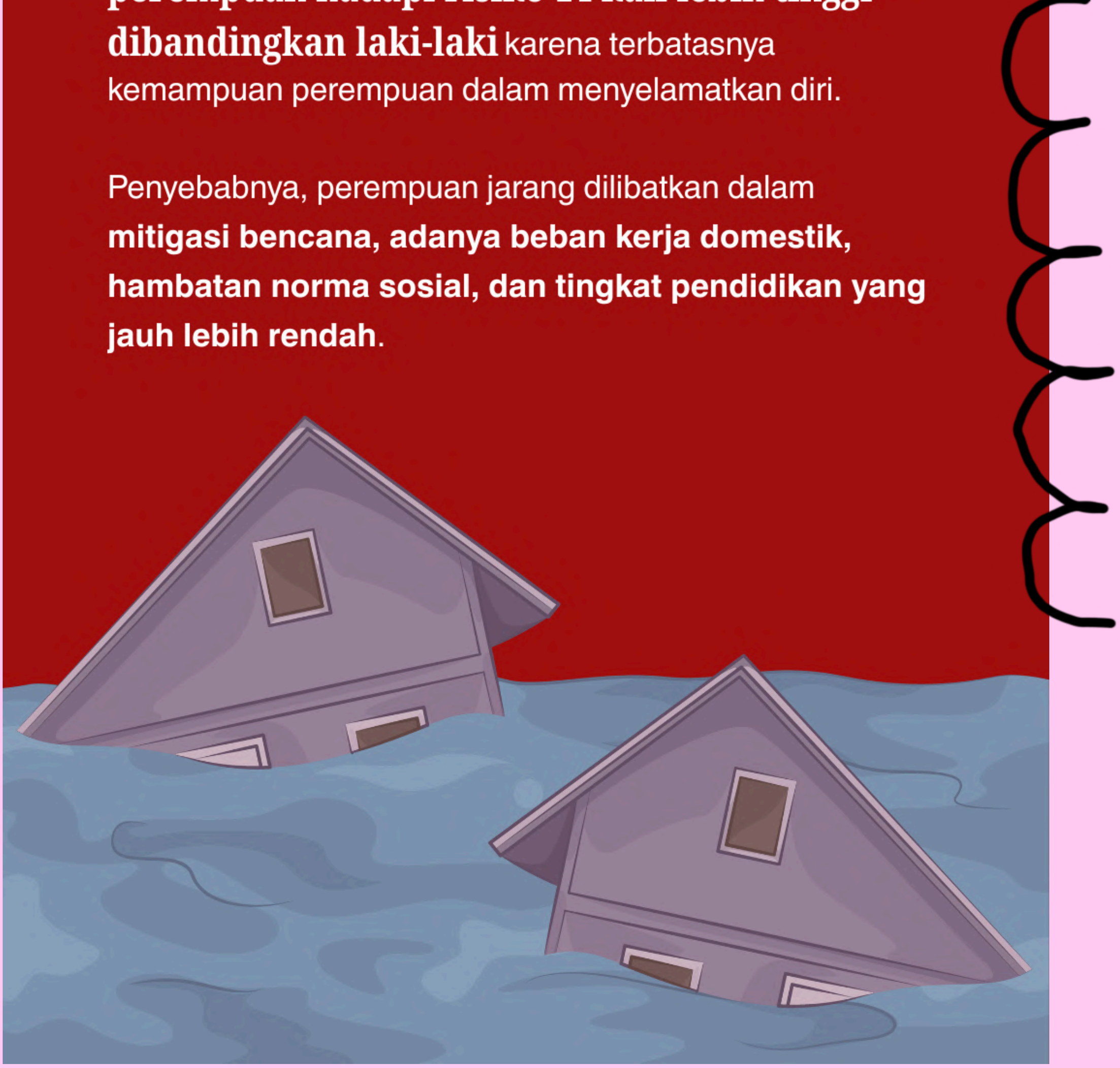
Nasib perempuan di tengah bencana.



2/7

Saat situasi bencana,
perempuan hadapi risiko 14 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena terbatasnya kemampuan perempuan dalam menyelamatkan diri.

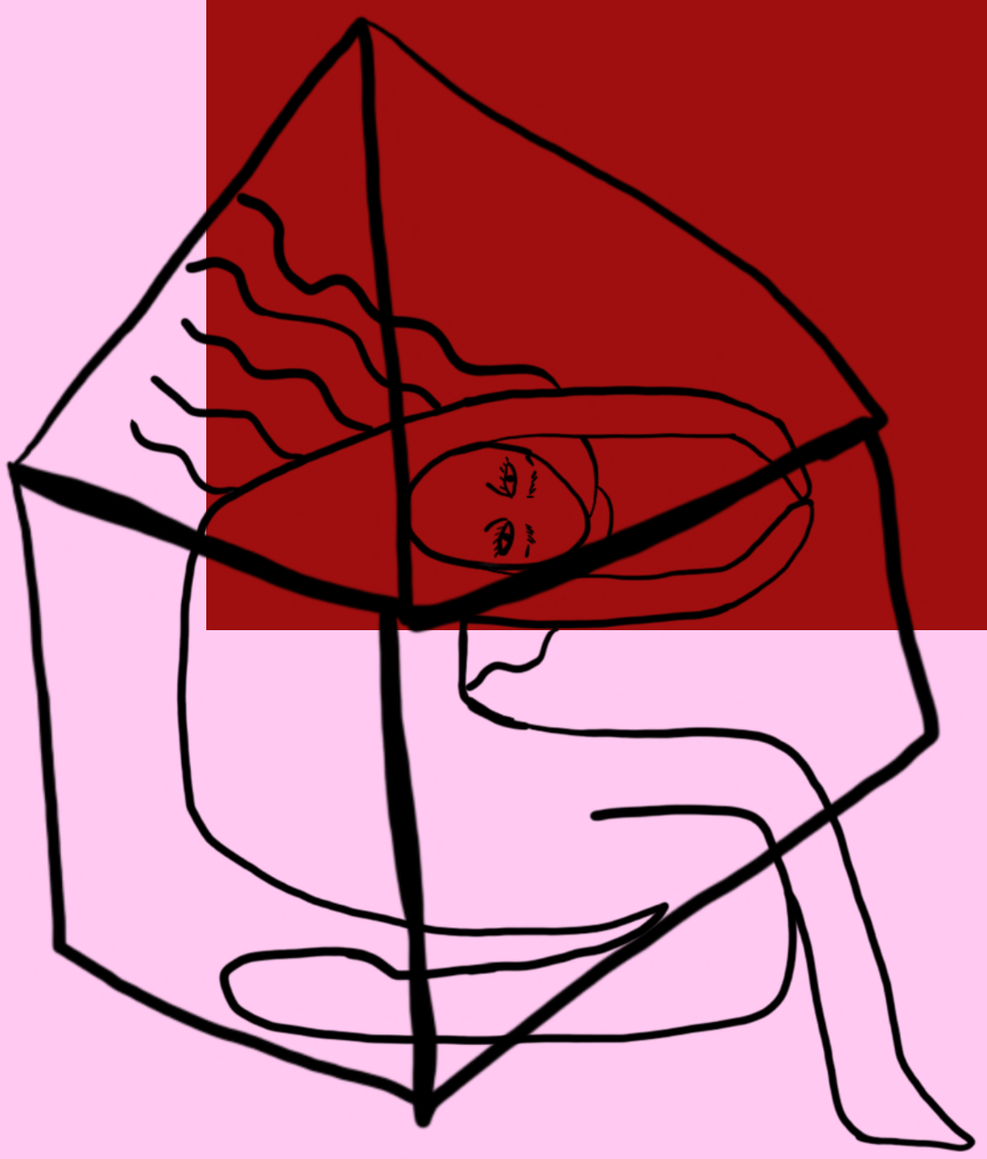
Penyebabnya, perempuan jarang dilibatkan dalam **mitigasi bencana, adanya beban kerja domestik, hambatan norma sosial, dan tingkat pendidikan yang jauh lebih rendah**.



3/7

Di saat bencana sudah mulai reda, perempuan belum benar-benar merasa aman.

Ancaman akan kekerasan seksual,
Ancaman akan tindak pemerkosaan,
Ancaman akan kekerasan berbasis gender,
Bermacam ancaman hantui perempuan.



4/7

Gadis 15 Tahun Korban Gempa NTT Diperkosa, Menteri PPPA Minta Korban Didampingi

kumparanNEWS

7 September 2026 10:50 WIB · waktu baca 1 menit

0 0

Ikuti kumparan di Google

Ancaman **tindak pemerkosaan** terjadi pasca-gempa NTT, dimana ada anak perempuan (15) diduga diperkosa oleh laki-laki saat di pengungsian. Sayangnya, ia tak sendiri. KOMNAS Perempuan mencatat;

- 67 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) pasca gempa dan 70 kasus perkawinan dini di 12 titik di Sulawesi Tengah,
- 3 kasus perkosaan di kamp pengungsi pasca gempa di Kota Padang.
- 97 kasus KBG pasca tsunami Aceh.

5/7

Padahal, pemerintah sebenarnya sudah memiliki aturan untuk melindungi kelompok rentan dalam situasi bencana. **Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2024** bahkan menajamkan mekanisme perlindungan bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di setiap fase bencana.

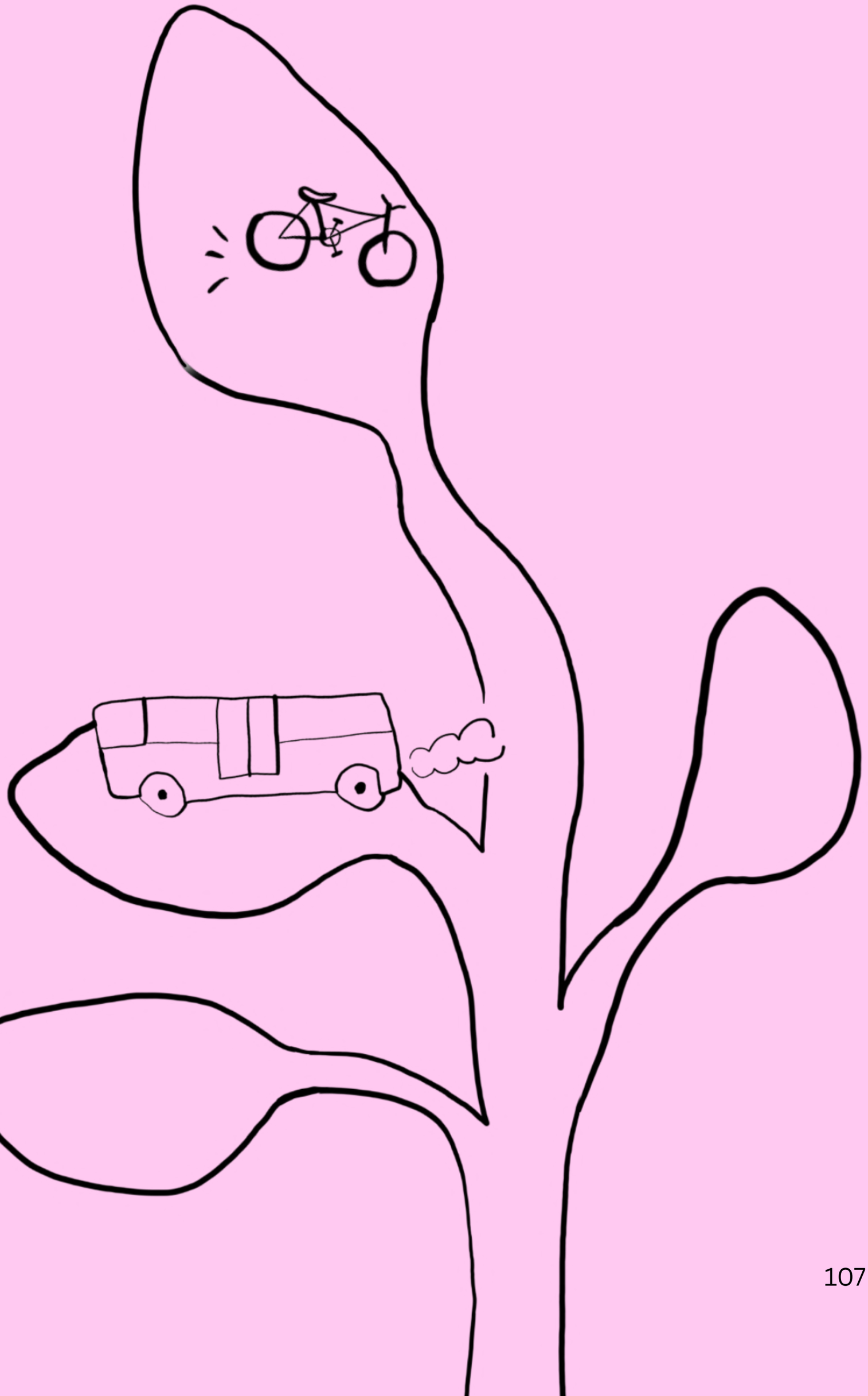
Namun, aturan tidak akan berarti banyak jika berhenti di atas kertas.

Pemerintah perlu memastikan perlindungan itu benar-benar hadir di lapangan: menyediakan pengungsian yang aman dan layak bagi perempuan, memastikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi tetap tersedia, membuka mekanisme pengaduan dan rujukan bagi korban KBG, serta melibatkan perempuan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

6/7

Referensi

- https://gis.bnpb.go.id/
- https://kumparan.com/kumparannews/menteri-pppa-perempuan-and-anak-14-kali-lebih-berpotensi-jadi-korban-saat-bencana-26BXpFBMRFs/2
- https://iddrr.undrr.org/news/why-gender-matters-disaster-risk-reduction
- https://kumparan.com/kumparwhynnews/menteri-pppa-perempuan-and-anak-14-kali-lebih-berpotensi-jadi-korban-saat-bencana-26BXpFBMRFs/2
- https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2024-09/FINAL%20GBV%20Risks%20Assessment%20and%20Safety%20Audit%20%281%29_0.pdf




Curhat tipis tentang balik kampung ke Bandar Lampung
Ark
Disusun dalam proses Laboratorium Demokrasi
bersama Pamflet Generasi

Oleh Ark

1/8



Akhir Agustus lalu, aku memutuskan untuk balik kampung, dikarenakan perlu merawat dan mengantar Bapak ke Rumah Sakit terkait kondisi kesehatannya. Tentang pengalaman ini, mungkin akan kubagikan di lain waktu, mengingat ada satu hal yg sebenarnya ingin aku share tentang pengalaman (kembali) tinggal di Bandar Lampung selama hampir satu bulan.

2/8



Sebagai konteks, aku udah gak tinggal di Bandar Lampung sejak 2017, domisili terakhir di Jakarta. Sebagai jobseeker (entahlah, di mana itu janji 19 juta lapangan pekerjaan), tinggal di Jakarta cukup memberikan kenyamanan, mengingat kalo ingin bepergian ke mana-mana, aku masih punya opsi menggunakan transportasi publik yang terjangkau. Yaaa, meski tetep perlu dempet-dempetan hiks :'(

3/8

Ini berbeda sekali pas aku balik ke Bandar Lampung. Mengantar Bapak perlu menggunakan kendaraan pribadi, dan sekadar bepergian ke sana ke mari juga mesti naik ojol (mana mahal lagi kan, aduhhh pokoknya amsyong). Sad... T_T




Kalo mau ke pasar beli bahan makanan untuk aku dan Bapak, aku bawa motor sendiri, hitung-hitung penghematan. Di jalan, aku nemunin banyaaak banget jalanan rusak... Sebagai pengendara yang membawa motor tua ini, bokongku gak ketolooong deh akibat jalanan bolooong...

5/8


Pengalaman ini bikin aku sadar, bahwa ketimpangan infrastruktur itu benar-benar nyata guys. Kita sebagai perantau atau orang yg tinggal di Jakarta dan sekitarnya, mungkin merasa memiliki transportasi publik yg terjangkau dan menjangkau banyak tempat adalah suatu hal yang lumrah dan bukan barang mewah.
12
Dilarang bersandar pada pintu PSD
Khusus untuk pengguna kursi roda, kereta bayi, dan sepeda lipat
Reserved for wheelchairs, strollers, and folding bicycles

6/8


PECEL LELE DADDY
NASI UDUK
" G4UL "
IKAN SEGAR
IKAN BAKAR
IKAN PEPES
Tapiii, kenyataannya... Hal begitu gk bisa dimiliki warga di banyak tempat di Indonesia. Bandar Lampung yang jaraknya kira-kira cuma 300 KM dari Jakarta saja, infrastruktur transportasi publiknya beda bgt 180 derajat, gimana kalo di tempat lain yahh?

7/8


Tentu, ini smua pengalaman personalku. Tapiii, kok aku ngerasa hal ini gak cuma kualami sendiri ya... Gimana menurut kawan-kawan menyoal transportasi publik di kota kalian? Gimana juga dengan jalanan bolong dan rusak kayak di Bandar Lampung? Hehe.. Dahlah!

8/8

Akar dan Arah: Mempertanyakan Fenomena Merantau di Indonesia

Oleh Tari Masdar

Menonton ulang film favorit selalu menjadi pengalaman unik. Kita akan menemukan detail yang mungkin tidak kita temukan saat pertama kali menonton. Hal ini tidak jarang juga membawa pemikiran baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Beberapa waktu yang lalu, saya baru saja menonton *Comrades: Almost A Love Story* (1996) oleh Peter Chan untuk yang ketiga kalinya. Film yang dibintangi oleh Maggie Cheung dan Leon Lai tersebut merupakan salah satu favorit saya. Pengambilan sudut kota Hong Kong yang estetis dan berbagai alunan lagu Teresa Teng menambah indahnya kisah cinta dua tokoh utama.

Dari Layar ke Kehidupan Kita

Saya pertama kali menonton film tersebut ketika masih berusia belasan tahun. Kala itu, yang saya pikirkan hanya lah romantisme kisah cinta dua



Sumber: Comrades: Almost A Love Story (1996)

orang kere dari pedesaan di Cina daratan yang berjuang hidup di kota metropolitan. Saking membekasnya film ini, saya bahkan bercita-cita untuk jalan-jalan ke Hong Kong suatu hari nanti. Namun, sebagaimana sebuah film dapat memberikan makna yang berbeda ketika kita menyaksikannya dalam tahap hidup yang berbeda, ketika dewasa saya mempertanyakan beberapa hal di sekitar saya lewat *Comrades: Almost A Love Story*. Saya tidak lagi melihat film tersebut sebagai kisah perselingkuhan yang dibalut romantisme, tapi mulai menyadari hal-hal lebih besar yang tidak saya sadari sebelumnya, salah satunya isu ketimpangan dan fenomena merantau.

Sebagai perempuan yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang memiliki budaya merantau yang kuat, sejak kecil saya sudah mendengar berbagai kisah keberhasilan orang-orang yang sukses di tanah rantau. Kesuksesan yang membuat bangga sanak saudara karena mereka berhasil mengubah perekonomian keluarga. Kisah itu diceritakan para senior dengan rasa bangga, penuh perjuangan, dan harapan bisa menginspirasi orang muda lainnya.

Sebagai anak kecil waktu itu, saya sangat kagum dengan orang-orang yang merantau. Hal ini juga yang melatarbelakangi keputusan saya untuk melanjutkan kuliah ke kota besar. Namun, semakin dewasa, saya merasa ada yang sering luput dari pembicaraan tentang merantau. Kita selama ini terlalu fokus membahas bagaimana merantau mengubah penghidupan seseorang. Kita jarang bertanya: apakah keputusan personal itu juga dipengaruhi oleh kesempatan yang terbatas di daerah asal?

Masalah Ketimpangan di Indonesia yang Tidak Berujung

Ketika membuka media sosial, mungkin beberapa dari kita sering melihat berita mengenai sulitnya mencari pekerjaan untuk lulusan sarjana. Bahkan mungkin, sebagian dari kita yang membaca ini juga sedang mengalami hal yang serupa. Lulusan sarjana yang sedang mencari kerja seringkali mendapat tekanan untuk segera bekerja dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dari media sosial. Tak jarang, generasi muda di daerah merantau ke kota-kota besar dengan harapan segera mendapatkan pekerjaan.

Ada berbagai pertimbangan yang membuat mereka merantau: mulai dari kesempatan kerja yang lebih luas, gaji yang lebih besar, dan tekanan sosial. Data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata upah bersih bulanan antara pekerja yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, rata-rata upah bersih pekerja mencapai Rp3,62 juta, sedangkan di pedesaan sebesar Rp2,58 juta. Lebih lanjut, provinsi dengan rata-rata upah tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Papua Tengah, dan Kepulauan Riau. Hal ini juga diperkuat dengan data sensus BPS yang memperlihatkan bahwa faktor ekonomi dan dorongan untuk mencari pekerjaan menjadi pemuncak alasan utama seseorang untuk merantau.

Permasalahan struktural ini cocok dengan konsep kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung (1969, 1990). Ia mengajukan tiga bentuk kekerasan yang saling memengaruhi, yaitu kekerasan langsung (fisik), kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Dalam melihat fenomena

ketimpangan di Indonesia, konsep kekerasan struktural membantu kita memahami bagaimana akses yang tidak merata dapat membatasi pilihan seseorang. Dalam konteks pembahasan ini, salah satu contohnya adalah bagaimana seorang pemuda yang tumbuh dalam kemiskinan dan keterbatasan akses memiliki nasib yang berbanding terbalik dengan orang-orang yang berkecukupan. Meskipun mungkin tidak ada orang yang menyakitinya secara langsung, ada hambatan struktural yang membuat kesempatan tersebut tidak merata. Maka, menurut Galtung, ini adalah contoh dari praktik kekerasan struktural.

Namun, kebanyakan dari kita melihat permasalahan ini sebatas kepada permasalahan personal. Kita luput untuk melihat adanya masalah dalam struktur yang sedang kita jalani sekarang. Seringkali, kita masih menyalahkan individu karena dianggap kurang berusaha, kurang berinisiatif, dan bahkan kurang berdoa. Padahal, sejak awal, sudah ada struktur yang membatasi.

Solusi yang Mengaburkan Akar Masalah

Ketika orang muda sulit memperoleh pekerjaan yang layak di daerah asalnya, kita perlu melihat: apakah kesempatan kerja dan akses ekonomi di sana sudah memadai? Jika belum, isu tersebut merupakan penanda yang jelas bahwa kita berada dalam struktur sosial yang tidak memihak. Ketika kritik hadir untuk mencoba memperlihatkan adanya masalah dalam sistem sosial, pemerintah kadang memberikan solusi yang tidak menyentuh akar permasalahan. Misalnya, menyuruh orang muda berwirausaha dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Saran itu mungkin berguna bagi sebagian orang, tetapi tidak cukup jika persoalan keterbatasan akses dan kesempatan kerja tetap dibiarkan.

Mungkin masih segar dalam ingatan kita semua bagaimana Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebut bekerja di luar negeri sebagai salah satu alternatif di tengah kebutuhan akan lapangan kerja. Ia juga menegaskan bahwa pilihan itu bukan paksaan dan perlu ditempuh melalui jalur yang aman dan legal. Namun, tawaran untuk bekerja di luar negeri tetap menyisakan pertanyaan:

bagaimana dengan orang-orang yang ingin bekerja dan membangun hidup di daerah asalnya? Kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri tidak serta-merta teratasi ketika sebagian orang memiliki pilihan untuk pergi.

Jika ketimpangan kesempatan membuat banyak orang sulit mendapat pekerjaan yang layak, seharusnya solusi yang ditawarkan bukan sekedar pindah tempat tinggal atau merantau ke luar negeri. Solusi harus bisa merespon permasalahan sistemik dan memperbaiki distribusi akses dan sumber daya agar tidak lagi terpusat di sebagian kota besar, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah pusat dan daerah mengambil langkah yang konkret dan terukur untuk memperkecil ketimpangan. Hal ini bisa dimulai dari akses kesempatan kerja yang luas, peningkatan mutu pendidikan, dan redistribusi sumber daya ke berbagai wilayah yang selama ini dipinggirkan. Dengan demikian, merantau bisa menjadi pilihan untuk membangun kehidupan, bukan jalan yang harus diambil ketika kesempatan di daerah asal terlalu sempit.

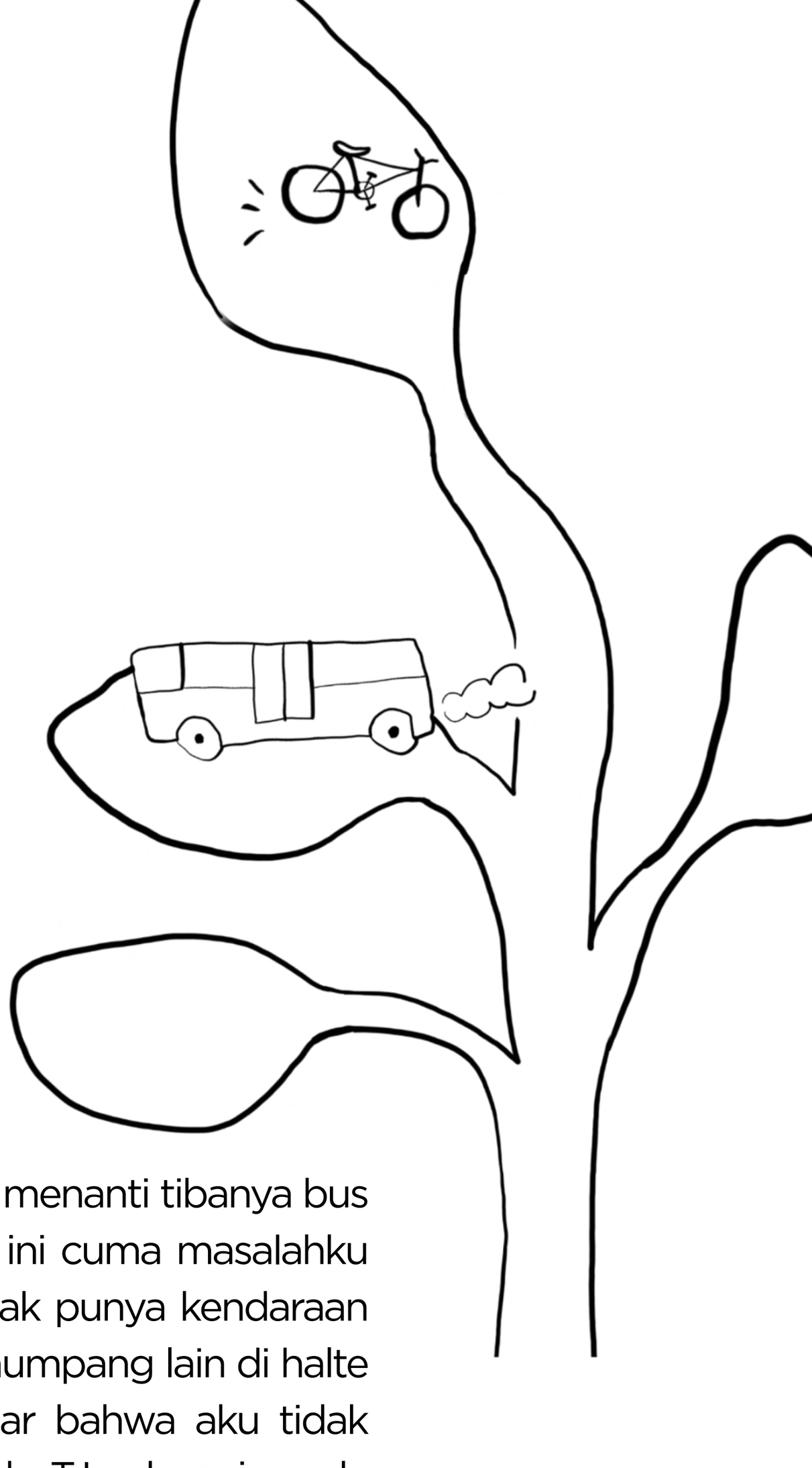
Pada akhirnya, permasalahan ini mengharuskan kita menagih perbaikan sistem dan tanggung jawab negara, alih-alih terus menyalahkan individu atas keputusan yang mereka buat dalam kondisi hidup yang mungkin jauh dari ideal.

Referensi:

Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research”, Journal of Peace Research, 1969
Galtung, Johan. “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, 1990

Muak Menunggu Bus TJ

Oleh M. Khoirul Imamil



Entah untuk ke berapa kalinya, aku muak menanti tibanya bus Trans Jogja (TJ) Jalur 8. Mulanya, kukira ini cuma masalahku saja, nasib seorang pekerja muda yang tak punya kendaraan pribadi. Namun, saat duduk bersama penumpang lain di halte yang mengeluhkan hal serupa, aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Banyak orang bergantung pada TJ sebagai moda mobilitas harian: pelajar, lansia, ibu rumah tangga, pekerja *early career* sepertiku, hingga beragam latar belakang kelas sosial lainnya. Kami mempertaruhkan tuntutan "tepat waktu" pada TJ, saat orang lain beradu cepat dengan kendaraan pribadi masing-masing.

Seandainya pengelola TJ dan pemerintah menyadari betapa vitalnya peran transportasi umum bagi masyarakat, bus TJ mestinya tidak menyiksa para penumpangnya dengan penantian tanpa kepastian. Saban pulang kerja, misalnya, aku acap kali menanti ketibaan TJ Jalur 8 di Halte UNISA lebih dari Tentu bisa dibayangkan, ketika tubuh dan pikiran telanjur lelah oleh beban kerja seharian, emosi akibat penantian panjang membuat segalanya makin runyam. Tubuh sudah ingin segera tiba di rumah, merebahkan diri, dan memejamkan mata untuk mengisi ulang energi. Nahas, transum yang serupa siput ini membuat harapan sederhana tersebut berubah menjadi bak surga firdaus yang mesti dicapai lewat ritual-ritual dan segenap amal bajik.

Kalau ada yang mengira bahwa ini komplain individu dan murni subjektif, anggapan ini salah total. Masalah lamanya waktu tunggu bus TJ pernah dikaji secara akademis. Noftantia (2026) dalam pengamatannya terhadap bus TJ jalur 4B mendapati bahwa masa tunggu (headway) TJ berada di angka 32 menit—dua kendaraan per jam. Sementara, Jaisyurrahman et al (2025) mengungkapkan bahwa persepsi dan pengalaman pengguna TJ cenderung belum positif, sehingga pilihan untuk menggunakan TJ sebagai moda transportasi belum signifikan.

“Menurutku, apa yang aku alami, cerita yang kudengar dari sesama penumpang, serta kajian akademik yang senada dengan keluhan kami ini mestinya lebih dari sekadar cukup untuk menyentil pemerintah daerah dan pengelola. Mereka berkewajiban untuk mengevaluasi sistem pengoperasian TJ yang telah berlangsung selama ini. Anehnya, pemerintah malah mengurangi subsidi, alih-alih memberikan tambahan subsidi bagi TJ agar armadanya bisa lebih banyak, menambah halte, atau memperpendek rute (Detik, 25 Agustus 2025). Pemerintah barangkali lupa bahwa setiap hari, banyak orang yang tak punya kendaraan dinas mesti menyerahkan sebagian dari waktu istirahat dan “*me time*”-nya kepada TJ. Padahal, kejenuhan akibat keterlambatan transportasi publik terbukti berdampak buruk pada kesehatan fisik maupun psikologis penumpang (Rezapour & Ferraro, 2021).

*Karena hal itulah, kurasa ini waktunya bersuara. Masalah lamanya waktu tunggu TJ bukanlah perkara sepele yang hanya menimpa segelintir orang. Terdapat sistem atau kebijakan yang perlu dibenahi . Penumpang, operator, dan pemangku kebijakan harus duduk bersama merumuskan solusi nyata. Kita memerlukan perbaikan mendasar dan konkret. Sebab, tanpa harus mengutip adagium Barat "*Time is money*", tidak seorang pun layak dirampas hak waktunya dan dikuras kesehatannya hanya demi menunggu bus datang. Jadi, mari bersama-sama membenahi TJ kita tercinta!*

Referensi:

Jaisyurrahman, M. L., Priyanto, S., & Malkhamah, S. (2025). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menggunakan Trans Jogja sebagai Moda Transportasi Publik di Yogyakarta. Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi, 156–165. https://doi.org/10.26740/mitrans.v3n2.p156-165

Rezapour, M., & Richard Ferraro, F. (2021). The impact of commuters' psychological feelings due to delay on perceived quality of a rail transport. *Humanities and Social Sciences Communications*, *8*(1). https://doi.org/10.1057/s41599-021-00865-z

Rinepta, A. G. (2025, August 27). Operator Trans Jogja Buka Suara soal Wacana Subsidi Dipangkas Tahun 2026. Detikjogja; detikcom. https://www.detik.com/jogja/bisnis/d-8082741/operator-trans-jogja-buka-suara-soal-wacana-subsidi-dipangkas-tahun-2026

Vony Noftantia (2026). Evaluasi Efektivitas Frekuensi dan Headway terhadap Kinerja Trans Jogja Trayek 4B (Terminal Giwangan-UGM-UIN Sunan Kalijaga-RS Sardjito-Pakualaman-Taman Siswa-Terminal Giwangan) Pada Weekday dan Weekend. https://Etd.Umy.Ac.Id/Id/Eprint/82292/. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/82292/

Siapa yang Membayar Biaya Kepedulian dalam Sistem Pangan Kita?

Oleh Bimo Rangga Alfaroby Mosyafwa

Setiap tahun, puluhan juta ton pangan hilang atau terbuang di Indonesia. Jika dihitung dari kandungan energinya, jumlah tersebut secara teoritis dapat memenuhi kebutuhan kalori lebih dari seratus juta orang. Pada saat yang sama, satu dari lima balita Indonesia masih mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis.

Dua angka itu mudah dipertemukan secara gegabah. Ada makanan yang terbuang di satu tempat dan ada orang yang kekurangan makanan di tempat lain. **Maka, bukankah persoalannya tinggal memindahkan makanan dari tempat yang berlebih ke tempat yang membutuhkan?**

Masalahnya tidak sesederhana itu.

Makanan memiliki umur simpan. Ia membutuhkan kendaraan, gudang, pendingin, tenaga kerja, dan pasar yang mampu menyerapnya. Sayuran yang berlimpah di sentra produksi tidak otomatis menjadi makanan murah di kota. Makanan yang tersisa di sebuah restoran pada malam hari juga tidak serta-merta dapat menjadi santapan keluarga yang membutuhkan. Ada jarak yang harus dibayar sebelum pangan berpindah dari satu tangan ke tangan lain.

Yang sering luput dari pembicaraan tentang food loss and waste adalah siapa yang membayar harga dari jarak tersebut.

Coba ikuti perjalanan seikat sayur sejak dipanen.

Begitu dipetik, waktu mulai bekerja melawan petani. Sayur terus kehilangan kesegarannya. Tanpa ruang penyimpanan dingin, petani memiliki sedikit pilihan ketika harga turun atau pembeli tidak datang. Menjual cepat dengan harga rendah sering lebih masuk akal daripada menunggu sampai sayuran kehilangan nilai jualnya.

Saat panen berlangsung serempak, masalahnya menjadi lebih berat. Pasar lokal tidak mampu menyerap seluruh pasokan. Mengirim hasil panen ke kota lain membutuhkan biaya angkut, sementara harga jual belum tentu menutup ongkos perjalanan. Sebagian hasil panen akhirnya dibiarkan di lahan atau dibuang setelah biaya untuk menyelamatkannya melebihi nilai yang mungkin diperoleh.

Kerugian itu tidak muncul karena petani memilih membuang pangan. Kerugian muncul karena petani ditempatkan sebagai penanggung risiko terakhir ketika infrastruktur penyimpanan dan distribusi tidak tersedia.

Sayuran yang berhasil keluar dari persoalan tersebut masih harus melewati pintu berikutnya.

Di pasar modern, bentuk dapat menentukan nasib sebuah produk. Ukuran yang tidak seragam, warna yang kurang menarik, atau permukaan yang memiliki sedikit noda dapat membuat hasil panen tersingkir dari rak. Padahal konsumen tidak kehilangan kandungan gizi hanya karena sebuah wortel bengkok atau kentang tidak berbentuk sempurna. Ketika standar penjualan lebih ketat daripada standar keamanan pangan, sesuatu yang masih layak

dimakan dapat kehilangan kesempatan untuk dimakan.

Kerugiannya kembali bergerak ke belakang. Petani dan pemasok menerima lebih sedikit nilai dari hasil yang sudah mereka tanam, rawat, panen, dan kirimkan. Pangan gagal di satu titik, tetapi tagihannya dibayar oleh pihak lain.

Di ujung rantai, pola yang sama muncul dalam bentuk berbeda.

Restoran, hotel, supermarket, dan usaha makanan dapat memiliki surplus makanan yang masih layak dikonsumsi ketika hari operasional berakhir. Menyelamatkannya membutuhkan lebih dari sekadar kemauan. Makanan perlu diperiksa, dipilah, dikemas, disimpan, dan dikirim dalam waktu yang aman. Penerima juga harus tersedia pada saat yang tepat.

Semua itu membutuhkan orang dan uang.

Jika biaya membuang satu kotak makanan hanya berupa biaya pembuangan, sementara menyelamatkannya membutuhkan tenaga kerja tambahan, ruang penyimpanan, kendaraan, koordinasi, dan risiko hukum, keputusan membuang menjadi pilihan yang masuk akal bagi pelaku usaha.

Sistem telah membuat pemborosan menjadi murah dan kepedulian menjadi mahal.

Kalimat itu menjelaskan mengapa kampanye "jangan buang makanan" sering berhenti pada perilaku individu. Konsumen diminta menghabiskan makanan di piring. Restoran diminta menyumbangkan surplus. Relawan diminta mengambil dan mengantar makanan. Petani diminta mengelola hasil panen dengan lebih baik.

Tetapi siapa yang membayar pekerjaan di antara semua permintaan itu?

Seorang petani tidak mungkin membangun jaringan cold chain sendirian. Sebuah restoran tidak selalu memiliki kendaraan dan jaringan penerima untuk mendistribusikan surplusnya. Bank pangan tidak dapat terus mengandalkan relawan yang membayar bahan bakar dari kantong sendiri. Keluarga berpenghasilan rendah juga tidak dapat menyelesaikan persoalan

akses pangan hanya dengan memilih makanan yang lebih bergizi ketika harga dan ketersediaannya sudah berada di luar jangkauan.

Kita terlalu sering membicarakan kepedulian sebagai sifat manusia, padahal dalam sistem pangan kepedulian juga merupakan persoalan desain.

Orang dapat memiliki niat baik, tetapi niat baik tidak menciptakan gudang pendingin. Kerelaan berdonasi tidak membayar ongkos distribusi. Ajakan untuk berbagi tidak otomatis menyediakan penerima yang dapat mengambil makanan sebelum masa simpannya berakhir.

Karena itu, collective care perlu dipahami lebih jauh daripada sekadar ajakan untuk saling membantu.

Dalam sistem pangan, kepedulian kolektif berarti **risiko yang selama ini dipikul sendirian mulai ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk menguranginya**. Pemerintah memiliki kapasitas membangun infrastruktur. Pelaku usaha menguasai titik-titik surplus. Organisasi sosial memiliki jaringan penerima. Masyarakat memiliki peran dalam menentukan permintaan dan kebiasaan konsumsi.

Perannya memang berbeda. Justru karena berbeda, bebannya tidak dapat dibagi rata.

Petani membutuhkan fasilitas pascapanen yang membuat mereka tidak harus menjual dalam keadaan terdesak. Pemerintah dapat mengambil bagian dalam menyediakan infrastruktur tersebut. Dunia usaha dapat membuka jalur bagi produk yang selama ini tersingkir hanya karena bentuknya. Di hilir, penyelamatan surplus membutuhkan sistem redistribusi yang membuat donasi aman secara hukum dan masuk akal secara operasional. Bank pangan membutuhkan dukungan logistik agar pekerjaan menyelamatkan makanan tidak bergantung pada daya tahan relawan.

Kepedulian baru menjadi kolektif ketika biaya untuk merawat pangan juga dibagi secara kolektif.

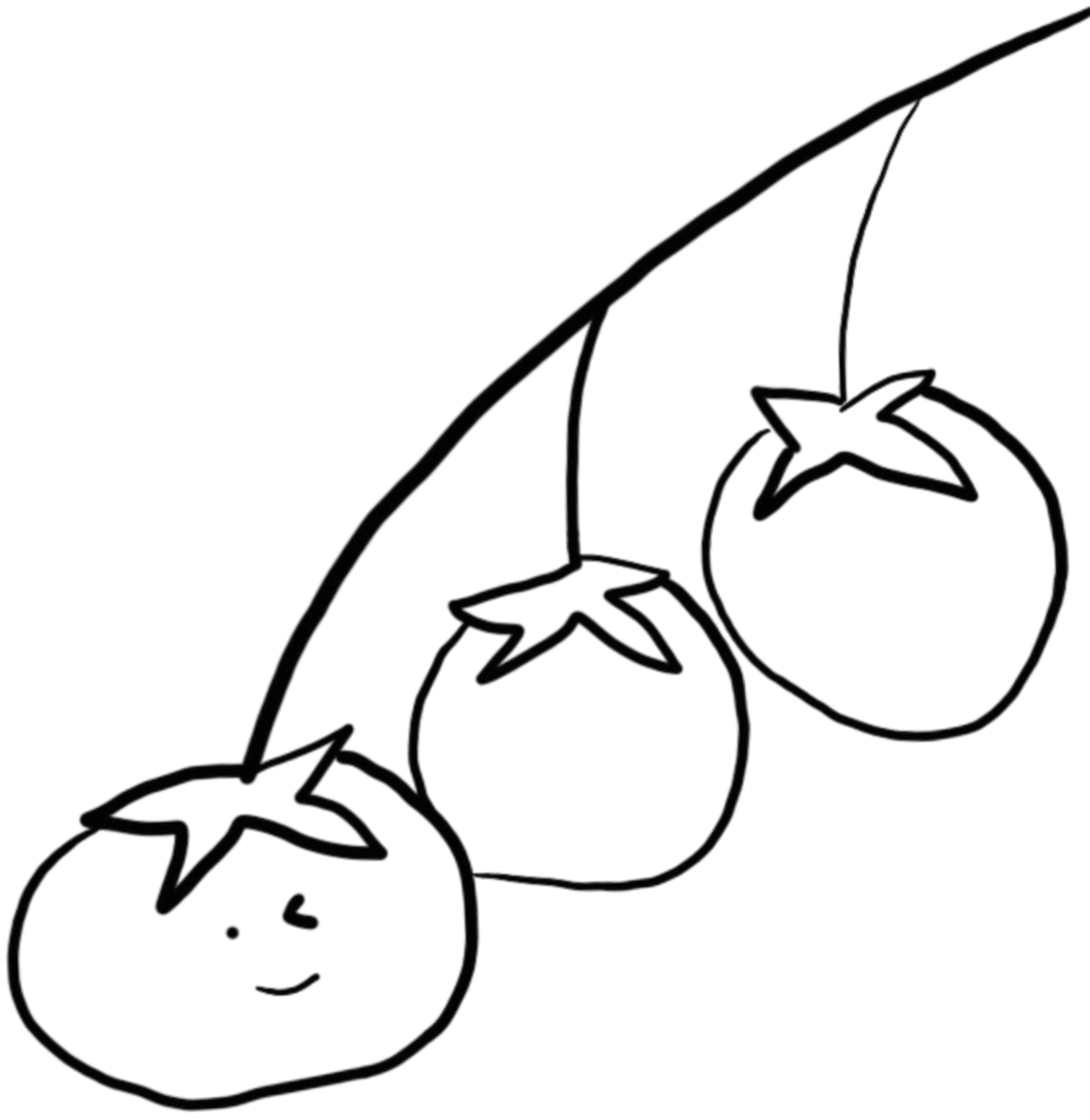
Itulah sebabnya pembangunan cold chain di sentra produksi tidak semestinya dipandang hanya sebagai proyek infrastruktur. Ia menentukan siapa yang menanggung risiko ketika hasil panen tidak segera terjual. Gudang pendingin komunitas dapat memberi petani sedikit ruang untuk menunggu pasar, alih-alih memaksa mereka menerima harga apa pun sebelum sayuran membusuk.

Hal yang sama berlaku di hilir. Menyelamatkan makanan harus dibuat lebih mudah daripada membuangnya. Kepastian hukum bagi penyumbang pangan yang memenuhi standar keamanan, dukungan biaya distribusi, serta jaringan penerima yang terhubung dengan sumber surplus dapat mengubah perhitungan yang selama ini membuat pembuangan lebih rasional.

Pasar juga perlu mengoreksi cara menilai pangan. Produk pertanian tidak seharusnya kehilangan nilai hanya karena bentuknya tidak seragam. Selama aman dan layak dikonsumsi, perbedaan rupa semestinya tidak menjadi alasan untuk memutus perjalanan makanan menuju konsumen.

Perubahan semacam itu menggeser pusat pembicaraan. Kita tidak lagi hanya bertanya bagaimana membuat orang membuang lebih sedikit makanan. Kita mulai melihat siapa yang memiliki kuasa untuk mencegah kehilangan dan siapa yang selama ini dipaksa membayar ketika pencegahan tidak dilakukan.

Sistem pangan yang lestari bukan sistem yang meminta semua orang berbuat lebih banyak. Ia adalah sistem yang memastikan pekerjaan merawat pangan tidak jatuh terus-menerus kepada mereka yang paling sedikit memiliki sumber daya untuk melakukannya.



Seikat sayur yang membusuk di lahan bukan hanya kehilangan komoditas. Di dalamnya ada ongkos produksi petani, air, tanah, energi, tenaga kerja, transportasi, dan kesempatan seseorang untuk mengonsumsi pangan tersebut. Ketika makanan berhenti di satu titik, yang hilang bukan hanya makanannya. Ada rangkaian kerja manusia yang ikut kehilangan hasil.

Karena itu, ukuran keberhasilan sistem pangan tidak cukup dilihat dari berapa banyak makanan yang berhasil diselamatkan setelah hampir terbuang. Ukuran yang lebih mendasar adalah **seberapa kecil kebutuhan untuk menyelamatkan itu muncul sejak awal, dan seberapa adil risiko pencegahannya dibagi.**

Kita boleh terus mengajarkan konsumen untuk mengambil makanan secukupnya. Itu perlu. Tetapi kebiasaan di meja makan tidak akan menyelesaikan sayuran yang membusuk karena tidak ada pendingin, produk yang ditolak karena bentuknya, atau surplus restoran yang dibuang karena biaya redistribusinya terlalu tinggi.

Ada persoalan yang memang berada di tangan individu. Ada pula yang sejak awal dibentuk oleh keputusan yang dibuat jauh dari meja makan.



Jika kita sungguh ingin memiliki sistem pangan yang lestari, pertanyaannya bukan hanya apakah masyarakat mau peduli. Kita perlu memastikan bahwa sistem yang mereka jalani membuat kepedulian itu mungkin dilakukan tanpa menjadikan petani, pekerja, relawan, atau keluarga miskin sebagai pihak yang kembali membayar harganya.

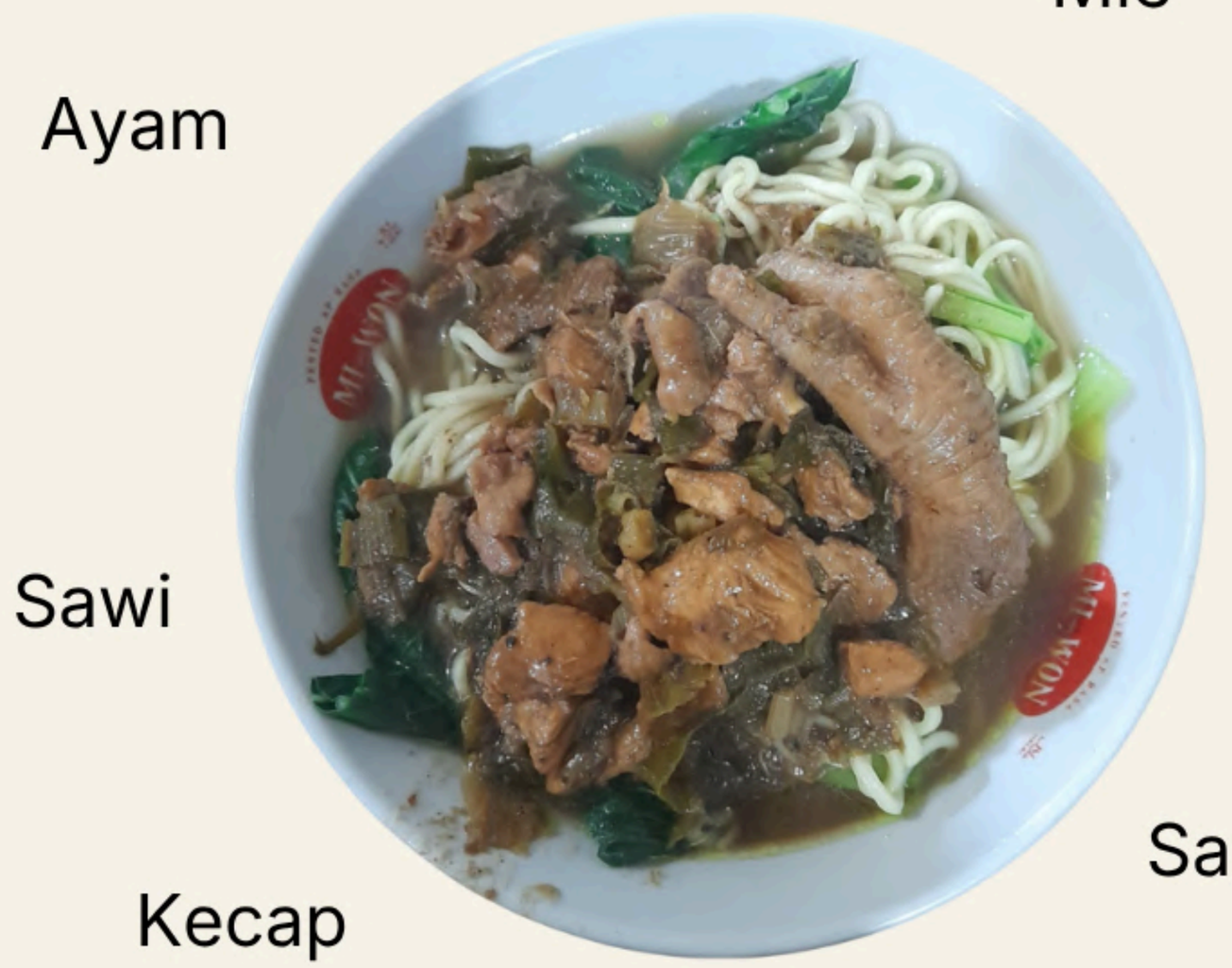
Seporsi mie ayam dan keadaan saat ini



Oleh Ilham Bayu Ramadhan

1/6

Berpikir sejenak tentang seporsi mie ayam



Bahan-bahan ini harus diracik dengan porsi yang pas.
Abang mie ayam tahu betul soal ini

2/6

Bagaimana bila...



Kecapnya kelebihan?
Rasanya jadi terlalu manis, bahkan eneg



Pakai sambal atau tidak?
Kebanyakan pedas sekali, tidak ada serasa ada yang kurang



Bahkan potongan ayam yang di berikan konstan tak melebihi porsi mie itu sendiri. Kalau kelebihan menjadi Ayam Mie mungkin.

3/6



Gimana jadinya kalau...



Kecap manis itu ibarat janji-janji manis politisi. Kalau terlalu banyak dan cuma buat cari aman, sistem jadi stagnan dan bikin warga "eneg".



Sedangkan sambal, layaknya kritik dan kebebasan berekspresi. Kalau nggk ada serasa ada yang kurang, kebanyakan dan tidak terkendali negara jadi chaos.

4/6



Begitu juga dengan pemimpin, ibarat ayam porsinya tetap tidak boleh mendominasi dari mie (rakyat)

Layaknya mie ayam, demokrasi butuh keseimbangan dari konstitusi yang jelas, pemerintah yang kerja bener, dan suara kritik kita.

5/6

Sudahkah naik harga
mie ayam di tempatmu?

6/6

Demokrasi di Jalan-Jalan Rusak

Oleh Mufidah Zain

Pertengahan September lalu, Cianjur ramai dengan peresmian Tugu baru Bernama Tugu Ayam Pelung. Ikon daerah itu tegak berdiri sekitar tiga meter, terbuat dari 349 knalpot hasil razia knalpot bising Polres Cianjur. Tugu tersebut dibangun sekaligus sebagai pengingat bagi masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas dan memerhatikan kenyamanan banyak pihak dengan tidak menggunakan knalpot bising.

Pembangunan Tugu Ayam Pelung menambah daftar ikon ruang kota Cianjur. Sebelumnya, Cianjur sudah memiliki banyak ikon kota seperti Tugu Lampu Gentur, Tugu Tauco, Tugu Meong, Tugu Pandanwangi, dan berbagai penanda ruang lainnya. Masing-masing tugu hadir dengan fungsi yang berbeda, mulai dari penanda lokasi, identitas kota, bahkan sebagian lain hadir untuk mempercantik ruang publik.

Melihat tugu-tugu tersebut, muncul pertanyaan tentang cara sebuah daerah menentukan apa yang perlu hadir di ruang publiknya. Sebab, ruang kota tidak pernah benar-benar netral. Apa yang dibangun, dipertahankan, diperbaiki, atau dibiarkan begitu saja pada akhirnya menunjukkan apa saja yang dianggap penting untuk diberi perhatian.

Prioritas pembangunan daerah bahkan tidak dilihat dari ikon kotanya, tapi justru dari fasilitas umum yang paling dibutuhkan warganya. Jalan memang tidak menjadi simbol atau identitas daerah, tetapi kelayakannya menggambarkan keberpihakan pemerintah pada kebutuhan kebutuhan warga.

Kehidupan dengan Jalan Seadanya

Kita mungkin jarang memikirkan kondisi jalan ketika semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Berangkat sekolah, pergi bekerja, membeli kebutuhan sehari-hari, membawa hasil panen, atau mengantar seseorang berobat terasa seperti bagian biasa dari kehidupan. Jalan hanya menjadi latar yang kita lewati untuk sampai ke tempat tujuan. Namun, ketika jalan rusak dan sulit dilalui, sesuatu yang sebelumnya terasa sederhana bisa berubah menjadi persoalan besar. Perjalanan menjadi lebih lama, kendaraan harus lebih berhati-hati, dan untuk beberapa orang, pergi dari satu tempat ke tempat lain lebih dari sekedar sekadar jarak.

Hal itu terlihat dalam keseharian sebagian warga Cianjur. Di Desa Sukaratu, Kecamatan Bojongpicung, misalnya, terdapat jalan antardesa sepanjang sekitar empat kilometer yang digunakan warga untuk menuju sawah dan sekolah, sekaligus membawa hasil pertanian. Ketika hujan turun, jalan tersebut menjadi becek dan licin hingga sepeda motor warga kerap terjatuh. Bagi orang yang hanya melihat panjang jalannya, empat kilometer mungkin terdengar seperti angka yang tidak terlalu besar. Tetapi bagi warga yang melewatinya setiap hari, empat kilometer itu adalah bagian dari perjalanan menuju tempat mereka bekerja, belajar, dan mencari penghidupan.

Di wilayah lain, persoalannya bahkan menyentuh kebutuhan yang lebih mendasar. Pada September lalu, seorang warga Desa Cipelah, Kecamatan Cidaun,

harus ditandu sekitar 10 kilometer sebelum mencapai jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan. Kondisi jalan lingkungan dan jalan desa yang rusak membuat kendaraan tidak dapat mencapai permukiman. Warga akhirnya harus membawa pasien terlebih dahulu hingga ke titik yang dapat dijangkau kendaraan.

Dari sini, jalan menjadi lebih dari sekadar infrastruktur. Ia menjadi penghubung berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang layak membantu anak mencapai sekolah, petani membawa hasil panen, warga pergi bekerja, pedagang mengangkut barang, dan seseorang mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Ketika jalan tidak dapat menjalankan fungsi sederhananya itu, hambatannya tidak berhenti di jalan. Ia ikut memengaruhi kehidupan yang berlangsung di kedua ujungnya.

Kebutuhan terhadap jalan yang layak sebenarnya bukan kebutuhan yang sulit dikenali. Ia hadir dalam keseharian, dirasakan oleh warga, dan memengaruhi banyak hal yang mereka lakukan setiap hari. Pertanyaannya kemudian bukan lagi tentang apakah kebutuhan itu ada. Yang menarik adalah bagaimana kebutuhan yang begitu dekat dengan kehidupan warga tersebut kemudian diterjemahkan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Bahasa Warga untuk Jalanan

Musrenbang pernah menjadi harapan bagi warga Cianjur. Ada perasaan bahwa kebutuhan yang disampaikan dalam forum resmi akan sampai kepada orang-orang yang punya kewenangan, lalu perlahan akan menemukan tindak lanjutnya. Warga pernah sangat semangat menyampaikan keluhan, aspirasi, usulan, dan pulang dengan senyuman dan harapan bahwa salah satu persoalan mereka akan segera selesai. Tapi ternyata nihil. Bukan sekali dua. Warga hingga merasa percuma dan tidak lagi berharap pada respon pemerintah.

Sampai pada titik ketika menyampaikan aspirasi dalam forum resmi saja terasa tidak cukup. Akhirnya, keluhan pun mencari jalannya sendiri. Di Bojongpicung, jalan yang rusak akhirnya diberi spanduk sindiran. Pohon pisang diletakkan di tengah jalan. Bukan karena warga tiba-tiba ingin membuat keributan, tetapi karena

jalan yang mereka lewati setiap hari sudah menjadi bagian dari kehidupan yang terlalu sulit untuk terus dianggap biasa. Kalau jalan memang tidak kunjung berubah, setidaknya biarlah orang-orang yang melewatinya tahu bahwa ada warga yang sedang mempertanyakan keadaan itu.

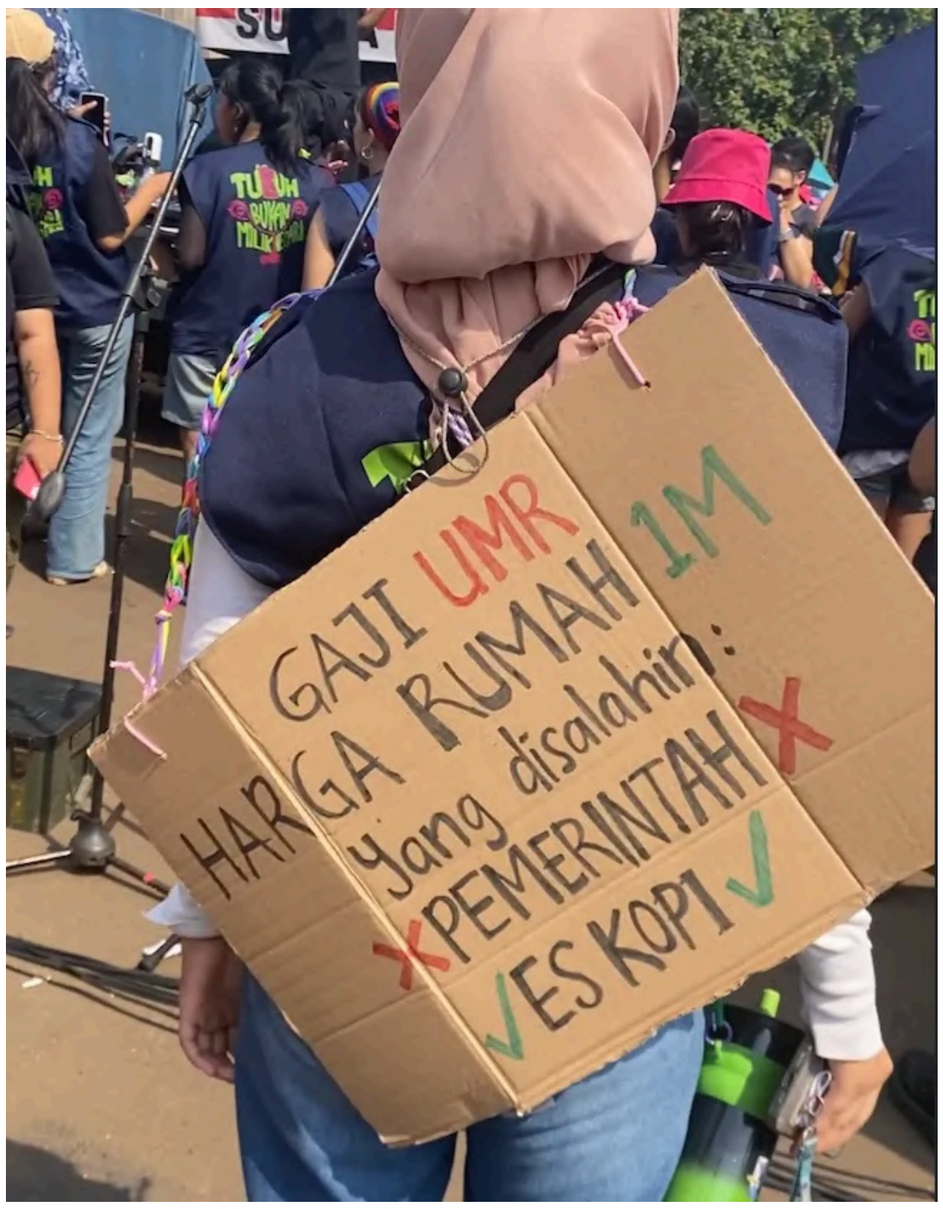
Di sisi lain Cianjur, media sosial menjadi cara untuk mengekspresikan perasaan yang sudah lama dialami. Seorang ibu di Cibinong merekam dan mengeluhkan jalan berlumpur yang menghubungkan desanya. Ada juga seorang Bapak yang merekam perbedaan signifikan antara jalanan Cianjur dengan jalanan Purwakarta yang bersebrangan.

Warga Cianjur melakukan berbagai cara untuk membuat kebutuhan mereka didengar dan direspons oleh pihak yang berwenang. Mereka menyampaikan aspirasi melalui forum, mengulang usulan, memasang spanduk, hingga merekam dan menyebarkan kondisi yang mereka alami. Melalui semua car aitu, warga Cianjur sedang menjalankan perannya sebagai bagian dari negara demokrasi. Dengan terus bersuara, warga tidak hanya memperjuangkan jalan yang lebih layak, tetapi juga ikut merawat demokrasi dari tempat mereka hidup sehari-hari.

Namun, suara warga tidak seharusnya berhenti hanya karena sudah disampaikan. Ada perbedaan antara diberi ruang untuk berbicara dengan benar-benar diperhitungkan dalam menentukan menentukan prioritas. Ketika warga terus menyampaikan kebutuhan yang sama, tetapi perubahan yang mereka tunggu belum juga terasa, partisipasi berisiko hanya menjadi formalitas. Pada akhirnya, **demokrasi bukan hanya tentang apakah warga memiliki kesempatan untuk bersuara, tetapi juga memastikan suara tersebut ikut menentukan perubahan di tempat mereka hidup.**

Katanya kami gak boleh minum kopi biar bisa beli rumah?

Oleh Ghevin Agung Nugraha



Sumber: Dokumentasi pribadi

Negara macam apa yang menyalahkan rakyatnya hanya karena segelas kopi?

Di mana seharusnya mereka hadir untuk menjamin upah yang layak, hunian terjangkau dan nyaman, serta kehidupan yang sejahtera.

Nyatanya, persoalan ini hanya dibebankan kepada individu atas nama gaya hidup. Dipaksa menerima upah minimum yang hanya cukup untuk bayar kost dan kebutuhan dasar, lalu disuruh heran mengapa tidak bisa membeli rumah.

Memang, menyalahkan kopi adalah
hal mudah bagi para penguasa.
Agar mereka bisa lepas dari
tanggung jawab dan masalah yang
sesungguhnya.

Kopi adalah bentuk *micro-pleasure*,
satu-satunya kemewahan
sederhana yang bisa kami jangkau
untuk bertahan hidup, bukan untuk
foya-foya.

Kopi bukan alasan bagi kami,
Generasi Z, menjadi miskin. Tapi
kebijakan publik yang tidak
memihak kelompok pekerja yang
sebenarnya menjadi masalah.

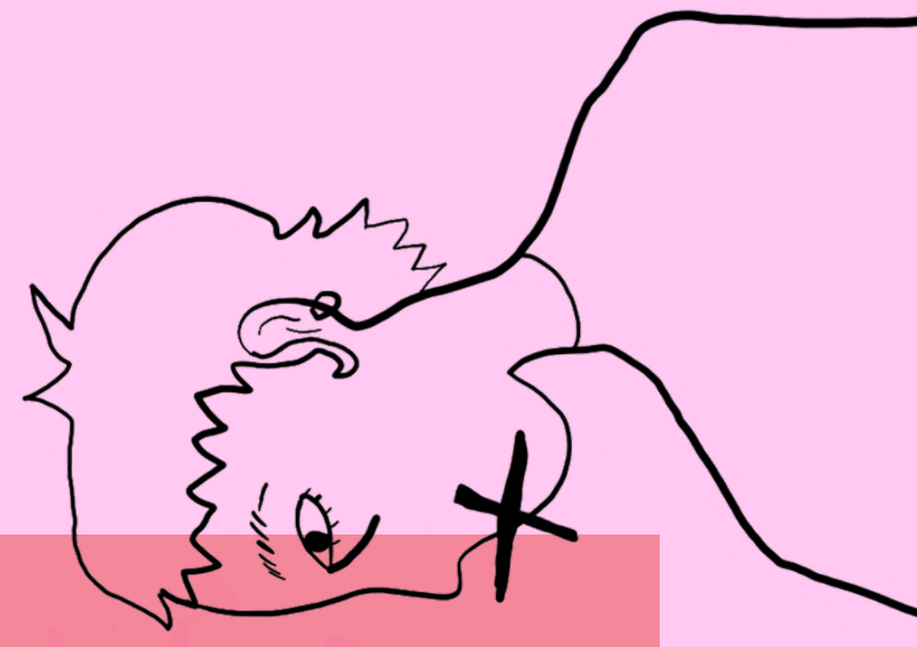
Dari sini kita semua tahu, kan?
Bagaimana demokrasi kita menjadi
cacat hanya karena aspirasi kami
untuk hidup yang layak tidak
pernah diakomodasi dengan baik.





Oleh Dinda Anisa Rakhmawulan

1/7



Menstruasi adalah pengalaman tubuh banyak perempuan, tapi anehnya sampai sekarang masih dianggap *tabu*.



Niraj Gera/ BBC

Imbasnya? Banyak orang yang mengabaikan fakta kalau harga pembalut itu sebetulnya masih *sulit dijangkau* buat sebagian kelompok masyarakat.

2/7

Ini adalah pengeluaran yang perlu aku keluarkan tiap bulannya ketika aku menstruasi:

- Harga pembalut: Rp2.500 /buah
- Pemakaian: 4 kali ganti /hari
- Durasi haid: 7 hari

Hitung-hitungan:

- 2.500 x 4 pembalut: Rp10.000 /hari
- Rp10.000 x 7 hari: **Rp70.000 /siklus**

3/7

Tapi, gak semua orang punya *privilese* yang sama seperti aku untuk mengeluarkan uang dan mengakses produk sanitasi saat menstruasi.



Dari data UNICEF:



1 dari 5 anak perempuan di Indonesia kesulitan mengakses atau membeli pembalut.

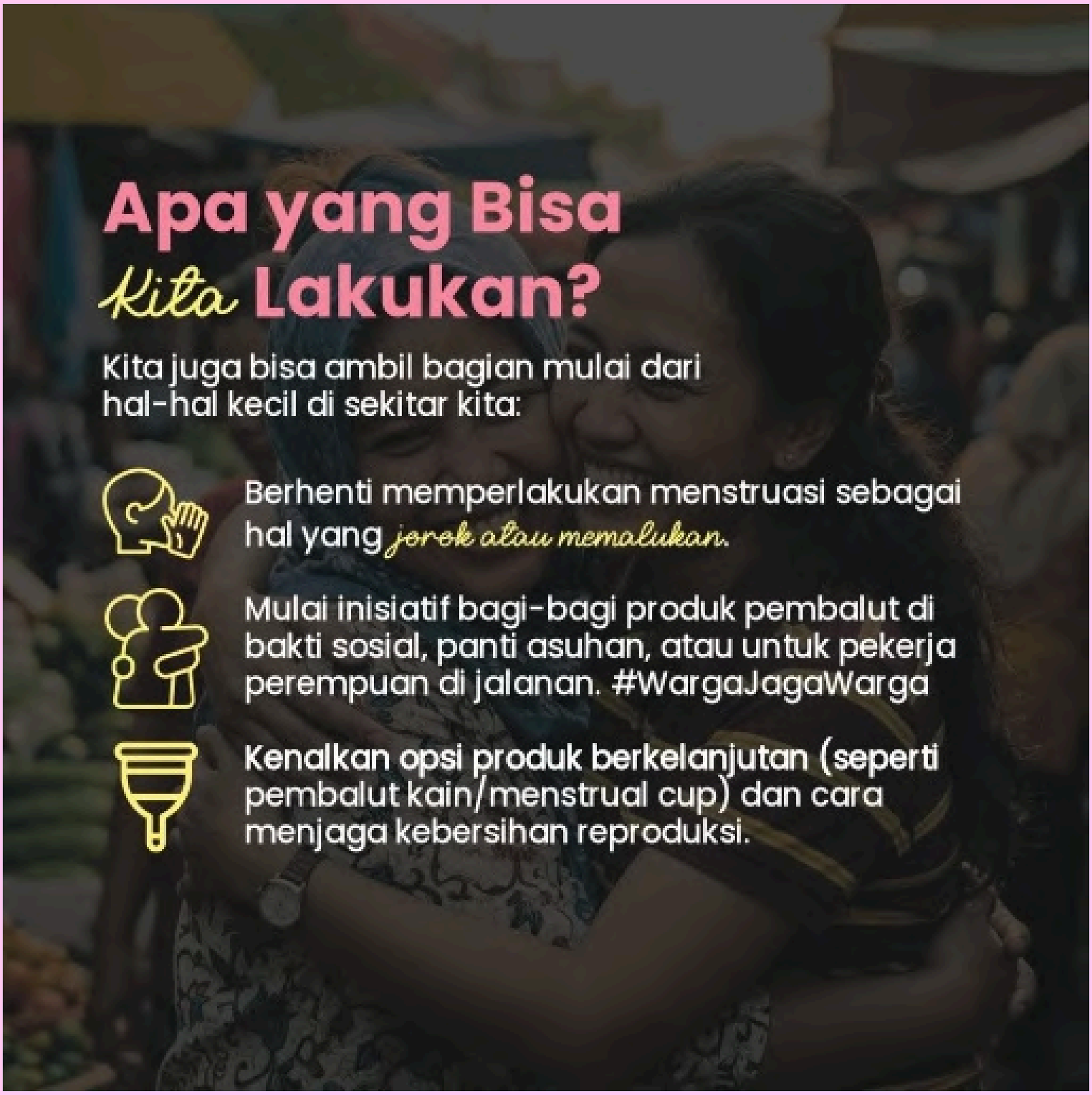
Kalau ditarik dari data BPS (sekitar 92 juta perempuan usia produktif/menstruasi), artinya ada sekitar **18,4 juta** orang yang ngalamin kendala ini!

Masalahnya nggak cuma **finansial**, tapi juga soal **ketersediaan/distribusi** di daerah terpencil dan rasa malu akibat **stigma** yang masih melekat.



4/7


Apa yang Bisa Pemerintah Lakukan?
Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah punya peran besar buat urusan fasilitas publik dan kesehatan reproduksi:
Menyediakan fasilitas pembalut gratis di sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum.
Menghapus atau memotong pajak barang mewah/tambahan pada produk sanitasi dasar perempuan.
Memastikan pasokan produk sanitasi sampai ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).


Apa yang Bisa
Kita Lakukan?
Kita juga bisa ambil bagian mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita:
Berhenti memperlakukan menstruasi sebagai hal yang jorok atau memalukan.
Mulai inisiatif bagi-bagi produk pembalut di bakti sosial, panti asuhan, atau untuk pekerja perempuan di jalanan. #WargaJagaWarga
Kenalkan opsi produk berkelanjutan (seperti pembalut kain/menstrual cup) dan cara menjaga kebersihan reproduksi.

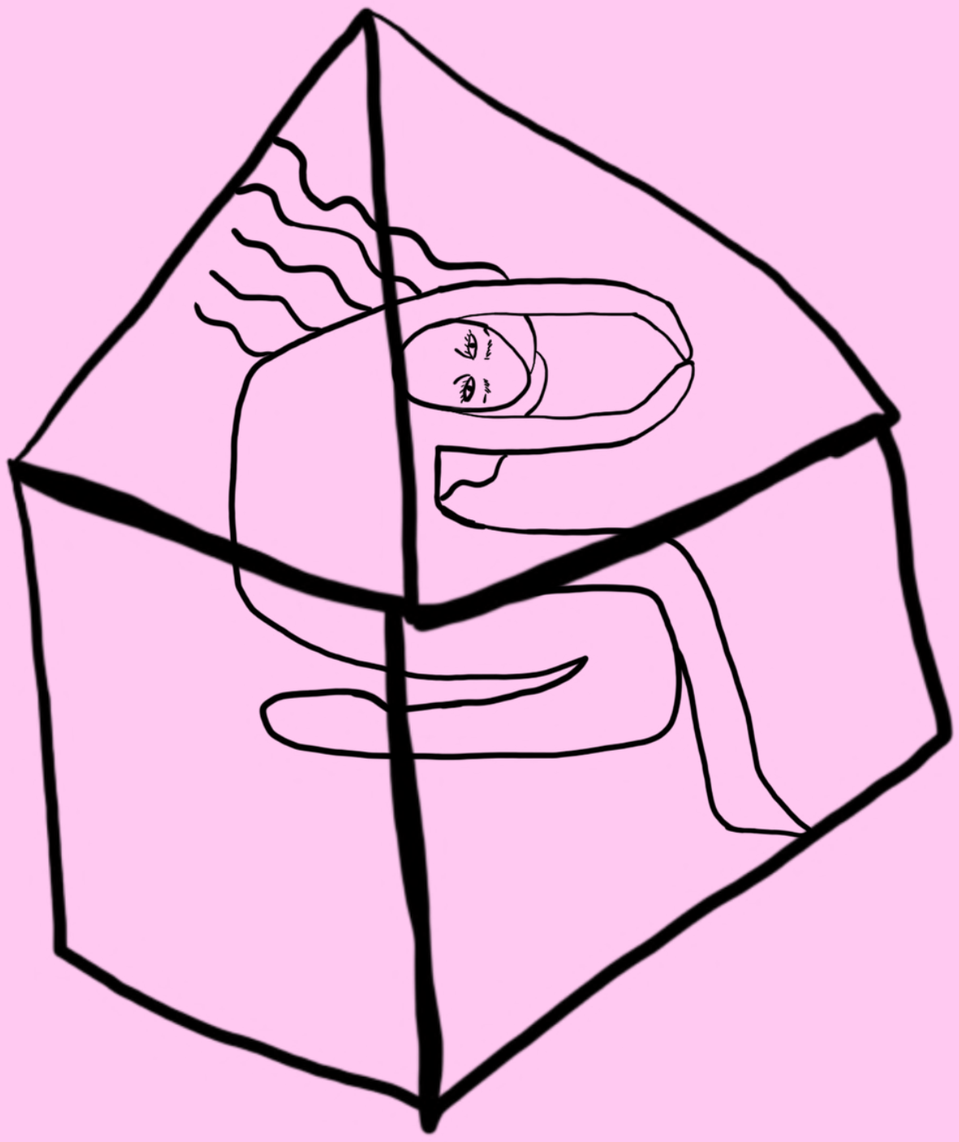
6/7

Akses Sanitasi Adalah Hak, Bukan Mewah.

Harusnya ga boleh ada perempuan yang harus milih antara *beli makan* atau *menjaga kebersihan* dirinya sendiri.

Gimana pendapat kamu soal isu ini?

7/7





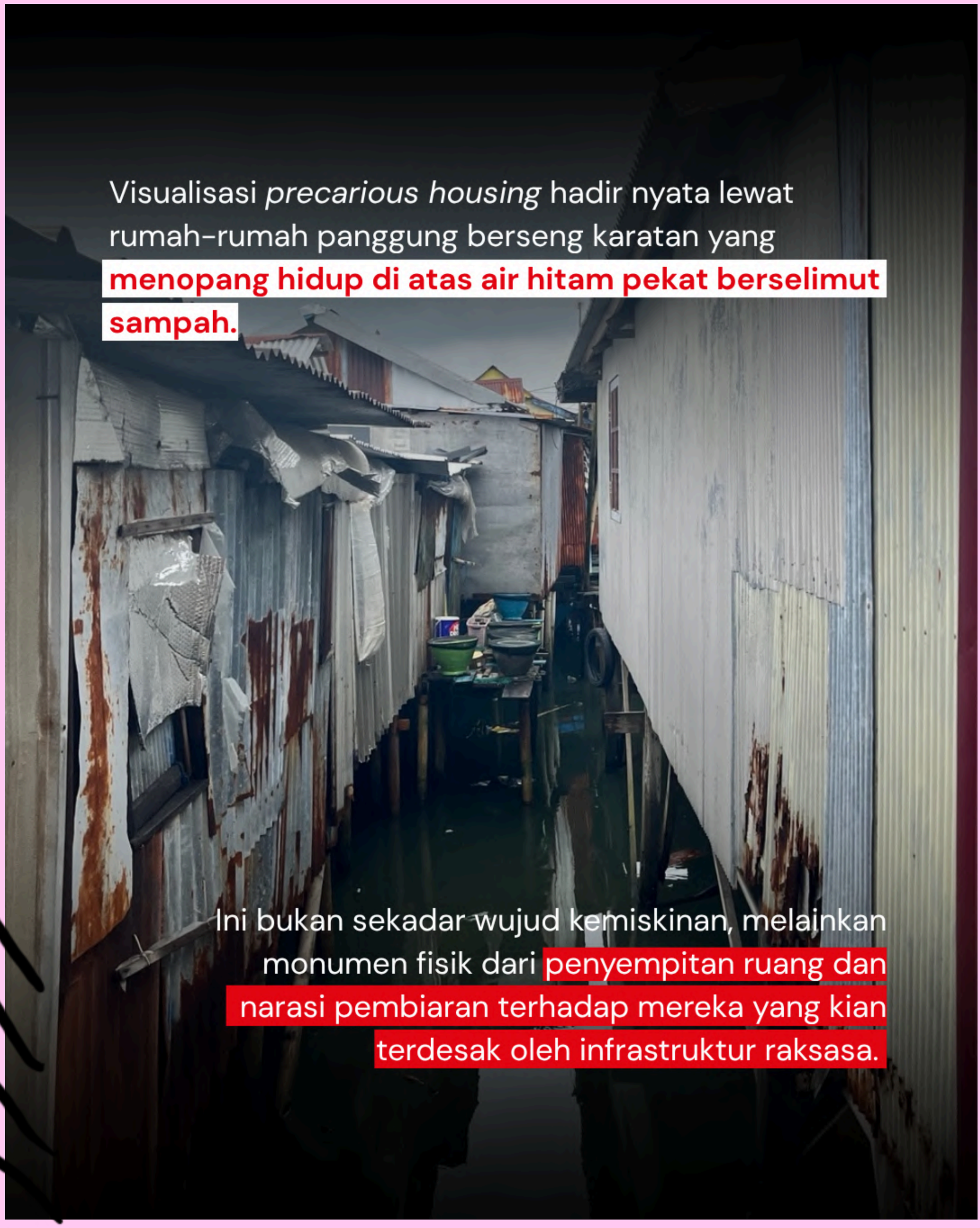
Oleh Alfito Dianova 1/9

Menguji ulang makna ruang hidup:

Bagaimana jika "pembangunan" justru meminggirkan warganya sendiri?

Di Tallo, pesisir bersejarah Makassar, denyut kehidupan warga kini harus berhadapan dengan agresi urbanisasi. Kehadiran reklamasi Makassar New Port (MNP) dan masifnya ekspansi pergudangan telah merombak drastis lanskap pemukiman warga.

2/9


Visualisasi *precarious housing* hadir nyata lewat rumah-rumah panggung berseng karatan yang **menopang hidup di atas air hitam pekat berselimut sampah.**
Ini bukan sekadar wujud kemiskinan, melainkan monumen fisik dari penyempitan ruang dan narasi pembiaran terhadap mereka yang kian terdesak oleh infrastruktur raksasa.

3/9


Dulu, pesisir ini adalah urat nadi
perekonomian,
Laut yang berubah
rupa, dan ruang hidup
yang mengering.

4/9



tempat perempuan seperti Mama Cia mandiri sebagai pencari kerang 'tude'. Namun, intervensi reklamasi MNP mengubah arus laut, menjebak endapan sampah dalam sedimentasi parah, dan menyapu bersih biota laut yang menjadi tumpuan warga.

5/9



Di darat, krisis berlapis berlanjut dengan absennya akses air bersih (PDAM) yang memadai. Pemandangan anak-anak mendorong gerobak jerigen menuju sumur terdekat telah menormalisasi kegagalan pemenuhan hak asasi atas air.

Tragedi hilangnya hak dasar ini kehilangan daya kejutnya karena terpaksa menjelma menjadi rutinitas harian.



Tubuh-tubuh yang terhimpit di antara tembok dan klaim sepihak.



7/9



Ruang gerak fisik di Tallo kian menyusut, terkurung di antara raksasa tembok gudang industri dan dinding-dinding rumah yang renta. Sirkulasi angin laut terblokir, meninggalkan hawa panas yang memanggang pemukiman secara langsung.

Di sudut lain, plang **"Tanah Milik Negara"** berdiri di atas tumpukan sampah sebagai penanda visual praktik *enclosure* (pemagaran) dan *dispossession* yang memutus hak warga atas sisa ruang terbuka.

Di sinilah gagasan Henri Lefebvre tentang "Hak atas Kota" (*Right to the City*) terenggut; anak-anak kehilangan ruang inklusif untuk bermain, sehingga kemampuan mereka untuk mengenali dan memiliki ruang hidupnya kian terancam.



8/9



Siluet anak-anak yang berada di tengah hamparan laut kini berlatarkan bayang angkuh dari infrastruktur pelabuhan MNP. Pemandangan ini merangkum narasi besar Tallo: **sebuah cakrawala yang terenggut paksa oleh megaproyek reklamasi.** Ruang sosial warga kini tersudut, menyisakan proyeksi masa depan yang samar karena terhimpit di antara memori masa lalu dan mesin pembangunan yang tidak memihak mereka.

